

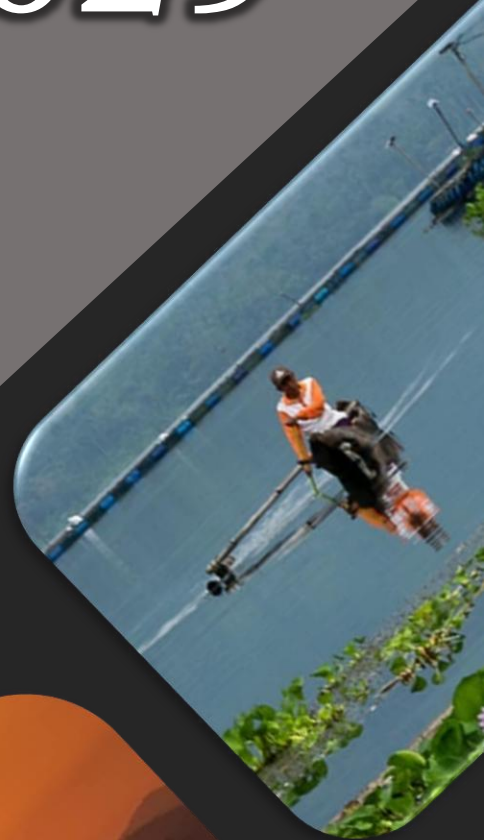


Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Lampung Barat

2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antara Dokumen	I-5
1.4. Maksud Dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	II-113
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-120
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan	III-20
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-36
BAB V PENUTUP	V-1



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

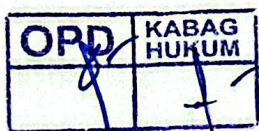
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

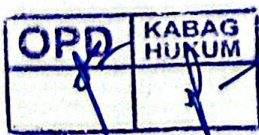
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 446);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

**BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.



- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
 - BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB IV : PROGRAM PERANGKA DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Agustus 2025



Diundangkan di Liwa
pada tanggal 19 Agustus 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
02/1610/LB/2025



PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2.. TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Barat dibentuk dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat. Sebagai daerah otonom Kabupaten Lampung Barat berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Lampung Barat harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, keuangan Daerah, indikator kinerja daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selanjutnya, Perangkat Daerah menyusun rencana



strategis dengan berpedoman pada RPJMD ini. RPJMD akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Karena RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD maka, dalam penyusunannya harus memperhatikan periodisasi RPJPD. RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 terbagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan per 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 berada dalam tahapan pertama RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR AS2



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis serta program kerja tahunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta sebagai upaya dalam menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Namun, di sisi lain, daerah ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, ketimpangan sosial-ekonomi, serta ancaman perubahan iklim yang berpengaruh terhadap ketahanan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 disusun untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat memiliki nilai strategis karena berperan sebagai:

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberikan arah dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan.
2. Instrumen Pembangunan Berkelanjutan yang memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
3. Panduan Penganggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah.
4. Dasar Evaluasi Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan daerah secara periodik.

RPJMD ini disusun untuk periode kepemimpinan kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa bakti tahun 2025-2030. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini mencakup:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim.
3. Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan yang memperhitungkan aspek ketahanan bencana dan efisiensi energi.
4. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem alam.

Dengan adanya komitmen ini, RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan jangka menengah, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
- r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 446);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hubungan ini penting untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, efektivitas implementasi program, serta pencapaian tujuan pembangunan secara optimal. Berikut adalah hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. RPJPN dan RPJMN

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai pedoman pembangunan nasional. Keselarasan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung

RPJMD Kabupaten Lampung Barat juga harus mengacu pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD Provinsi Lampung untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program pembangunan.

3. RPJPD Kabupaten Lampung Barat

Sebagai dokumen jangka menengah, RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025 serta RPJPD yang baru untuk periode 2025-2045. Hal ini guna menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang.

4. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

RPJMD harus memperhatikan RTRW Kabupaten Lampung Barat agar kebijakan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan peruntukan tata ruang, baik untuk sektor permukiman, industri, pertanian, kawasan lindung, maupun infrastruktur lainnya.

5. **Renstra Perangkat Daerah**

Setiap perangkat daerah di Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang harus selaras dengan RPJMD. Renstra ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

6. **RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran. RKPD merupakan tahapan implementasi dari RPJMD yang lebih operasional.

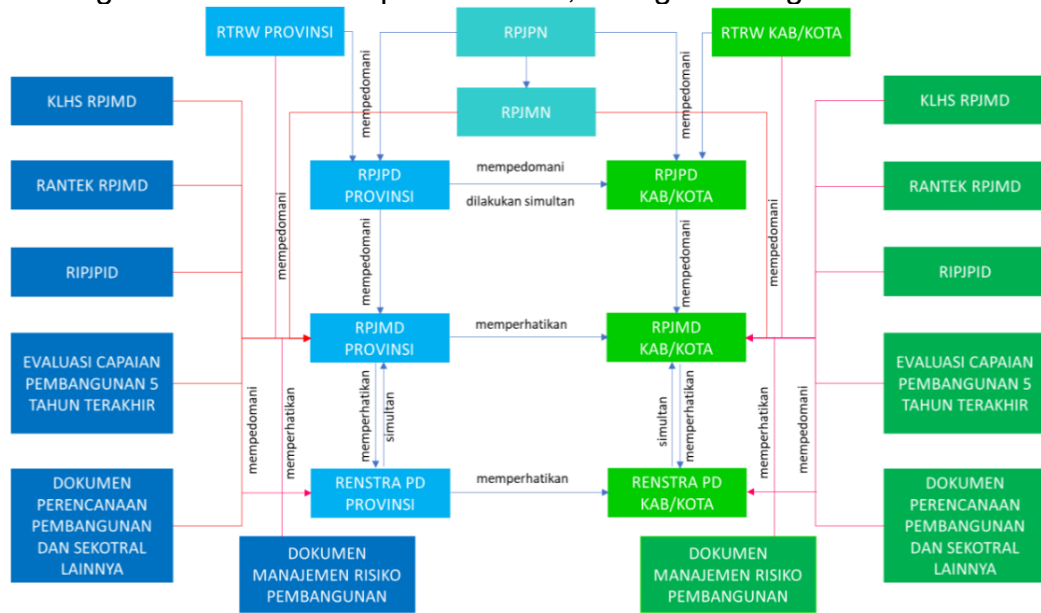
7. **Dokumen Pembangunan Sektoral dan Tematik**

RPJMD juga harus terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral seperti Rencana Induk Pariwisata Daerah, Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim, Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

8. **Dokumen KLHS RPJMD**

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai landasan analisis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD. KLHS mengidentifikasi isu strategis lingkungan, sosial, dan ekonomi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang harus diadopsi dalam RPJMD. Hubungan antara KLHS dan RPJMD bersifat saling menguatkan, di mana KLHS menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. Integrasi KLHS ke dalam RPJMD juga merupakan mandat regulasi untuk memastikan rencana pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan, sebagaimana grafik di bawah ini:



Dengan adanya keterpaduan antara RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, diharapkan pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada di masa depan.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.
- Menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi agar tercapai sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
- Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam strategi, kebijakan, dan rencana kerja yang terukur dan sistematis.
- Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) serta program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah.

2. Tujuan

- Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

- Meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
- Memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui program pembangunan yang berbasis kinerja dan hasil.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan ketahanan sosial-ekonomi.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antara Dokumen
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III Visi, Misi, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek geografi dan demografi

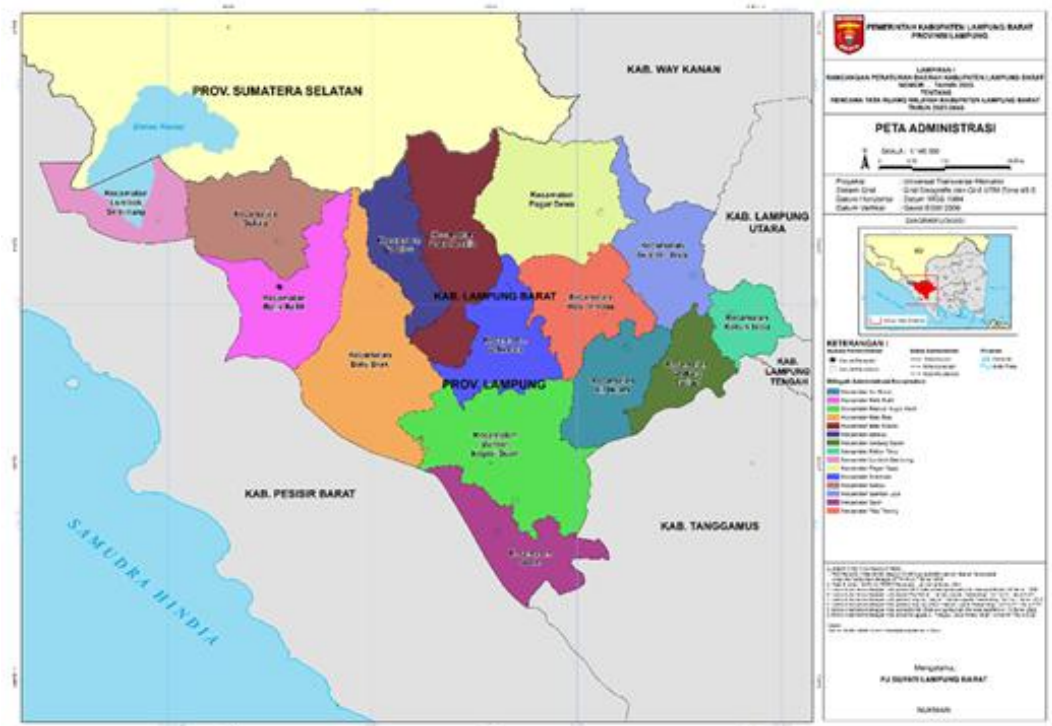
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 September 1991.

Pada tahun 2012, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran dengan dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, yang diresmikan pada tanggal 22 April 2013.

Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat $04^{\circ}51'26''$ – $05^{\circ}20'26''$ Lintang Selatan (LS) dan $103^{\circ}50'13''$ – $104^{\circ}33'49''$ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah ± 210.799 Ha, atau 6,28 % dari luas administrasi Provinsi Lampung.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Barat



Sumber : Lampiran I Perda Lampung Barat No. 5 tahun 2023

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

Guna mendukung efektivitas dalam rentang kendali (*span of control*) penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunannya, Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, dengan 131 pekon (desa) dan 5 (lima) kelurahan. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Batu Brak ($\pm 24.270,41$ Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu ($\pm 6.154,89$ Ha).

Tabel 2.1. Luas Wilayah Perkecamatan

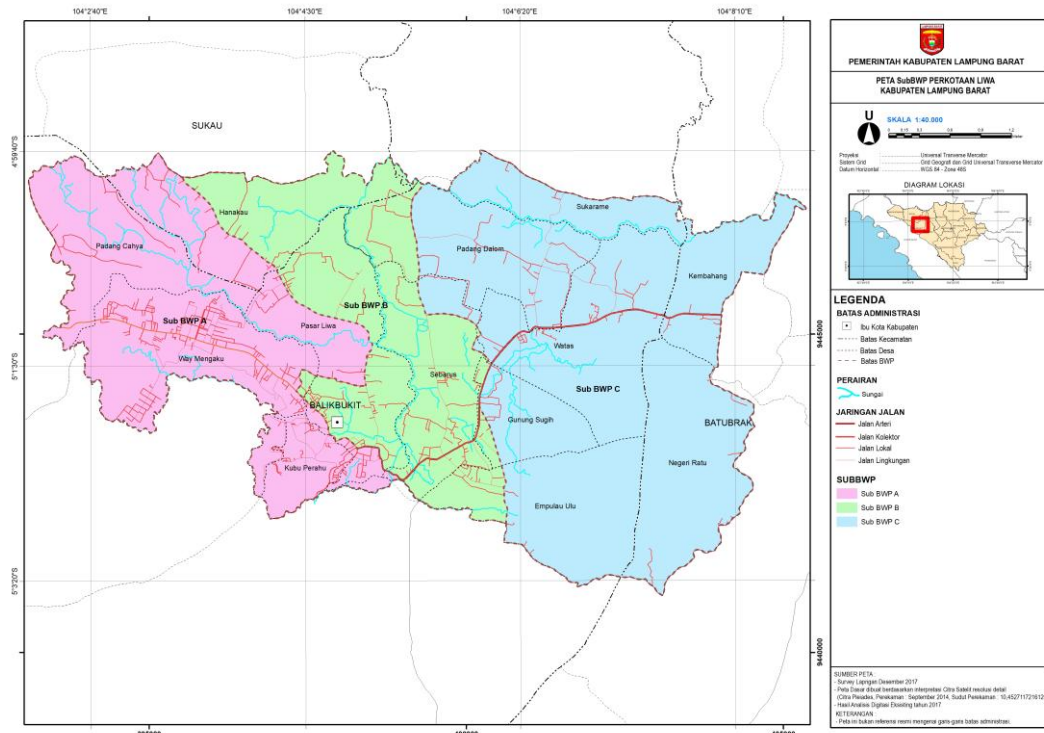
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Pekon	Juml. Kelurahan	Ibu Kota
1	Balik Bukit	15.853,15	10	2	Pasar Liwa
2	Sukau	14.585,56	10	0	Buay Nyerupa
3	Lumbok Seminung	10.891,42	11	0	Lumbok
4	Belalau	9.390,84	10	0	Kenali
5	Sekincau	11.508,50	4	1	Pampangan
6	Suoh	11.836,20	7	0	Sumber Agung
7	Batu Brak	24.270,41	11	0	Pekon Balak
8	Pagar Dewa	19.770,98	10	0	Basungan
9	Batu Ketulis	18.201,00	10	0	Bakhu
10	Bandar Negeri Suoh	23.839,54	10	0	Sri Mulyo
11	Sumber Jaya	13.098,93	5	1	Tugu Sari
12	Way Tenong	12.969,40	8	1	Mutar Alam
13	Gedung Surian	7.696,22	5	0	Gedung Surian
14	Kebun Tebu	6.154,89	10	0	Pura Jaya
15	Air Hitam	10.812,40	10	0	Semarang Jaya
Lampung Barat		210.799,62	131	5	Liwa

Sumber: Perda Lampung Barat No. 5 tahun 2023

Ibukota Kabupaten Lampung Barat, berkedudukan di Liwa. Dalam Struktur Ruang, Liwa difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

Wilayah Kawasan Perkotaan Liwa mencakup 12 pekon dan kelurahan yang meliputi 8 pekon dan 2 kelurahan di Kecamatan Balik Bukit dan 2 (dua) pekon di Kecamatan Sukau, yaitu sebagian pekon Tanjung Raya dan Hanakau. Luas wilayah kawasan perkotaan Liwa $\pm 5.008,31$ Ha.

Gambar 2.2. Peta SubBWP Perkotaan Liwa



Sumber: RDTR Liwa, Tahun 2018

Kontribusi Ekonomi

Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai penghasil kopi robusta berkualitas tinggi, yang menjadi komoditas unggulan daerah dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Perkebunan kopi yang luas tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah melalui ekspor.

Kontribusi Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara aktif meningkatkan infrastruktur untuk mendukung sektor ekonomi dan pariwisata. Pada tahun 2024, Lampung Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp3,355 miliar. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan sarana pengolahan sampah, seperti truk sampah dan motor roda tiga, guna mendukung destinasi wisata Lumbok Seminung dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kontribusi Lingkungan Hidup

Kabupaten Lampung Barat memiliki komitmen kuat terhadap konservasi lingkungan. Sekitar 57% wilayahnya terdiri dari kawasan hutan dan hutan lindung, menjadikannya sebagai daerah penyangga ekosistem yang

penting. Kabupaten ini juga merupakan hulu dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Lampung, yaitu DAS Musi, DAS Semangka, dan DAS Tulang Bawang. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Lampung Barat mencapai 73,09 poin, meningkat 2,54 poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan kualitas lingkungan yang baik.

Kontribusi Pariwisata dan Konservasi

Sebagai kabupaten konservasi, Lampung Barat memiliki berbagai destinasi wisata alam, seperti Kebun Raya Liwa dan Danau Ranau, yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Upaya konservasi yang dilakukan tidak hanya menjaga kelestarian alam tetapi juga mendukung sektor pariwisata berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Dengan posisi geografis yang strategis dan komitmen terhadap konservasi lingkungan, Kabupaten Lampung Barat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem regional serta memberikan kontribusi signifikan dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata di Provinsi Lampung

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Mineral Logam dan Non Logam

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Lampung Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit, batu gamping, metamorf, lempung, endapan alluvium, tufa masam, dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Sejak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka urusan dan kewenangan perusahaan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.: 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung, pada lampiran keputusan, disebutkan bahwa wilayah pertambangan di Kabupaten Lampung Barat, meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Geothermal

Posisi Lampung Barat yang berada pada jalur patahan yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana geologi, mengandung pula potensi geologi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kedaulatan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan panas bumi (geothermal). Lampung Barat memiliki lima kawasan potensi geothermal, yaitu:

- a) **Panas bumi danau Ranau** telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor. 1551.K/30/MEM/2011, tanggal 21 April 2011, dengan total luas ± 8.561 Ha. Wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung), dan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).

Wilayah WKP yang berada di Kabupaten Lampung Barat seluas $\pm$ 6.157 Ha (72%) dan sekitar $\pm$ 2.404 Ha (28%) berada di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Potensi terduga panas bumi diperkirakan mencapai 210 MWe, dengan rencana pengembangan berupa 1 unit PLTP berkapasitas 40 MWe. Pengusahaan Panas Bumi danau Ranau ditugaskan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1864 K/30/MEM/2018 tanggal 8 Juni 2018, dengan jangka waktu penugasan selama 37 tahun.

- b) **Panas bumi Sekincau** termasuk sistem panas bumi vulkanik dan berada dalam sistem CAT Kota Agung, memiliki potensi energi panas bumi yang paling tinggi dan paling banyak sebaran titik lokasi manifestasi panas bumi, dengan perkiraan potensi $\pm$ 378 MWe – 485 MWe. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai PLTP dengan Kapasitas 2 x 110 MWe. Manifestasi panas bumi sekincau meliputi kaldera Sekincau, Purunan, Bacingot, Belirang, Suoh-hantatai, Heling, Way Peros, Labuhan Balak-Way Kunjir, Way Ngingi-Way Haru. Meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekincau, Way Tenong, Batu Brak, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Luas wilayah Panas Bumi Sekincau $\pm$ 32.970 Ha dimana sekitar 30.500 Ha berada dalam Kawasan TNBBS. Penugasan Panas Bumi Sekincau diberikan kepada PT Star Energy Geothermal Sekincau Suoh (SGSS) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1870 K/30/MEM/2018, tanggal 21 Juli 2018.
- c) **Panas Bumi Fajar Bulan**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi sebagian Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, sebagian kecamatan Gedung Surian dan kecamatan Sumberjaya (sisi barat hingga barat daya dari HL Reg 45 B Bukit Rigit). Perkiraan potensi 150- 250 MWe.
- d) **Panas Bumi Way Umpu**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi Kecamatan Pagar Dewa, kecamatan Sumberjaya hingga Kabupaten Way Kanan. Perkiraan potensi 110-220 Mwe.
- e) **Panas Bumi Kukusan**, belum tertuang dalam buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 1 (terbitan Kementerian ESDM), akan tetapi tertera dalam peta geologi Belanda tahun 1933. Manifestasi panas bumi berada di sungai Way Penyelan Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau dengan kisaran suhu 35°C – 40°C. Hulu dari sungai ini berada di Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara dan termasuk dalam CAT Ranau dan sistem panas bumi non vulkanik. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik dan potensi energi panas bumi yang dapat dihasilkan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2019 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam perda ini, pemanfaatan langsung

panas bumi meliputi: a) kegiatan Pariwisata seperti perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan. b) Kegiatan Agrobisnis seperti pengeringan teh, kopi, kopra, jagung, dan green house, c) Kegiatan Industri seperti pengolahan kayu, kulit, dan rotan, d) kegiatan lainnya yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

Hidrologi

Geografis Lampung Barat merupakan dataran tinggi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas siklus hidrologi bagi Provinsi Lampung maupun Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pembentukan hujan sekaligus sebagai daerah tangkapan air (catchment area) yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang membentuk system daerah aliran sungai yang bermuara hingga ke pantai Timur dan Selatan di Propinsi Lampung.

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Lampung Barat merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, karenanya, sangat berperan penting terhadap kinerja sistem hidrologi di dua provinsi tersebut, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dengan lebih dari 170 anak sungai.

Sungai-sungai besar sebagai inlet dari sistem DAS, diantaranya adalah sungai Way Besai, Way Umpu, Way Giham, yang membentuk sub DAS Way Besai Hulu, yang merupakan bagian dari sistem DAS Mesuji - Tulang Bawang, sungai Way Semaka yang membentuk sub DAS Semaka, dan sungai Way Warkuk yang bermuara di danau Ranau sebagai sub DAS Warkuk yang merupakan bagian dari sistem DAS Musi.

DAS Tulang Bawang (wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang), memiliki luasan ± 982.292 Ha, dimana sekitar 6,8% dari luasan tersebut atau sekitar 67.411 Ha berada di Kabupaten Lampung Barat sebagai hulu dari sungai-sungai besar pembentuk DAS Tulang Bawang.

Berdasarkan data BPDAS Tahun 2016, sub DAS dari DAS Tulang Bawang yang wilayahnya masuk Kabupaten Lampung Barat antara lain sub DAS Way Besai (41.780 ha), Way Giham (15.315 ha), Way Rarem (1.972 ha), dan Way Tahmi (8.345 ha), yang wilayah alirannya mencakup Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, Pagar Dewa, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Kecamatan Sumberjaya. DAS Tulang Bawang masuk sebagai DAS Prioritas Nasional, sebagai pendukung ketahanan pangan dan energi Nasional.

DAS Way Semaka masuk dalam DAS prioritas Provinsi Lampung, dimana wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus, dengan luas daerah catchment area $\pm 1.614,5$ km².

Sungai dan Danau

Lampung Barat dialiri tiga sungai besar yaitu Way Besay, Way Semangka, dan Way Warkuk serta memiliki danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau.

Panjang sungai Way Semaka $\pm 95,47$ km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus). Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way Rubok, Way Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way Maraman, Way Giham, Way Meneng, Way Ngarip, Way Melebui Balak, Way Andarumon, Way Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir.

Danau Ranau merupakan outlet dari sub DAS Komering, yang merupakan bagian dari DAS Musi. Luas sub DAS Komering $\pm 407.898,78$ Ha, sedangkan luas Outlet Danau Ranau mencapai $\pm 508 \text{ km}^2$ (50.800 Ha) yang terdiri dari luas daratan dan luas perairan. Luas perairan Danau Ranau mencapai $\pm 12.623,52$ Ha dan luas daratan sebagai daerah tangkapan air (catchment area) mencapai $\pm 38.176,48$ Ha, dengan panjang total garis sempadan danau mencapai: $\pm 64,7$ km.

Perairan danau Ranau seluas $\pm 2.792,19$ Ha (22,12%) berada di Kecamatan Lumbok Seminung, dengan panjang garis sempadan danau $\pm 23,6$ km.

Gambar 2.3. Danau-danau yang ada di Kabupaten Lampung Barat



Keterangan: *Kiri:* danau Ranau dan gunung Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung, *Kanan:* danau Lebar dan danau Minyak di Kecamatan Suoh.

Berdasarkan data dari **BBWS Wilayah Sungai Sumatera VIII**, jumlah sungai yang bermuara di danau Ranau (inlet) sebanyak ± 36 sungai dan 1 sungai sebagai outlet yaitu sungai Silabung. Inlet terpanjang adalah sungai Way Warkuk dengan panjang mencapai ± 26 km. Danau Ranau termasuk danau prioritas nasional Tahap II.

Selain Danau Ranau, Lampung Barat juga memiliki 4 danau kecil yang terletak di Kecamatan Suoh yaitu Danau Lebar (67,6 Ha), Danau Asam (121,1 Ha), Danau Minyak (10 Ha), dan Danau Belibis (2 Ha).

Keempat danau tersebut berada pada zona Pemanfaatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai Geopark, karena keunikan proses geologinya, dimana keempat danau tersebut terbentuk sebagai akibat proses erupsi freatik (semi vulkanik) dari salah satu kaldera di kompleks kaldera pematang bata pada tanggal 10 Juli 1933. Letusan tersebut dipicu oleh kejadian gempa yang terjadi sebelumnya pada tanggal 25 Juni 1933.

Cekungan Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. CAT menyediakan sumber daya air yang berpotensi sebagai bahan baku hydrothermal pada sistem panas bumi. Lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2016 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, memetakan wilayah hidrogeologis Kabupaten Lampung Barat kedalam 3 (tiga) CAT, yaitu:

- a) **CAT Ranau** dengan luas $\pm 1.501 \text{ km}^2$, CAT Ranau meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan Sukau, dan sebagian Kecamatan Balik Bukit.
- b) **CAT Kota Agung** dengan luas $\pm 1.236 \text{ km}^2$, CAT Kota Agung meliputi Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh.
- c) **CAT Metro-Kotabumi** dengan luas $\pm 21.640 \text{ km}^2$. CAT Metro-Kotabumi meliputi Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Sumber Jaya.

Potensi Kandungan

Keberadaan sungai, danau, dan cekungan air tanah, menyediakan pasokan sumber daya air yang melimpah. Ketersediaan air baku yang melimpah akan menjamin, perwujudan ketahanan dan keamanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam mendukung perwujudan kawasan permukiman yang berkelanjutan, seperti air bersih, sanitasi, dan energi listrik. Beberapa peranan penting sumber daya air di Lampung Barat sebagai berikut:

a) Pembentuk Sistem Kebudayaan

Sebagian besar permukiman yang berkembang di kabupaten Lampung Barat, berada di sempadan sungai. Hasil penelitian Badan Arkeologi Bandung pada tahun 2019, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 16 situs pemukiman kuno abad 10-14 masehi ditemukan di sepanjang sungai Way Rubok (Kecamatan Balik Bukit). Bagi masyarakat kuno, sungai berperan sebagai sistem navigasi dan jalur migrasi penduduk membentuk koloni (pemukiman), bahkan pada masa kerajaan Sriwijaya (abad 7 – 12 masehi) beberapa sungai besar dipergunakan sebagai jalur perdagangan. Bentuk adaptasi permukiman terhadap sungai terlihat pada arsitektur bangunan rumah tradisional masyarakat asli yang berbentuk rumah panggung dengan

pola penyebaran seperti pita (ribbon) atau linear. Ikatan kekerabatan bagi masyarakat asli (Lampung) juga didasari atau dikelompokkan berdasarkan daerah aliran sungai, yang disebut sebagai Kebuayan. Adaptasi terhadap kondisi sumber daya air, melahirkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak sumber daya air.

b) Penyedia Sistem Air Baku

Air baku adalah sumber air yang menjadi bahan baku pengolahan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi air minum dan kebutuhan lain-lainnya. Sumber air baku di Lampung Barat meliputi: air tanah, air permukaan, mata air, dan air hujan. Pemanfaatan air baku di Lampung Barat antara lain sebagai penyediaan sistem air bersih untuk air minum, sanitasi dan sistem irigasi.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. Hingga tahun 2023, PDAM Limau Kunci memiliki 10 unit SPAM perpipaan dengan kapasitas 6 – 21 liter/detik. Cakupan layanan meliputi sistem perkotaan di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Belalau, Sekincau, Way Tenong, dan Kebun Tebu, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 15.310 SR atau baru sekitar 39,2% dari kapasitas terpasang.

Selain penyediaan air minum perkotaan yang dikelola oleh PDAM, dilakukan pula pelayanan penyediaan air minum pedesaan yang pengelolaannya dilakukan oleh pekon, dengan jumlah cakupan layanan air bersih mencapai 74.787 KK atau sekitar 89% dari total kepala keluarga di Lampung Barat.

Pemanfaatan lain dari air baku adalah sebagai sumber air irigasi guna mendukung kedaulatan pangan. Hingga tahun 2024, terbangun sebanyak 118 daerah irigasi (DI) dengan luas DI (baku Sawah) $\pm$ 11.442,76 Ha dengan indek pertanaman (IP) mencapai $\pm$ 121,02 %.

c) Penyedia Energi Baru Terbarukan

Sungai-sungai yang mengalir ke arah Timur maupun Selatan, umumnya memiliki alur yang panjang. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, baik berupa PLTMH (mikrohidro, minihidro) maupun PLTA. Sungai-sungai yang saat ini sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, adalah sungai Way Besai dan sungai Way Semaka.

Pemanfaatan sungai Way Besai sebagai sumber energi Listrik di Lampung Barat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) melalui PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 MWe,

Pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe,

PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 MWe.

Potensi Kopi

Tabel 2.2. Produksi Kopi

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Produksi Kopi Robusta (ton)	56,054.4	54,563.2	56,054.4	52,325.8	62,979.5
2	Produksi Lada (ton)	3,061.6	3,061.6	3,061.6	2,649.0	2,698.9

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi kopi robusta di Lampung Barat mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Produksi kopi tercatat sebesar 56.054,4 ton pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi 54.563,2 ton pada tahun 2021. Meski kembali meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah produksi yang sama seperti tahun 2020, yaitu 56.054,4 ton, produksi kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 52.325,8 ton. Namun, pada tahun 2024, produksi kopi robusta meningkat signifikan hingga mencapai 62.979,5 ton, mencerminkan pemulihan yang sangat baik dalam sektor ini.

Sementara itu, produksi lada menunjukkan tren yang lebih stabil, meskipun dengan sedikit penurunan. Dari 2020 hingga 2022, produksi lada tetap konstan di angka 3.061,6 ton. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 2.649,0 ton, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 2.698,9 ton.

Lampung Barat memiliki potensi agribisnis yang besar, terutama pada komoditas kopi robusta dan lada. Produksi kopi robusta, yang menjadi salah satu produk unggulan daerah, menunjukkan pola fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, produksi kopi robusta mencapai 62.979,5 ton, angka tertinggi selama periode tersebut, mencerminkan potensi besar wilayah ini sebagai penghasil kopi berkualitas. Kenaikan produksi ini menandakan keberhasilan dalam penerapan teknologi pertanian, rehabilitasi lahan, atau perbaikan sistem pengelolaan hasil panen.

Di sisi lain, lada juga menjadi komoditas penting meskipun produksinya cenderung stabil dengan sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Produksi lada pada tahun 2024 tercatat sebesar 2.698,9 ton, menunjukkan adanya peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

Lampung Barat dengan keunggulan agrarisnya memiliki potensi untuk terus meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional melalui inovasi, pengelolaan yang efisien, dan perluasan akses pasar untuk kedua komoditas ini. Kombinasi kopi dan lada sebagai produk unggulan menjadikan Lampung Barat sebagai salah satu pusat agribisnis strategis di Indonesia.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Air

Ketersediaan air yang berada di bumi merupakan suatu sistem yang dinamik, artinya selalu berubah dari waktu ke waktu. Neraca air lahan merupakan suatu estimasi ketersediaan air yang berada pada suatu lahan tertentu dengan jenis tutupan tertentu. Ketersediaan air yang merupakan bagian dari fenomena alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang (*spatial variability*) dan variabilitas waktu (*temporal variability*) yang sangat tinggi. Penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah. Berikut rekapitulasi luas tutupan lahan terhadap daya dukung air di Kabupaten Lampung Barat disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Luas Tutupan Lahan Terhadap Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat

No	Tutupan Lahan	Luas	Koefisien	Luas X Koefisien
1.	Danau	3.094,58	1,00	3.094,58
2.	Hutan Rimba	39.651,51	1,00	39.851,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	98,16	0,21	20,40
5.	Perkebunan/Kebun	121.266,32	0,21	25.591,93
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	384,35	1,00	484,35
8.	Sawah	11.493,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.126,02	0,21	5.318,65
10.	Sungai	466,98	1,00	456,98
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,92	0,21	4,83
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	210.799,00	-	81.856,73

Sumber : Perda Nomor 5 tahun 2023, RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043.

Berdasarkan perhitungan hasil dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa jumlah ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan perhitungan adalah 1.651.173.935,39 m³/tahun. Kemudian untuk mengetahui selisih antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan maka jumlah air yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat dikonversikan dalam L/tahun sehingga ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat sebesar 1.651.173.935.390 L/tahun. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01 Tahun 2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll).

Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Untuk kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan standar yang digunakan maka dapat diketahui bahwa kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 6.747.623.060 L/tahun. Angka ini didapatkan dengan mengalikan jumlah kebutuhan air per orang per hari dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Kemudian mengalikannya dengan 365 hari dalam setahun untuk mengetahui jumlah kebutuhan air dalam satu tahun. Asumsi untuk kebutuhan air pada kegiatan pertanian dihitung dengan mengalikan luas lahan pertanian sawah terhadap 1,2 Liter/Detik/Ha pada setiap musim panen sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal untuk irigasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum untuk standar pelayanan minimal kebutuhan irigasi sawah. Adapun untuk contoh perhitungan jumlah kebutuhan air untuk kegiatan domestik, non domestik dan pertanian di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Perhitungan kebutuhan air seperti inilah yang menjadi dasar dalam proyeksi daya dukung air pada tahun berikutnya :

Tabel 2.4. Status Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Air Hitam	10.406	221.687.565	49.337.513	933.304.896	213.639.209.317	SURPLUS
2	Balik Bukit	36.622	861.523.710	132.304.742	2.310.421.236		SURPLUS
3	Bandar Negeri Suoh	22.041	542.206.950	68.441.390	54.812.868.903		SURPLUS
4	Batu Brak	9.727	272.525.487	59.505.097	9.010.932.634		SURPLUS
5	Batu Ketulis	8.981	256.182.910	56.236.582	2.992.349.789		SURPLUS
6	Belalau	7.463	222.930.572	49.586.114	15.905.234.831		SURPLUS
7	Gedung Surian	11.624	414.069.738	62.813.948	16.286.832.337		SURPLUS
8	Kabun Tebu	16.613	423.326.137	89.665.227	23.978.545.386		SURPLUS
9	Lumbok Seminung	2.834	121.570.020	29.314.004	3.849.820.615		SURPLUS
10	Pagar Dewa	13.131	347.066.725	61.413.345	444.006.435		SURPLUS
11	Sekincau	14.241	371.368.352	71.273.670	5.086.864.184		SURPLUS
12	Sukau	19.590	488.515.159	97.703.032	17.395.477.356		SURPLUS
13	Sumber Jaya	19.835	493.885.812	98.777.162	4.465.017.597		SURPLUS
14	Suoh	12.904	392.100.784	60.420.157	39.080.684.980		SURPLUS
15	Way Tenong	30.099	768.663.138	93.732.628	9.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		236.111	6.197.623.059	1.080.524.611	206.360.825.536	213.639.209.317	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

2. Status Daya Dukung Air (Proyeksi Kebutuhan Air)

Berdasarkan perhitungan dari Tabel 3.9 ketersediaan dan kebutuhan air maka dalam perhitungan tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029 maka status daya dukung air di Kabupaten Lampung Barat berada pada kondisi Surplus, artinya masih memenuhi daya dukung air. Hal ini didasarkan pada perhitungan dengan membandingkan antara kebutuhan air minimum per orang dengan volume ketersediaan air Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, penentuan status daya dukung air berdasarkan rasio dapat ditentukan setelah diketahui besarnya ketersediaan air dan kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Kriteria status daya dukung lingkungan berbasis neraca air tidak cukup dinyatakan dengan Surplus atau relatif saja. Namun untuk menunjukkan besaran relative, perlu juga dinyatakan dengan nilai supply/demand. Supply menunjukkan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu berupa jumlah ketersediaan air dari volume curah hujan rerata kawasan, sedangkan demand menunjukkan jumlah kebutuhan air berdasarkan faktor penentu kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Proyeksi perhitungan kebutuhan air di Kabupaten

Lampung Barat dapat diukur melalui berbagai metode dan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor demografis, ekonomi, dan lingkungan.

Model pertumbuhan populasi salah satu perhitungan proyeksi kebutuhan air berdasarkan pertumbuhan populasi. Metode ini memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dan perubahan dalam pola konsumsi air per kapita. Rumus yang umum digunakan adalah: Kebutuhan Air Masa Depan=Populasi Proyeksi× Konsumsi Air Per Kapita.

Dengan melihat perbandingan tersebut untuk Kabupaten Lampung Barat, maka pada tahun 2021 didapat rasio ketersediaan dan kebutuhan air yaitu berada pada kondisi Surplus dan aman, begitu juga tahun 2029 memiliki status Surplus dan aman. Secara lengkap rasio daya dukung air per kecamatan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut dengan penggunaan proyeksi masing-masing kebutuhan air setiap tahunnya :

Tabel 2.5. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Air Hitam	17.406	271.688.565	54.337.613	1.533.304.896	266.558.354.318	SURPLUS
2	Balik Bukit	46.622	911.524.710	182.305.742	4.810.421.236		SURPLUS
3	Bandar Negeri Suoh	32.041	592.207.950	118.442.390	64.812.868.903		SURPLUS
4	Batu Brak	19.727	322.526.487	64.506.097	15.010.932.634		SURPLUS
5	Batu Ketulis	18.981	306.183.910	61.237.582	9.992.349.789		SURPLUS
6	Belalau	15.463	272.931.572	54.587.114	23.905.234.831		SURPLUS
7	Gedung Surian	21.624	364.070.738	72.814.948	21.286.832.337		SURPLUS
8	Kabun Tebu	26.613	473.327.137	94.666.227	33.978.545.386		SURPLUS
9	Lumbok Seminung	12.834	171.571.020	34.315.004	13.849.820.615		SURPLUS
10	Pagar Dewa	23.131	397.067.725	79.414.345	10.444.006.435		SURPLUS
11	Sekincau	24.241	421.369.352	84.274.670	14.086.864.184		SURPLUS
12	Sukau	29.590	538.516.159	107.704.032	27.395.477.356		SURPLUS
13	Sumber Jaya	29.835	543.886.812	108.778.162	9.965.017.597		SURPLUS
14	Suoh	22.904	392.101.784	78.421.157	49.080.684.980		SURPLUS
15	Way Tenong	40.099	768.663.138	153.731.628	19.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		381.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.354.318	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.6. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	22.406	321.688.565	54.342.613	1.533.309.896	266.558.429.318	SURPLUS
2	Sukau	51.622	961.524.710	182.310.742	4.810.426.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	37.041	642.207.950	118.447.390	64.812.873.903		SURPLUS
4	Belalau	24.727	372.526.487	64.511.097	15.010.972.634		SURPLUS
5	Sekincau	23.981	356.183.910	61.242.582	9.992.399.789		SURPLUS
6	Suoh	20.463	322.931.572	54.592.114	23.905.284.831		SURPLUS
7	Batu Brak	26.624	414.070.738	72.819.948	21.286.882.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	31.613	523.327.137	94.671.227	33.978.595.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	17.834	221.571.020	34.320.004	13.849.870.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	28.131	447.067.725	79.419.345	10.444.011.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	29.241	471.369.352	84.279.670	14.086.869.184		SURPLUS
12	Way Tenong	34.590	588.516.159	107.709.032	27.395.482.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	34.835	593.886.812	108.781.162	9.965.022.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	27.904	442.101.784	78.426.157	49.080.734.980		SURPLUS
15	Air Hitam	45.099	818.663.138	153.736.628	19.808.514.357		SURPLUS
TOTAL		456.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.429.318	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.7. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2027

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	27.406	371.688.565	54.347.613	1.533.314.896	266.558.514.318	SURPLUS
2	Sukau	56.622	1.011.524.710	182.315.742	4.810.431.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	42.041	692.207.950	118.452.390	64.812.878.903		SURPLUS
4	Belalau	29.727	422.526.487	64.516.097	15.010.977.634		SURPLUS
5	Sekincau	28.981	406.183.910	61.247.582	99.923.104.789		SURPLUS
6	Suoh	25.463	372.931.572	54.597.114	23.905.289.831		SURPLUS
7	Batu Brak	31.624	464.070.738	72.824.948	21.286.887.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	36.613	573.327.137	94.676.227	339.785.105.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	22.834	271.571.020	34.325.004	13.849.920.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	43.131	497.067.725	79.424.345	10.444.061.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	34.241	521.369.352	84.284.670	14.086.874.184		SURPLUS
12	Way Tenong	39.590	638.516.159	107.714.032	27.395.487.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	39.835	643.886.812	108.786.162	9.965.027.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	32.904	492.101.784	78.431.157	49.080.739.980		SURPLUS
15	Air Hitam	50.099	868.663.138	153.741.628	19.808.519.357		SURPLUS
TOTAL		541.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.514.318	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.8. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2028

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Non-domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	32.406	421.688.565	54.352.613	1.533.320.896	266.558.589.318	SURPLUS
2	Sukau	61.622	1.511.524.710	182.320.742	4.810.436.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	47.041	74.692.207.950	118.457.390	64.812.883.903		SURPLUS
4	Belalau	34.727	472.526.487	64.521.097	15.010.982.634		SURPLUS
5	Sekincau	33.981	456.183.910	61.252.582	99.923.154.789		SURPLUS
6	Suoh	30.463	422.931.572	54.602.114	23.905.339.831		SURPLUS
7	Batu Brak	36.624	514.070.738	72.829.948	21.286.937.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	41.613	623.327.137	94.681.227	339.785.155.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	27.834	321.571.020	34.330.004	13.849.925.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	48.131	547.067.725	79.429.345	10.444.066.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	39.241	571.369.352	84.289.670	14.086.924.184		SURPLUS
12	Way Tenong	44.590	688.516.159	107.719.032	27.395.537.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	44.835	693.886.812	108.796.162	9.965.107.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	37.904	542.101.784	78.436.157	49.080.789.980		SURPLUS
15	Air Hitam	55.099	918.663.138	153.791.628	19.808.569.357		SURPLUS
TOTAL		616.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.589.318	SURPLUS

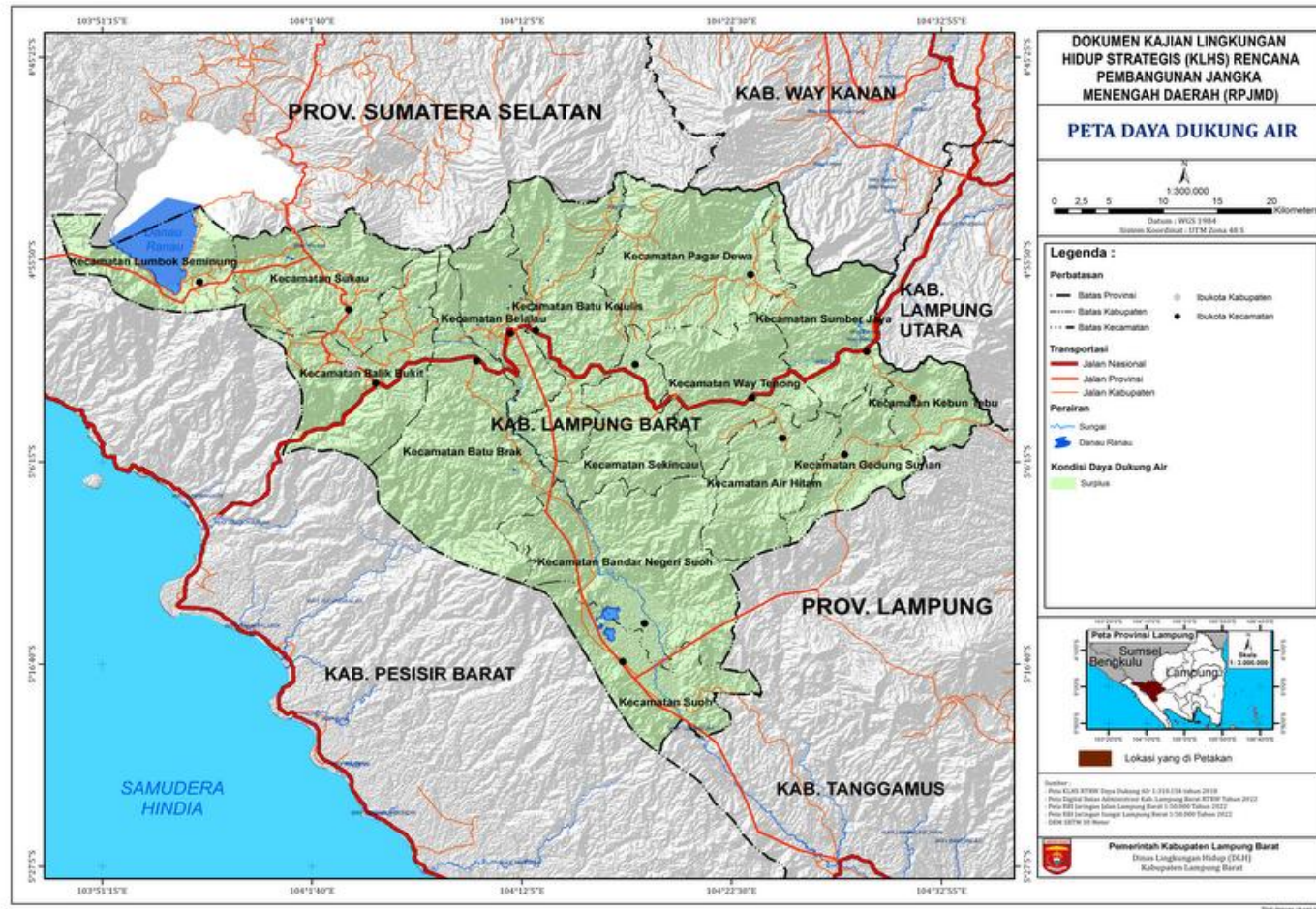
Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.9. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	36.406	471.688.565	54.357.613	1.533.335.896	266.561.858.318	SURPLUS
2	Sukau	66.622	2.011.524.710	182.325.742	4.810.441.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	52.041	79.692.207.950	118.462.390	64.812.933.903		SURPLUS
4	Belalau	39.727	522.526.487	64.526.097	15.011.032.634		SURPLUS
5	Sekincau	38.981	506.183.910	61.257.582	99.923.204.789		SURPLUS
6	Suoh	35.463	472.931.572	54.607.114	23.905.389.831		SURPLUS
7	Batu Brak	41.624	564.070.738	72.834.948	21.286.987.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	46.613	673.327.137	94.686.227	339.785.205.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	3.227.834	371.571.020	34.335.004	13.849.930.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	53.131	597.067.725	79.434.345	10.444.071.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	44.241	621.369.352	84.294.670	14.086.974.184		SURPLUS
12	Way Tenong	49.590	738.516.159	107.724.032	27.395.587.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	49.835	743.886.812	108.846.162	9.965.112.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	42.904	592.101.784	78.441.157	49.080.794.980		SURPLUS
15	Air Hitam	60.099	968.663.138	153.796.628	19.808.619.357		SURPLUS
TOTAL		3.885.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.561.858.318	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Gambar 2.4. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat



Sumber : KLHS RTRW Kab Lampung Barat 2021 dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

3. Analisis Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kapasitas lahan untuk mendukung aktivitas manusia, baik dari segi fisik, kimia, maupun biologis, tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Daya dukung lahan mencakup kemampuan lahan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup (seperti air, makanan, dan ruang), serta kemampuan untuk menyerap dan mengurai limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Konsep daya dukung lahan penting dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

4. Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan Kabupaten Lampung Barat ditentukan berdasarkan jumlah atau persentase luasan lahan potensial, kendala atau limitasi yang ada. Dari hasil analisis yang telah dilakukan daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Barat di dominasi oleh lahan potensi sebesar 30% secara keseluruhan, hasil analisis daya dukung lahan yang ditunjukkan pada Tabel 3.17 dibawah ini:

Tabel 2.10. Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan		
		Limit	Kendala	Potensi
1.	Air Hitam	6.130,75	764,23	3.917,42
2.	Balik Bukit	6.069,81	3.969,79	5.827,02
3.	Bandar Negeri Suoh	20.496,28	1.988,42	4.110,41
4.	Batu Brak	10.103,89	7.263,61	2.469,21
5.	Batu Ketulis	4.029,21	7.115,39	8.169,83
6.	Belalau	2.075,84	5.238,63	2.072,34
7.	Gedung Surian	3.439,49	521,08	3.686,79
8.	Kebun Tebu	3.485,06		2.483,85
9.	Lumbok Seminung	3.207,61	1.989,76	4.536,42
10.	Pagar Dewa	9.795,43	3.261,57	7.317,04
11.	Sekincau	6.112,86	764,32	4.631,33
12.	Sukau	4.490,98	7.486,33	2.618,93
13.	Sumber Jaya	8.614,18	1.396,56	2.758,41
14.	Suoh	10.937,44	1.069,27	2.818,00
15.	Way Tenong	5.328,21	2.265,03	5.376,16
	Total	104.317,05	45.093,98	62.793,16

Sumber : KLHS RTRW 2021

5. Analisis Daya Tampung Lahan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas tentang daya dukung lahan yang sebelumnya telah dilakukan maka dapat menjadikan dasar perhitungan proyeksi daya tampung lahan di Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2041. Kapasitas lahan yang dimaksudkan adalah kapasitas untuk menampung kegiatan perkotaan terdiri dari lahan potensial dan

lahan kendala perkecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini disebut juga sebagai ketersediaan lahan (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu menggunakan sistem proyeksi kebutuhan pada 20 tahun kedepan sebagai demand atau permintaan dari lahan (DL). Berdasarkan penetapan standarisasi nasional oleh Dirjen Cipta Karya kebutuhan lahan per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m², maka hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio perbandingan SL/DL. Hasil analisis diperoleh $0,8 < 1$, hal ini artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. Berikut daya tampung lahan yang ada di kawasan Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel-Tabel dibawah ini:

Tabel 2.11. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	42.566	130,94	38,31	3,42	SURPLUS
2.	Sukau	25.536	1092,03	22,98	47,52	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	8.153	299,68	7,34	40,84	SURPLUS
4.	Belalau	12.500	440,95	11,25	39,19	SURPLUS
5.	Sekincau	19.447	124,55	17,50	7,12	SURPLUS
6.	Suoh	17.312	380,26	15,58	24,41	SURPLUS
7.	Batu Brak	15.197	262,36	13,68	19,18	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	17.751	306,04	15,98	19,16	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	13.749	91,06	12,37	7,36	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	27.798	774,01	25,02	30,94	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	25.078	211,89	22,57	9,39	SURPLUS
12.	Way Tenong	35.547	675,67	31,99	21,12	SURPLUS
13.	Gedung Surian	17.026	287,28	15,32	18,75	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	21.742	196,40	19,57	10,04	SURPLUS
15.	Air hitam	12.410	422,98	11,17	37,87	SURPLUS
	Total	311.811	311.811	280,63	20,30	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

**Tabel 2.12. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026**

No	Kecamatan	Tahun 2026			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	47.618	130,94	42,86	3,06	SURPLUS
2.	Sukau	30.839	1092,03	27,76	39,35	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	9.950	299,68	8,96	33,46	SURPLUS
4.	Belalau	12.692	440,95	11,42	38,60	SURPLUS
5.	Sekincau	20.513	124,55	18,46	6,75	SURPLUS
6.	Suoh	14.631	380,26	13,17	28,88	SURPLUS
7.	Batu Brak	17.777	262,36	16,00	16,40	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	15.969	306,04	14,37	21,29	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	12.644	91,06	11,38	8,00	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	31.912	774,01	28,72	26,95	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	26.328	211,89	23,69	8,94	SURPLUS
12.	Way Tenong	37.877	675,67	34,09	19,82	SURPLUS
13.	Gedung Surian	19.187	287,28	17,27	16,64	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	22.395	196,40	20,16	9,74	SURPLUS
15.	Air hitam	12.431	422,98	11,19	37,81	SURPLUS
	Total	332.763	332.763	299,49	19,02	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

**Tabel 2.13. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2027**

No	Kecamatan	Tahun 2027			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	53.268	130,94	47,94	2,73	SURPLUS
2.	Sukau	37.244	1092,03	33,52	32,58	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	12.144	299,68	10,93	27,42	SURPLUS
4.	Belalau	12.886	440,95	11,60	38,02	SURPLUS
5.	Sekincau	21.638	124,55	19,47	6,40	SURPLUS
6.	Suoh	12.365	380,26	11,13	34,17	SURPLUS
7.	Batu Brak	20.797	262,36	18,72	14,02	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	14.366	306,04	12,93	23,67	SURPLUS

No	Kecamatan	Tahun 2027			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
9.	Batu Ketulis	11.628	91,06	10,46	8,70	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	36.634	774,01	32,97	23,48	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	27.640	211,89	24,88	8,52	SURPLUS
12.	Way Tenong	40.358	675,67	36,32	18,60	SURPLUS
13.	Gedung Surian	21.622	287,28	19,46	14,76	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	23.069	196,40	20,76	9,46	SURPLUS
15.	Air hitam	12.453	422,98	11,21	37,74	SURPLUS
	Total	358.111	358.111	322,30	17,67	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.14. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2028

No	Kecamatan	Tahun 2028			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	59590	130,94	53,63	2,44	SURPLUS
2.	Sukau	44979	1092,03	40,48	26,98	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	14821	299,68	13,34	22,47	SURPLUS
4.	Belalau	13083	440,95	11,77	37,45	SURPLUS
5.	Sekincau	22824	124,55	20,54	6,06	SURPLUS
6.	Suoh	10450	380,26	9,41	40,43	SURPLUS
7.	Batu Brak	24329	262,36	21,90	11,98	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	12924	306,04	11,63	26,31	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	10693	91,06	9,62	9,46	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	42055	774,01	37,85	20,45	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	29017	211,89	26,12	8,11	SURPLUS
12.	Way Tenong	43003	675,67	38,70	17,46	SURPLUS
13.	Gedung Surian	24367	287,28	21,93	13,10	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	23763	196,40	21,39	9,18	SURPLUS
15.	Air hitam	12474	422,98	11,23	37,68	SURPLUS
	Total	388372	5696,10	349,53	16,30	SURPLUS

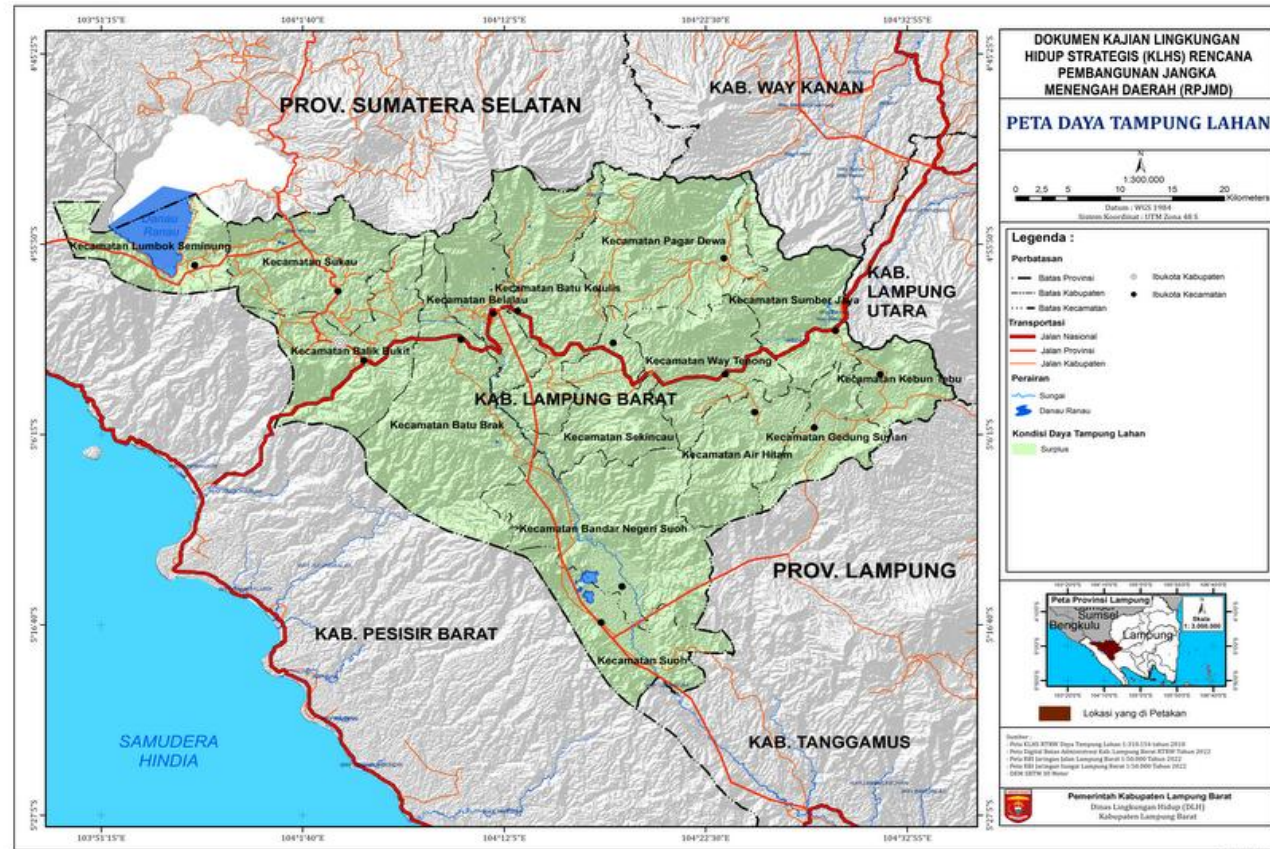
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja RTRW Kabupaten Lampung Barat, 2021

**Tabel 2.15. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2029**

No	Kecamatan	Tahun 2029			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	66662	130,94	60,00	2,18	SURPLUS
2.	Sukau	54320	1092,03	48,89	22,34	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	18089	299,68	16,28	18,41	SURPLUS
4.	Belalau	13283	440,95	11,95	36,89	SURPLUS
5.	Sekincau	24076	124,55	21,67	5,75	SURPLUS
6.	Suoh	8832	380,26	7,95	47,84	SURPLUS
7.	Batu Brak	2022	262,36	1,82	144,17	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	11626	306,04	10,46	29,25	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	9834	91,06	8,85	10,29	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	48279	774,01	43,45	17,81	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	30463	211,89	27,42	7,73	SURPLUS
12.	Way Tenong	45821	675,67	41,24	16,38	SURPLUS
13.	Gedung Surian	27459	287,28	24,71	11,62	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	24478	196,40	22,03	8,92	SURPLUS
15.	Air hitam	12495	422,98	11,25	37,61	SURPLUS
	Total	397739	5696,10	357,96	15,91	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Gambar 2.5. Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat



Sumber : KLHS RTRW Kab Lampung Barat 2021, Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

6. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman perhitungan daya dukung dan daya tampung (KLH, 2014), daya dukung fungsi lindung dapat diidentifikasi dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah keseluruhan. Adapun klasifikasi daya dukung fungsi lindung yang menjadi pedoman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16. Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

No.	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
1.	Sangat Rendah	0,0 - 0,2
2.	Rendah	0,2 - 0,4
3.	Sedang	0,4 - 0,6
4.	Baik	0,6 - 0,8
5.	Sangat Baik	0,8 - 1,0

Sumber : Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014

Tabel di atas dapat digunakan sebagai pedoman penentuan nilai kualitas daya dukung fungsi lindung. Sehingga dapat dilakukannya analisis daya dukung fungsi lindung kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan sebagai berikut :

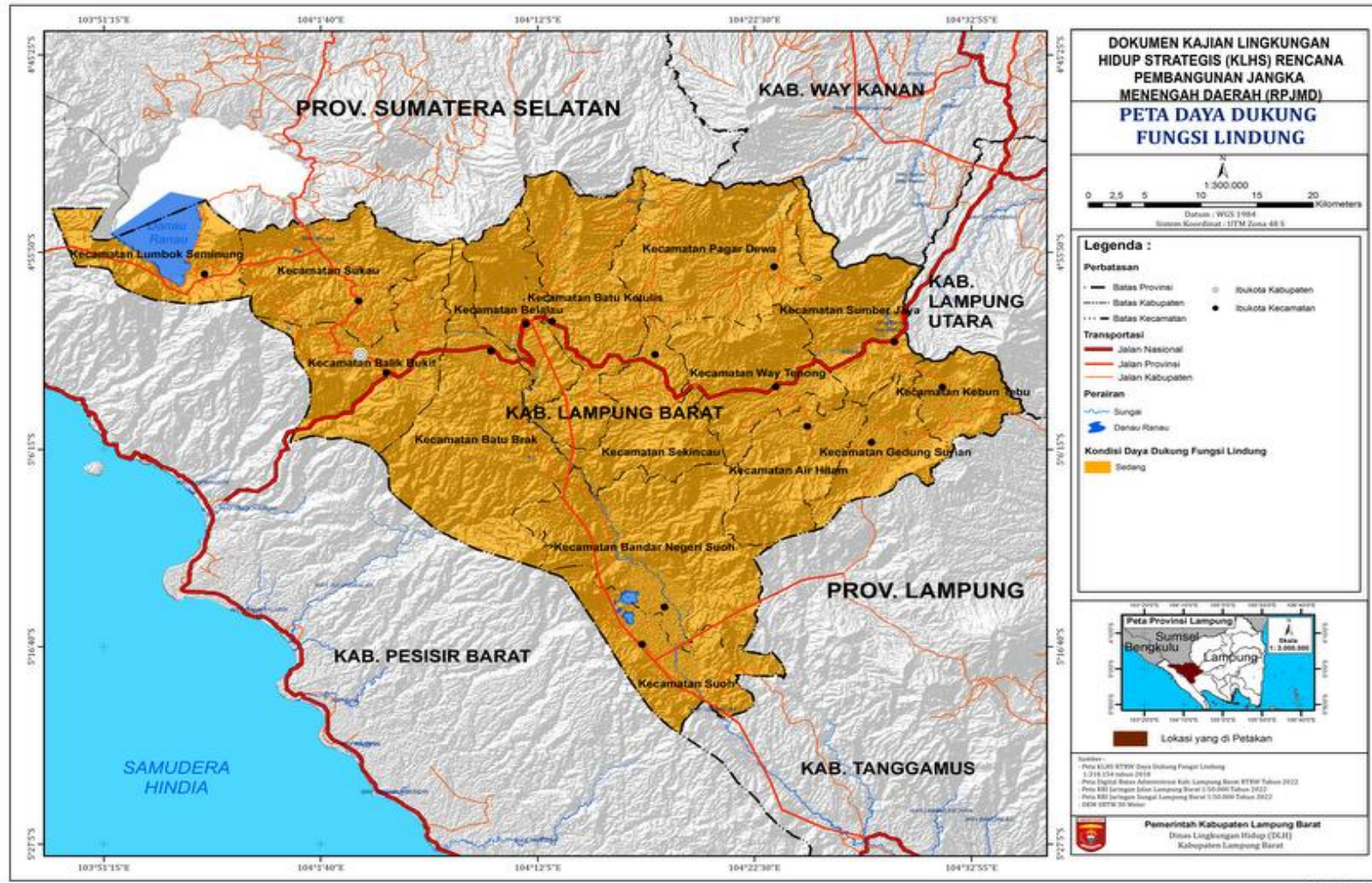
Tabel 2.17. Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung
Kabupaten Lampung Barat

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Koef x Luas
1.	Danau	3.094,58	0,98	3.032,69
2.	Hutan Rimba	39.851,51	1	3.9851,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	97,16	0,01	0,97
5.	Perkebunan/Ke bun	121.866,32	0,54	6.5807,81
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	484,35	0,46	222,80
8.	Sawah	11.293,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.326,92	0,28	7.091,54
10.	Sungai	456,98	0,98	447,84
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,98	0,01	0,23
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	210,799,00	-	123.488,89

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lampung Barat, 2021.

Berdasarkan Tabel di atas Daya Dukung Fungsi Lindung = $123.488,89/210.799,00 = 0,58$. Dari hasil perhitungan tersebut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Lampung Barat berada dalam kelas sedang. Mengingat Kabupaten Lampung Barat sebagai kawasan konservasi, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Barat perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan indeks tutupan lahan menjadi lebih hijau, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.6. Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Barat

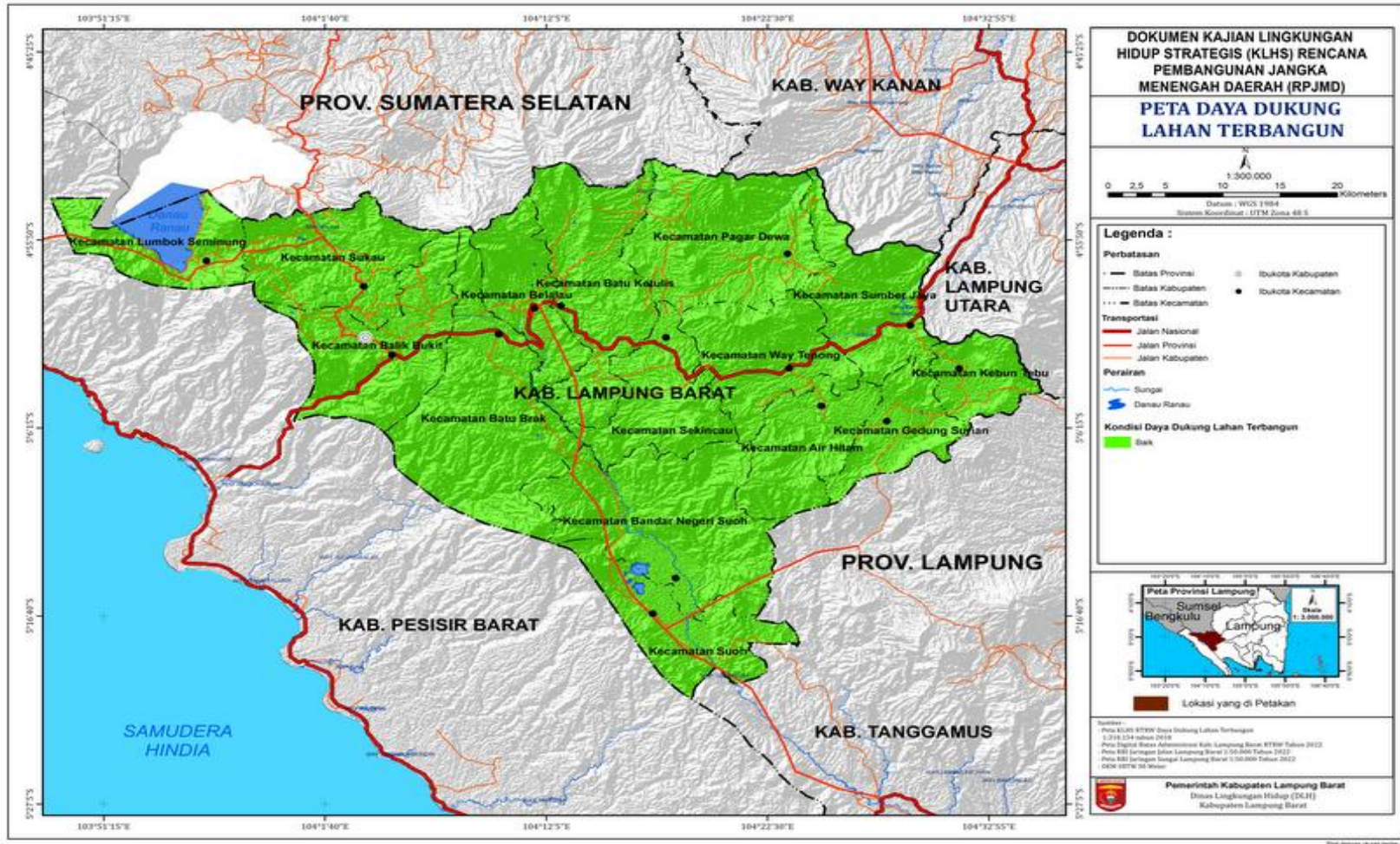


Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

7. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun adalah kapasitas atau kemampuan suatu area yang telah dikembangkan untuk menopang atau menahan beban penggunaan lahan yang telah ada. Ini mencakup kemampuan infrastruktur yang ada, seperti jalan, bangunan, fasilitas publik, dan layanan, untuk mendukung aktivitas manusia serta menjaga fungsi dan kegunaan lahan yang sudah ada. Daya dukung lahan terbangun penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan perkotaan dan pengembangan wilayah, karena hal ini memengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan publik, kepadatan populasi, mobilitas, dan kualitas lingkungan di wilayah tersebut. Daya dukung lahan pada bangunan dapat diketahui dari perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 30% lahan perkotaan wajib digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung). Lahan terbangun di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan tutupan lahannya terdiri dari lahan terbangun dan pemukiman dengan total luas 3.097,2 Ha. Koefisien luas lahan terbangun yang digunakan adalah 60% (rata-rata koefisien perdesaan dan perkotaan) maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung setelah dilakukan perhitungan adalah 41,009 yaang berarti bahwa daya dukung lahan terbangun dapat dikategorikan baik yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.7. Peta Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Lampung Barat



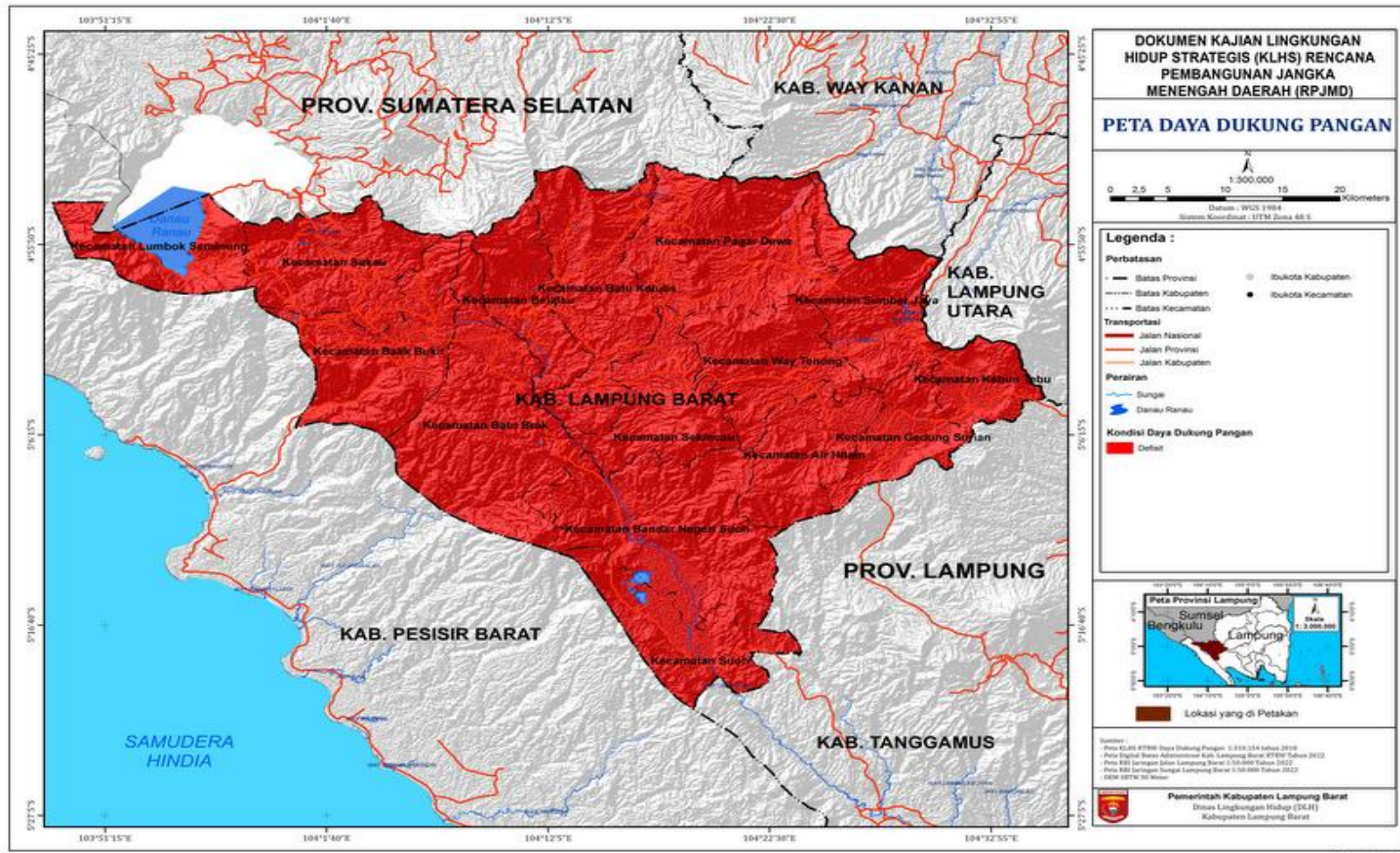
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

8. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merujuk pada kapasitas suatu wilayah untuk menyediakan dan menopang kebutuhan pangan bagi populasi yang tinggal di dalamnya. Ini mencakup sejumlah faktor, termasuk produktivitas pertanian, ketersediaan lahan yang cocok untuk pertanian, akses terhadap air, kondisi iklim, infrastruktur, teknologi pertanian, dan faktor sosial-ekonomi seperti distribusi pendapatan dan keamanan pangan. Evaluasi daya dukung pangan seringkali melibatkan analisis terhadap kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi pangan dengan cara yang berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan bagi penduduknya, serta mengakomodasi pertumbuhan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi pangan. Ini merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pertanian, serta dalam upaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat. Perhitungan daya dukung pangan menggunakan metode *Carrying Capacity Ratio* (CCR).

Analisis CCR merupakan salah satu alat analisis dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, *Carrying Capacity Ratio* Tanaman Pangan sebesar 0,88. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Lampung Barat sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Tersaji peta daya dukung pangan pada gambar berikut:

Gambar 2.8. Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Barat



Sumber : KLHS RTRW Lampung Barat 2021, Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 2.18. Indeks Ketahanan Pangan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Ketahanan Pangan	74,02%	70,80%	74,34%	75,39%	76,18%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan berada di angka 74,02%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 70,80%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan distribusi pangan, dampak pandemi, atau perubahan dalam kebijakan pangan yang berpengaruh terhadap ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, indeks ini kembali meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, Indeks Ketahanan Pangan naik menjadi 74,34%, melebihi angka tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dalam sektor pangan, yang bisa jadi disebabkan oleh perbaikan dalam sistem distribusi, peningkatan produksi pangan, atau kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan.

Pada tahun 2023, indeks ini terus meningkat menjadi 75,39%, menunjukkan tren positif dalam penguatan ketahanan pangan. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti inovasi dalam teknologi pertanian, peningkatan produksi pangan lokal, serta stabilitas dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap sektor pangan.

Tahun 2024 mencatat peningkatan lebih lanjut dengan Indeks Ketahanan Pangan mencapai 76,18%. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam periode lima tahun tersebut, mencerminkan keberhasilan dalam berbagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Jika tren ini terus berlanjut, maka kondisi pangan daerah dapat semakin stabil dan berkelanjutan di masa mendatang. Namun, tetap perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan agar dapat menghadapi potensi tantangan di masa depan, seperti perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Tabel 2.19. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	%	8.34	8.49	10.21	8.53	8.27
Provinsi Lampung	%	12.19	10.25	14.63	8.81	10.68
Kabupaten Lampung Barat	%	10.98	8.63	12.82	8.5	11.17

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Data prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi berada pada angka 10,98%, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 8,63% pada 2021. Namun, angka ini kembali meningkat tajam menjadi 12,82% pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap ketahanan pangan masyarakat, kemungkinan akibat dampak lanjutan pandemi atau faktor ekonomi lainnya. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan penurunan menjadi 8,5%, tetapi tren tersebut tidak berlanjut karena pada tahun 2024 prevalensi kembali naik menjadi 11,17%. Ketidakstabilan ini mencerminkan pentingnya penguatan intervensi yang konsisten dan berkelanjutan dalam sistem ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan di masyarakat.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Tabel 2.20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94	65.99	68.31	70.55	73.09
2	IKA		65.14	58.34	66.06	69
3	IKU		84.73	83.84	90.52	93.52
4	IKL		40.42	41.63	40.33	42.32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada di angka 71,94. Namun, pada tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan signifikan menjadi 65,99. Setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2021, indeks mulai mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, indeks meningkat menjadi 68,31, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, penerapan kebijakan

yang lebih ketat, serta program rehabilitasi lingkungan bisa menjadi faktor yang mendukung pemulihan ini.

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terus mengalami peningkatan menjadi 70,55. Tren positif ini mencerminkan keberlanjutan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan ruang hijau, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor.

Pada tahun 2024, indeks mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 73,09. Peningkatan ini bisa menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan lingkungan mulai menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Keberlanjutan tren positif ini perlu dijaga dengan terus meningkatkan kesadaran lingkungan, memperketat regulasi terkait pencemaran, serta memperkuat program restorasi ekosistem agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan terus membaik di masa depan.

Tabel 2.21. Kinerja Pengelolaan Persampahan dan GRK

No	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	5.316,58	4.837,46	4.215,88	15.467,26	15.034,04
2	Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1.214	1.228	1.240	1.252	1.265
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) hal tersebut disebabkan oleh pengurangan jumlah kategori tutupan lahan. Pada tahun 2022- 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan.

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada Tahun 2020 Sampai dengan 2024 Jumlah Sampah terkelola di fasilitas

Pengelolaan Sampah baru terkelola dari 11 % sampai 34% dilaporkan di Neraca Pengelolaan sampah setiap tahun.

Jumlah Rumah Tangga terlayani skala kabupaten Lampung Barat dari 15 Kecamatan Rumah Tangga Terlayani 1 Kecamatan yaitu Skala Kota Liwa.

Data Penurunan Intesitas Emisi GRK tidak ada dikarenakan Dinas Lingkungan belum melakukan pelaporan penurunan intensitas emisi GRK hingga tahun 2024.

Tabel 2.22. Data TPA dan TPST

No	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	TPA	35,49 Ton/Hari	35,85 Ton/Hari	36,20 Ton/Hari	36,57 Ton/Hari	36,93 Ton/Hari
2	TPST Regional	0,672 Ton/Hari	0,678 Ton/Hari	0,685 Ton/Hari	0,692 Ton/Hari	0,699 Ton/Hari

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Tabel 2.23. Akses Sanitasi

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Sanitasi Aman	0,35%
2	Sanitasi Layak	95,75%
3	Sanitasi Belum Layak	3,90%

Sumber : Dinas PU PR tahun 2025

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana, sehingga perlu melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana. Salah satu yang dapat dilakukan sebagai upaya penanganan bencana dengan melakukan perencanaan penanggulangan yang dimulai dengan menyusun rencana penanggulangan bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana berdasar pada Kajian Risiko Bencana agar mendapatkan hasil yang lebih fokus dan terarah. Penentuan tingkat risiko bencana dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) dilakukan dengan menganalisis tiga komponen yaitu potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Potensi bahaya menunjukkan jenis-jenis bahaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat baik yang pernah terjadi maupun berpeluang akan terjadi. Kerentanan wilayah menunjukkan potensi kehilangan dan/atau kerugian yang akan dialami jika bahaya terjadi seperti jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Komponen ketiga yaitu kapasitas daerah menunjukkan kemampuan lembaga pemerintah dan kesiapan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dalam kaitannya dengan upaya pengurangan dan penanggulangan risiko bencana. Hasil pengkajian Risiko Bencana disajikan dalam bentuk dokumen kajian yang dilengkapi lampiran terpisah

yaitu Album Peta Risiko Bencana dan Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lampung Barat. Kajian Risiko Bencana disusun melalui pendekatan dan metodologi standar mengikuti pedoman yang tertera pada PERKA BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum PengKajian Risiko Bencana. Melalui Kajian Risiko Bencana besarnya risiko masing-masing bahaya di Kabupaten Lampung Barat dapat diketahui. Mengacu pada hasil analisis, diketahui 8 (delapan) jenis potensi bahaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan gunung api. Delapan bahaya tersebut dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga menghasilkan risiko. Hasil analisis risiko yang dilakukan menunjukkan, sebagian besar bahaya memiliki risiko Tinggi. Pengambilan kelas risiko di tingkat kecamatan didasarkan pada kelas risiko tertinggi di tingkat desa. Kelas risiko tinggi di kecamatan tidak menunjukkan bahwa seluruh kecamatan berisiko tinggi melainkan terdapat minimal satu desa yang berisiko tinggi di kecamatan tersebut. Berikut deskripsi singkat risiko bencana tinggi di Kabupaten Lampung Barat.

1. Risiko Banjir, Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan yang memiliki risiko bencana banjir. Adapun 3 kecamatan yang memiliki risiko bencana banjir tertinggi yaitu Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh, dan Kebun Tebu. Analisis luasan pekon yang memiliki potensi risiko terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Bandar Agung (896,67 ha), Pekon Srimulyo (696,51 ha), dan Pekon Gunung Ratu (609,30 ha). Kecamatan ini memiliki kelas risiko sedang dengan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya yaitu Kecamatan Suoh dengan luasan terbesar yaitu Pekon Sumber Agung (400,05 ha), dan Pekon Tugu Ratu (359,19ha). Kecamatan yang memiliki luasan terbesar lainnya yaitu Kecamatan Kebun Tebu. Pada kecamatan ini, pekon yang memiliki luasan terbesar yaitu Pekon Muara Jaya II (327,87ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Kebun Tebu termasuk dalam kelas sedang, dengan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Sehingga dihasilkan potensi risiko tiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat memiliki kelas sedang. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat memiliki kemungkinan terjadinya bencana banjir sehingga perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan darurat untuk mengurangi dampak buruk banjir tersebut.

2. Risiko Banjir Bandang, analisis potensi risiko terbesar pada bencana banjir bandang terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Belalau. Pekon yang memiliki potensi terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Suoh (321,14ha), Pekon Bumi Hantatai (320,87 ha), dan Pekon Ringin Jaya (199,87 ha). Kemudian pekon yang memiliki risiko potensi bahaya banjir bandang pada Kecamatan Belalau yaitu Pekon Hujung (354,63 ha) dan Pekon Suka Makmur (251,43 ha). Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki kelas

bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, kelas kapasitas sedang, dan kelas risiko sedang. Walaupun kecamatan tersebut memiliki kelas risiko sedang, namun tetap memiliki kemungkinan terjadinya bencana banjir bandang. Sehingga perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan darurat untuk mengurangi dampak buruk banjir bandang tersebut. Sehingga, Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan Peningkatan koordinasi multisektoral terkait penanganan Konservasi lahan dan air pada hulu DAS, Program pembersihan sungai darisampah ataupun pengendapan lumpur yang menyebabkan penyempitan alur sungai, serta penguatan aturan tentang perubahan penggunaan lahan berdasarkan fungsi lahannya.

3. Risiko Cuaca Ekstrem, kelas risiko cuaca ekstrem di Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam kelas tinggi. Kecamatan dengan potensi luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh pada kategori kelas tinggi dengan luasan total sebesar 37.167,86 ha. Pekon-pekong pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang terbesar yaitu Pekon Bumi Hantatai (17.667,64 ha), Pekon Bandar Agung (6.980,18 ha), dan Pekon Suoh (5.018,15 ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas rendah. Sehingga dihasilkan kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh pada kelas tinggi. Pekon-pekong yang terdapat pada kecamatan tersebut memiliki potensi terjadinya bencana cuaca ekstrem. Sehingga perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan darurat untuk mengurangi dampak buruk cuaca ekstrem tersebut. Cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat berupa angin kencang, Dampak dari bencana ini dapat merusak lahan pertanian warga sekitar. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu penyusunan standar struktur bangunan yang dapat menahan angin di wilayah rawan angin kencang dan peningkatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana angin kencang.

4. Risiko Gempa Bumi, kelas risiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam kelas tinggi. Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luasan total sebesar 37.698,12 ha dan Kecamatan Pagar Dewa dengan luasan total 21.296,92 ha. Analisis luasan Pekon terbesar untuk potensi risiko gempa bumi pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Bumi Hantatai (17.725,48ha), Pekon Bandar Agung (7.088,25 ha) dan Pekon Suoh (5.137,05 ha). Kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh tergolong tinggi, hal tersebut dikarenakan memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Selanjutnya analisis pekon terbesar terdapat pada Kecamatan Pagar Dewa yaitu terdapat pada Pekon Basungan (3.969,50 ha), Sidomulyo (3.580,48 ha), dan Batu Api (2.680,34 ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Pagar Dewa termasuk dalam kelas risiko sedang, dikarenakan memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat masih memiliki potensi terdampak

oleh gempa bumi, karena konsekuensi dari bencana gempa bumi yang dapat merambah keseluruhan bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi.

5. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan, di Kabupaten Lampung Barat Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pagar Dewa, dan Batu Ketulis. Analisis berdasarkan luasan pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Bumi Hantatai (17.721,72 ha), Pekon Bandar Agung (6.989,76 ha), Pekon Suoh (5.027,04 ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas risiko kebakaran hutan dan lahan kelas tinggi. Hal tersebut dikarenakan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Pagar Dewa terdapat pada Pekon Basungan (3.952,35 ha) dan Pekon Sidomulyo (3.573,45 ha). Kelas risiko kebakaran hutan dan lahan pada Kecamatan Pagar Dewa memiliki kelas sedang, hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis untuk luasan pekon terbesar pada Kecamatan Batu Ketulis terdapat pada Pekon Bakhu (3.487,41 ha) dan Pekon Sumber Rejo (3.116,07 ha). Pada Kecamatan Batu Ketulis memiliki kelas risiko tinggi dikarenakan pada wilayah ini memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas rendah. Sehingga, seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan, karena konsekuensi dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat merambah ke seluruh bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi. Data ini memberikan gambaran tentang keparahan risiko kebakaran hutan dan lahan di setiap kecamatan, dengan fokus pada Pekon-Pekon yang memiliki luas risiko tertinggi. Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan risiko perlu ditingkatkan, terutama di Pekon-Pekon yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

6. Risiko Kekeringan, hasil analisis risiko luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luasan sebesar 38.034,10 ha, Kecamatan Pagar Dewa dengan luasan total sebesar 18.770,05 ha dan Kecamatan Balik Bukit dengan luasan total risiko kekeringan sebesar 17.695,05 ha. Analisis luasan pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdapat pada Pekon Bumi Hantatai (17.888,05 ha), Pekon Bandar Agung (7.153,02 ha) dan Pekon Suoh (5.176,01 ha). Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas risiko sedang, hal tersebut dikarenakan pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya sedang, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Pagar Dewa terdapat pada Pekon

Basungan (4.022,01 ha) dan Pekon Sidomulyo (3.594,01 ha). Kecamatan Pagar Dewa memiliki kelas risiko sedang dikarenakan, pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya sedang, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis luasan pekon terbesar selanjutnya pada Kecamatan Balik Bukit yaitu pada Pekon Kubu Perahu (4.974.01 ha). Kecamatan ini memiliki kelas risiko tinggi, dikarenakan memiliki kelas bahaya sedang, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Kekeringan dapat menyebabkan dampak serius terhadap sumber daya air, pertanian, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mengatasi risiko tersebut, perlu dilakukan upaya mitigasi seperti pengembangan sumber daya air alternatif, peningkatan efisiensi penggunaan air pertanian, dan pembangunan infrastruktur penampungan air hujan dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi kekeringan yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian dan ekonomi dan kerusakan lingkungan.

7. Risiko Tanah Longsor, kecamatan yang memiliki luas risiko bencana tanah longsorterbesar yaitu Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas sebesar 35.825,20 ha, Kecamatan Pagar Dewa dengan luas sebesar 22.354,85 ha, dan Kecamatan Batu Ketulis dengan luas sebesar 15.804,70 ha. Analisis luasan pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdapat pada Pekon Bumi Hantatai (17.156,62 ha), Pekon Bandar Agung (6.730,76 ha) dan Pekon Suoh (4.886,54 ha). Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas risiko tinggi, hal tersebut dikarenakan pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas rendah. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Pagar Dewa terdapat pada Pekon Basungan (3.784,33 ha) dan Pekon Sidomulyo (3.490,86 ha). Kecamatan Pagar Dewa memiliki kelas risiko tinggi dikarenakan pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Meskipun demikian, seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat masih memiliki potensi terdampak oleh tanah longsor, karena konsekuensi dari bencana tanah longsor yang dapat merambah ke seluruh bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi tanah longsor yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi.

8. Risiko Gunung Api, di Kabupaten Lampung Barat Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Sekincau dengan luas sebesar 3.135,50 ha dan Bandar Negeri Suoh dengan luas sebesar 2.175,80 ha. Analisis berdasarkan luasan pekon terbesar pada Kecamatan Sekincau yaitu Pekon Tigajaya dengan luas sebesar 3.010,37 ha. Analisis kelas risiko pada Kecamatan Sekincau memiliki potensi kelas risiko gunung api pada kelas tinggi. Hal tersebut dikarenakan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan sedang, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdapat

pada Pekon Pekon Suoh dengan luas sebesar 1.665,88 ha. Kelas risiko gunung api pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas rendah, hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut memiliki kelas bahaya rendah, kelas kerentanan sedang, dan kelas kapasitas rendah. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi terdampak oleh gunung api, karena konsekuensi dari bencana gunungapi yang dapat merambah ke seluruh bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi gunung api yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi.

Ketahanan daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,39 yang berarti kapasitas daerah pada kelas sedang.

Tabel 2.24. Indeks Kapasitas daerah di Kabupaten Lampung Barat

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,64	0,39	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,20		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,50		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,46		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,33		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,35		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,42		

Sumber : dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2024

Secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas rendah dengan Nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,39. Dalam penentuan tingkat kapasitas, indeks ketahanan daerah mengalami penyesuaian atau transformasi. Hasil transformasi nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar 0,39. Hasil transformasi nilai IKD tersebut selanjutnya digunakan secara langsung pada proses penggabungan secara spasial antara IKD dengan IKM, tanpa perlu membuat data spasialnya terlebih dahulu. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan pencapaian daerah dalam penanggulangan bencana. Pada dasarnya

upaya penanggulangan bencana telah mulai dilakukan di Kabupaten Lampung Barat untuk 8 (delapan) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Lampung Barat.

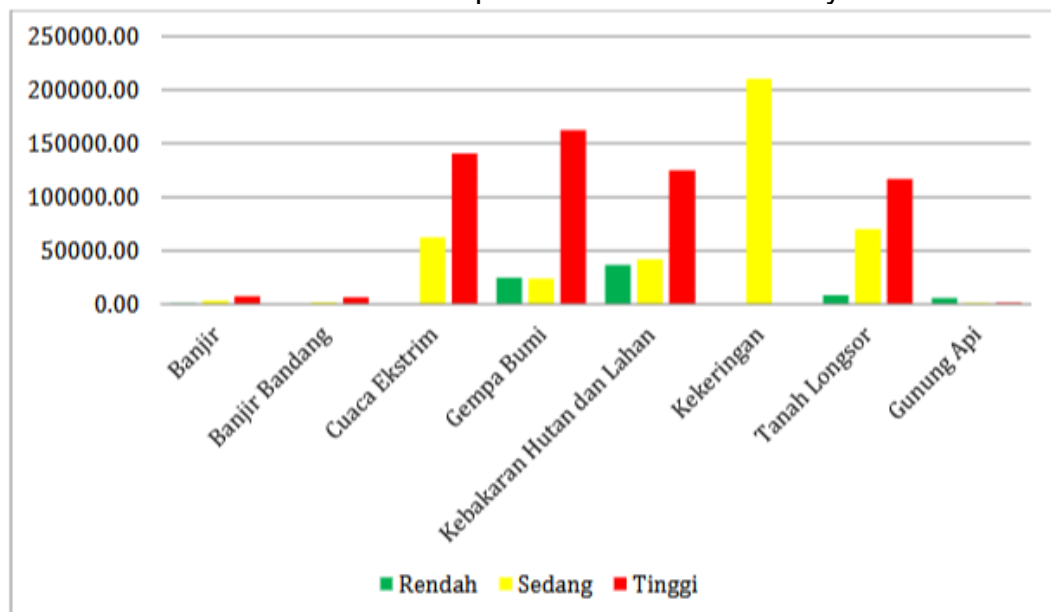
Tabel 2.25. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	Bahaya (ha)				
		Luas Bahaya			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	452,88	3.426,57	6.938,19	10.817,64	Tinggi
2	Banjir Bandang	0,00	1.606,68	6.213,51	7.820,19	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	0,00	62.341,56	140.883,57	203.225,13	Tinggi
4	Gempa Bumi	24.381,04	23.991,05	162.426,91	210.799,00	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	36.690,63	42.013,53	124.812,62	203.516,78	Tinggi
6	Kekeringan	0,00	210.799,00	0,00	210.799,00	Sedang
7	Tanah Longsor	8.467,02	70.285,86	116.844,66	195.597,54	Tinggi
8	Gunung Api	5.726,88	1.414,52	1.291,32	8.432,72	Tinggi

Sumber : dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas bahaya yang tergolong Tinggi. Sedangkan untuk bahaya kekeringan berada pada kelas bahaya yang tergolong sedang. Rekapitulasi tiap bahaya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 2.9. Rekapitulasi Luas Kelas Bahaya



Sumber : dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2024

Rekapitulasi bahaya bencana Kabupaten Lampung Barat berada pada kelas tinggi. Data menunjukkan bahwa gempa bumi dan kekeringan memiliki kelas bahaya tinggi dan sedang dengan total luas mencapai 210.799,00 ha. Banjir memiliki luas bahaya tinggi sebesar 10.817,64 ha dengan kelas bahaya tinggi. Banjir bandang memiliki total luas sebesar 7.820,19 ha dengan kelas bahaya tinggi. Selanjutnya cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan memiliki luas masing-masing sebesar 203.225,13 ha dan 203.516,78 ha yang berada pada kelas bahaya tinggi. Tanah longsor dan gunung api juga berada dalam kategori kelas bahaya tinggi dengan luas masing-masing sebesar 195.597,54 ha dan 8.432,72 ha. Rekapitulasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai risiko bencana yang dihadapi Kabupaten Lampung Barat, dengan bahaya-bahaya yang berada pada kelas tinggi untuk menjadi fokus utama yang membutuhkan perhatian mitigasi dan penanganan lebih lanjut.

Indikator Resiko Bencana

Indikator untuk mengukur tingkat resiko bencana di suatu wilayah disajikan atau ditunjukkan dengan ukuran Indeks Resiko Bencana. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap 3 komponen, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kapasitas terdiri dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Berikut data indeks resiko bencana Kabupaten Lampung Barat tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.26. Indeks Risiko Bencana

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	179.29	163.85	178.48	176,61	176,28

Sumber : BPBD Tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Risiko Bencana tercatat sebesar 179,29. Angka ini menunjukkan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerentanan wilayah terhadap bencana alam, perubahan iklim, serta kesiapan infrastruktur dan mitigasi bencana yang masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan signifikan menjadi 163,85. Penurunan ini bisa diartikan sebagai peningkatan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana atau berkurangnya kejadian bencana besar dalam tahun tersebut. Langkah-langkah mitigasi seperti

pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat mungkin telah berkontribusi dalam menurunkan risiko bencana.

Namun, pada tahun 2022, Indeks Risiko Bencana kembali meningkat menjadi 178,48, hampir menyamai angka tahun 2020. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya frekuensi atau intensitas bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan. Selain itu, faktor seperti degradasi lingkungan dan urbanisasi yang kurang terkendali juga bisa meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana.

Pada tahun 2023, indeks sedikit menurun menjadi 176,61, menunjukkan adanya upaya mitigasi yang mulai berdampak meskipun belum terlalu signifikan. Penurunan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengurangi risiko bencana masih cukup besar, dan diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, indeks kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 176,28. Meskipun penurunannya kecil, angka ini menunjukkan stabilisasi risiko bencana di sekitar level yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat mitigasi bencana, meningkatkan ketahanan infrastruktur, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana agar risiko dapat terus ditekan di masa depan.

Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan perubahan iklim adalah konsep yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan ekosistem dapat berinteraksi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemanasan global. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah

dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.27. Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim

No	Kecamatan	IKA	IKS	Tingkat Kerentanan perubahan iklim
1.	Balik Bukit	6,6	6	Rentan
2.	Sukau	5,18	5,08	Rentan
3.	Lumbok Seminung	5,65	5,53	Rentan
4.	Belalau	3,96	5,78	Cukup Rentan
5.	Sekincau	2,73	2,69	Tidak Rentan
6.	Suoh	3,46	3,33	Cukup Rentan
7.	Batubrak	5,44	6,24	Rentan
8.	Pagardewa	4,72	5,46	Cukup Rentan
9.	Batuketulis	4,9	6,21	Cukup Rentan
10.	Bandar Negeri Suoh	4,98	5,71	Cukup Rentan
11.	Sumber Jaya	3,19	3,19	Tidak Rentan
12.	Way Tenong	4,46	4,3	Cukup Rentan
13.	Gedung Surian	2,55	2,54	Tidak Rentan
14.	Kebun tebu	5,47	5,26	Rentan
15.	Air Hitam	5,71	5,17	Rentan

Sumber : SIDIK, 2021

Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 2.28. Indeks Ketahanan Daerah

No	Uraian	IKD 2023	Kelas IKD 2023	IKD 2024	Kelas IKD 2024
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,37	Sedang	0,39	Sedang

Sumber : BNPB, Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, nilai IKD tercatat sebesar 0,37 dan tergolong dalam kelas "Sedang". Sementara itu, pada tahun 2024, nilai IKD naik menjadi 0,39 namun masih berada dalam kategori kelas yang sama, yaitu "Sedang". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam indeks, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah klasifikasi ketahanan pangan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan

nilai IKD agar dapat mencapai kelas yang lebih tinggi, yang mencerminkan ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.1.1.7 Demografi

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Tahun 2024 Per Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (Jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Balik Bukit	43.925	1,36
Sukau	26.200	1,37
Lumbok Seminung	8.865	2,57
Belalau	12.705	0,41
Sekincau	19.388	0,64
Suoh	18.925	0,57
Batu Brak	15.515	0,84
Pagar Dewa	17.117	0,41
Batu Ketulis	13.837	0,80
Bandar Negeri Suoh	26.029	1,41
Sumber Jaya	24.386	0,40
Way Tenong	35.401	0,43
Gedung Surian	17.372	1,14
Kebun Tebu	21.526	1,22
Air Hitam	12.565	2,00
Lampung Barat	313.756	0,95

Sumber data : BPS tahun 2025

Tabel 2.30. Rasio Penduduk

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(6)
Balik Bukit	105,64
Sukau	106,72
Lumbok Seminung	113,61
Belalau	107,43
Sekincau	107,80
Suoh	110,25
Batu Brak	107,61
Pagar Dewa	113,46
Batu Ketulis	110,16
Bandar Negeri Suoh	112,19
Sumber Jaya	107,12
Way Tenong	104,26
Gedung Surian	106,44
Kebun Tebu	104,13
Air Hitam	110,54
Lampung Barat	107,76

Sumber : BPS tahun 2025

Tabel 2.31. Jumlah Penduduk Tahun 2024 Menurut Umur

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	10.618	10.042	20.660
5–9	13.972	13.317	27.289
10–14	14.426	13.732	28.158
15–19	13.942	13.195	27.137
20–24	12.481	12.012	24.493
25–29	12.170	11.263	23.433
30–34	11.746	11.522	23.268
35–39	13.213	12.666	25.879
40–44	12.910	11.836	24.746
45–49	11.734	10.791	22.525
50–54	9.708	8.856	18.564
55–59	8.317	7.426	15.743
60–64	6.328	5.550	11.878
65–69	4.703	3.455	8.158
70–74	3.172	2.456	5.628
75+	3.300	2.897	6.197
Lampung Barat	162.740	151.016	313.756

Sumber : BPS tahun 2025

Tabel 2.32. Proyeksi jumlah penduduk

No	Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
1	Jumlah Penduduk	319,301	322589	325770	328860	331850	334742
2	Rasio Ketergantungan	47.40	47.65	47.91	48.20	48.49	48.79

Sumber : BPS, tahun 2024

Kawasan Berfungsi Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kebijakan Penataan Ruang bagi kawasan lindung di Lampung Barat adalah dengan memperkuat dan memulihkan fungsi Kawasan Lindung; dan mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 24 dari Perda Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tahun 2023-2043, total luas kawasan berfungsi lindung $\pm$ 106.560 Ha atau sekitar 50,5% dari wilayah administrasi Lampung Barat, yang terdiri dari:

- (1) **Badan air** berupa danau, telaga, embung, dan sungai, dengan luas mencapai $\pm$ 3.194 Ha yang tersebar di 11 Kecamatan. Ekosistem perairan danau Ranau yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung merupakan badan air terluas yang dimiliki Lampung Barat, yakni $\pm$ 2.792,2 Ha.
- (2) **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya**, yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas $\pm$ 44.855 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 9B Gunung Seminung, HL 17B Serarukuh, HL 43 Krui Utara, HL 44B Way Tenong-Kenali, HL 45B Bukit Rigis, HL 48B Palakiah, dan sebagian HL 39 Kota Agung Utara. Pengelolaan Hutan Lindung dilakukan oleh UPT KPHL II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kecuali HL 39 Kota Agung Utara yang berada di Kecamatan Suoh pengelolaannya dilaksanakan oleh KPHL Kota Agung yang berada di Kabupaten Tanggamus. Tutupan lahan berhutan pada kawasan hutan lindung, menunjukkan tingkat kritis, diperkirakan tersisa sekitar 18-20% dari luas kawasan Hutan Lindung, yang masih berupa tegakan hutan primer, selebihnya sudah berubah menjadi, hutan sekunder, kebun campuran, dan semak belukar.

Tabel 2.33. Hutan Lindung dan HKm di wilayah Kerja KPHL II Liwa

No	Nama Kawasan HL	RPHJP KPHL (Ha)	Luas (Ha) sblm	Jml KPS	Luas Hkm (Ha)	Anggota (KK)	Jml DPH
1	HL Reg. 9B Gunung Seminung	1,050.91	1,050.91	1	279.00	129	1
2	HL Reg. 17B Bukit Serarukuh	1,596.10	1,596.10	2	1,781.00	470	2
3	HL Reg. 43B Krui Utara	15,816.59	14,030.00	13	9,944.56	2,671	10
4	HL Reg. 44B Way Tenong-Kenali	13,260.40	13,040.00	19	10,049.34	5,331	12
5	HL Reg. 45B Bukit Rigis	8,549.83	8,345.00	23	7,025.31	4,246	9
6	HL Reg. 48B Bukit Palakiah	1,800.17	1,800.17	1	188.00	58	1
	Jumlah	42,074.00	39,862.18	59	29,267.20	12,905	35

Sumber, KPHL II Liwa, 2025

- (3) Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan danau Ranau yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR No.: 369/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Ranau pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, seluas 98 Ha yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung. Selain sempadan danau, terdapat pula potensi hutan desa dan hutan adat seluas $\pm 3.285,2$ Ha yang dapat ditetapkan sebagai ekosistem esensial di luar kawasan hutan dan dukungan terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030 melalui skema REDD+ dalam rangka pemenuhan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Lampung. Potensi hutan adat dan hutan desa tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Way Tenong dan Sumberjaya.

Gambar 2.10. Kebun Raya Liwa dengan latar belakang hutan konservasi TNBBS

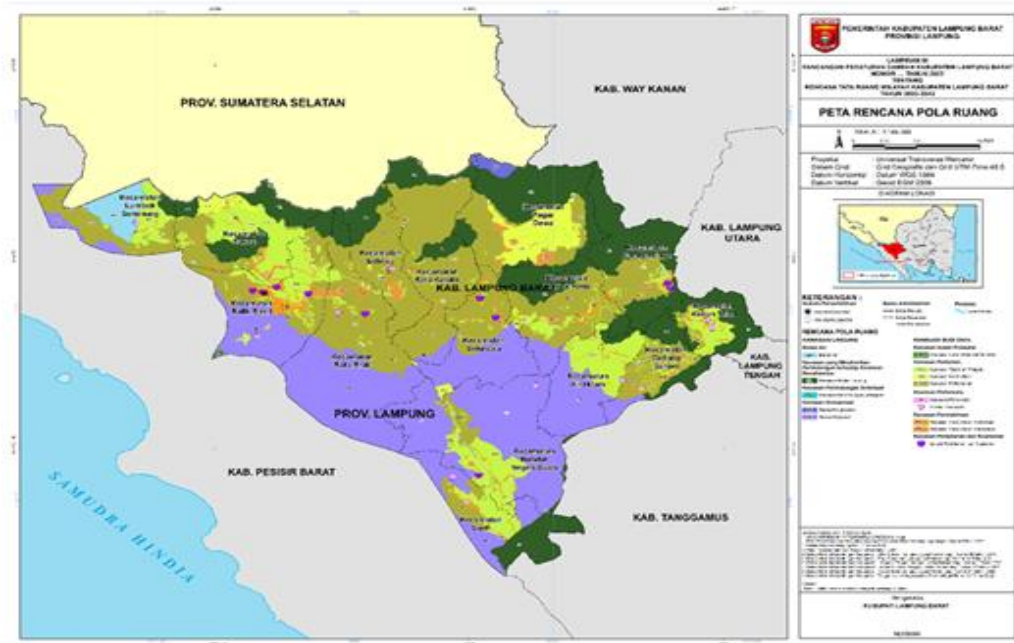


Sumber : lampungbaratkab.go.id

- (4) Kawasan Konservasi di Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi dua, yaitu kawasan konservasi insitu dan kawasan konservasi eksitu. Kawasan Konservasi insitu (pada habitat asli) yang beririsan dengan wilayah administrasi Lampung Barat meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas ± 57.530 Ha, dan Suaka Margasatwa Gunung Raya seluas ± 883 Ha. Hutan Konservasi TNBBS telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera, yang kini berstatus terancam dicabut (in Danger list).

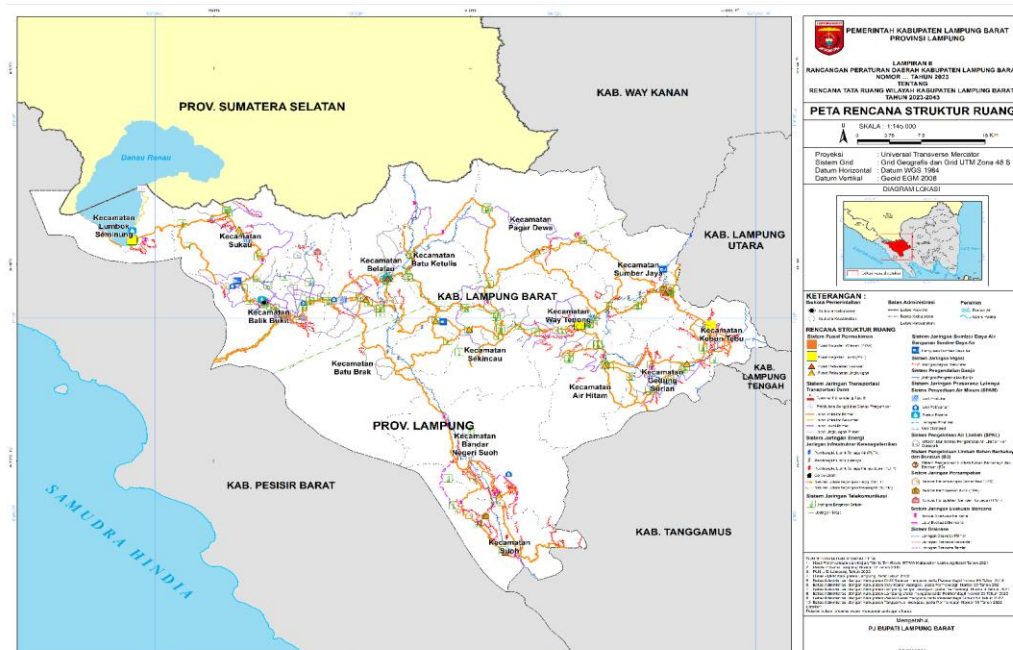
Kawasan konservasi eksitu (di luar habitat aslinya) berupa Kebun Raya Liwa seluas $\pm 86,68$ Ha. Kawasan konservasi eksitu Kebun Raya Liwa bertujuan untuk pengawetan flora khas hutan hujan pegunungan Sumatera, dengan 5 fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, wisata (rekreasi), dan ekologis (jasa ekosistem / Ruang Terbuka Hijau).

Gambar 2.11. Pola Ruang Kabupaten Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

Gambar 2.12. Struktur Ruang Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Sektor Ekonomi tahun 2023

Indikator	Tahun 2023		
	Lampung Barat	Provinsi Lampung	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	4,68%	4,55%	5,05%
PDRB per Kapita	28,86 juta	48,19 juta	75,00 juta

Sumber : BPS

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Sektor Ekonomi tahun 2024

Indikator	Tahun 2024		
	Lampung Barat	Provinsi Lampung	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	4,36%	4,57%	5,11%
PDRB per Kapita	31,35 juta	51,4 juta	78,6 juta

Sumber : BPS

Tabel 2.36. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lampung Barat	-1.16	2.55	4.06	4.68	4.36
2	Tanggamus	-1.77	2.34	4.16	4.7	4.01
3	Lampung Selatan	-1.73	2.6	4.81	4.82	4.62
4	Lampung Timur	-2.26	0.24	2.02	3.51	4.62
5	Lampung Tengah	-1.02	2.88	4.65	4.7	4.62
6	Lampung Utara	-1.45	2.82	3.16	4.22	4.1
7	Way Kanan	-1.16	2.9	4.41	4.63	4.65
8	Tulangbawang	-1.34	2.88	3.87	4.28	4.75
9	Pesawaran	-1.26	2.08	4.55	4.49	3.9
10	Pringsewu	-1.21	2.91	4.37	4.78	4.58
11	Mesuji	-1.35	2.84	3.49	4.06	4.58
12	Tulang Bawang Barat	-1.32	2.89	4.49	4.53	4.55
13	Pesisir Barat	-1.18	2.06	2.82	3.42	2.61

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Kota Bandar Lampung	-1.88	3.12	4.92	4.96	4.97
15	Kota Metro	-1.79	2.91	4.51	4.86	4.88

Tabel 2.37. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023**	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	0,01	0,14	0,60	0,20	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-4,97	-3,13	2,92	9,14	9,56
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-5,04	4,33	0,77	2,77	11,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	11,60	6,26	3,69	7,01	6,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	7,31	2,18	-2,85	-0,92	-2,09
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-4,99	8,95	6,33	8,49	7,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-6,64	8,88	14,34	10,33	7,60
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-5,13	0,77	21,64	18,50	10,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Services Activities</i>	-4,76	-0,41	10,83	12,03	7,37
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,09	6,54	5,33	8,18	10,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,05	4,52	-2,54	4,04	6,16
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	-4,66	1,51	2,53	0,88	6,61
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-1,53	1,23	3,28	1,47	8,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,04	5,33	-1,03	13,17	5,39
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,37	2,08	3,66	2,39	1,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,84	3,89	0,16	2,24	9,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	-4,82	-2,11	29,88	16,33	9,14
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		-1,16	2,55	4,06	4,68	4,36
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas/ <i>Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas</i>		-1,16	2,55	4,06	4,68	4,36

Sumber : BPS tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif, meskipun masih berada pada level menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Pada tahun 2020, Lampung Barat mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,16 persen akibat pandemi COVID-19, namun angka ini relatif lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain seperti Kota Bandar Lampung yang terkontraksi hingga -1,88 persen. Memasuki 2021, Lampung Barat mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 2,55 persen, sedikit di bawah rata-rata kabupaten lain yang umumnya tumbuh di atas 2,8 persen.

Tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,06 persen, yang kembali menempatkan Lampung Barat pada kategori pertumbuhan menengah, kalah cepat dibandingkan daerah seperti Lampung Selatan

yang tumbuh 4,81 persen atau Kota Bandar Lampung yang mencapai 4,92 persen. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Lampung Barat menguat menjadi 4,68 persen, menunjukkan perbaikan berkelanjutan, meskipun pada 2024 sedikit menurun ke angka 4,36 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 disebabkan antara lain melambatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor dominan pembentuk PDRB Lampung Barat. Sektor tersebut hanya tumbuh sebesar 0,14% pada tahun 2024, dibandingkan pada tahun 2020 diangka 0,20%. Selanjutnya terjadi perlambatan pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib, dimana angka pertumbuhan pada sektor tersebut sebesar 5,39% melambat dari tahun 2023 sebesar 13,17%.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Lampung Barat belum masuk dalam kelompok daerah dengan pertumbuhan tertinggi seperti Kota Bandar Lampung (4,97 persen) dan Kota Metro (4,88 persen), tetapi tetap lebih baik daripada Pesisir Barat yang pertumbuhannya hanya mencapai 2,61 persen.

Melihat kondisi ini, potensi Lampung Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan cukup besar apabila dapat mengoptimalkan sektor-sektor unggulan. Komoditas kopi robusta yang sudah dikenal sebagai produk ekspor menjadi kekuatan utama yang perlu dikembangkan, terutama melalui hilirisasi industri pengolahan dan penguatan branding kopi Lampung Barat di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, sektor pariwisata alam seperti Danau Ranau, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan air terjun Sepapa Kiri menawarkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Diversifikasi di sektor pertanian, pengembangan agroindustri, serta penguatan UMKM berbasis produk lokal juga menjadi faktor kunci yang dapat menjadi pendorong utama atau game changer dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ke depan.

Kemiskinan

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari Daerah adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 11,17% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 34.370 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 11,71% setara dengan 36.200 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,54%.

Pada tahun 2024 capaian kinerja kemiskinan menunjukan hasil yang positif, Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 10,68%, turun 0,49% dari tahun

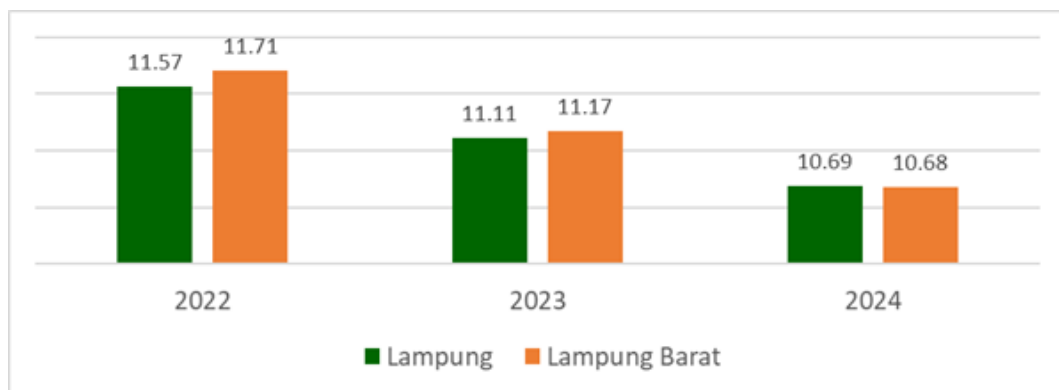
sebelumnya, untuk jumlah penduduk miskin sendiri pada tahun 2024 turun menjadi **33.430 Jiwa**.

Tabel 2.38. Angka Kemiskinan

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan	Persen	11,71	11,17 (↓)	10,68 (↓)

Sumber Data : BPS 2024

Gambar 2.13. Angka Kemiskinan, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat 2022-2024



Sumber Data : BPS 2024

Jika dilihat dari Grafik diatas Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 dan 2023 masih diatas Provinsi namun pada tahun 2024 Angka Kemiskinan Lampung Barat dibawah Provinsi Lampung.

Tabel 2.39. Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan/Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)
Lampung Barat	33,43	10,68	1,51	0,40	563.531
Tanggamus	64,22	10,28	1,42	0,35	496
Lampung Selatan	132,38	12,57	1,94	0,46	528.226
Lampung Timur	142,70	13,19	1,57	0,29	497.183
Lampung Tengah	137,41	10,37	1,66	0,40	526.313
Lampung Utara	105,91	16,92	2,30	0,51	544.994
Way Kanan	48,88	10,43	1,57	0,36	464.717
Tulangbawang	37,46	7,88	0,82	0,17	560.324
Pesawaran	55,01	11,86	1,70	0,36	524.588
Pringsewu	34,42	8,32	0,92	0,16	583.425
Mesuji	12,91	6,31	0,83	0,16	555.729

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu/Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)
Tubaba	20,35	7,22	0,87	0,19	544.02
Pesisir Barat	20,22	12,64	2,10	0,49	566.04
Kota B.Lampung	83,88	7,37	0,97	0,21	787.26
Kota Metro	12,07	6,78	0,77	0,15	503.161
Lampung	941,23	10,69	1,53	0,33	586.551

Sumber Data : BPS 2024

Jika dilihat dari tabel diatas, Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat berada di urutan 10 (sepuluh) dari 15 Kab/Kota dimana Kabupaten Mesuji berada di peringkat pertama untuk Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah dan Kabupaten Lampung Utara diposisi paling akhir dengan angka kemiskinan terbesar.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan 100. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Hal ini dapat menjadi masalah dalam perekonomian, karena dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat sebesar 2,10% atau sebesar 4.272 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Barat mengalami sedikit Kenaikan yang sebelumnya sebesar 0,15%. Namun, pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 2,09% atau sebesar 4.043 Jiwa, turun sebanyak 0,16%. Kenaikan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat dari Tabel dan Grafik Dibawah.

Tabel 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,10	2,25 (↑)	2,09 (↓)

Sumber Data : BPS 2024

Indeks Gini

Pada tahun 2024, Gini Rasio Kabupaten Lampung Barat tercatat **0,290 Point** lebih angka tersebut Naik sedikit jika dibandingkan dengan Gini Rasio pada 2023 yang sebesar 0,274 Point. Hal ini berarti distribusi

pendapatan penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun 2023.

Tabel 2.41. Gini Ratio

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
RASIO GINI	Point	0,284	0,274(↓)	0,290 (↑)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah Indikator yang mengindikasikan bahwa kualitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$).

IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 (berdasarkan sensus penduduk 2020) mencapai angka 71,72 poin naik 0,71 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 71,01 poin. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Barat berada di posisi ke-6 se Provinsi Lampung dan masuk kedalam kategori tinggi. Sedangkan untuk capaian di tahun anggaran 2024, IPM Kabupaten Lampung Barat kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 72.41 Point atau naik sebesar 0,69 Point.

Tabel 2.42. Indeks Pembangunan Manusia

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
IPM	Point	71,01	71,72 (↑)	72,41 (↑)

Sumber Data : BPS 2024

IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. IPM merupakan ukuran kualitas hidup yang dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, Adapun Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain :

Komponen-komponen pembentuk IPM adalah:

- **Umur panjang dan hidup sehat:** Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir
- **Pengetahuan:** Diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah
- **Standar hidup layak:** Diukur dengan produk nasional bruto per kapita

Capaian Komponen IPM

Komposit dalam perhitungan IPM terdiri dari 4 (empat) Indikator antara lain :

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**
2023 : 73,78 Tahun (↑) sebesar 0,55 dari tahun sebelumnya.
2024 : 73,96 Tahun (↑) sebesar 0,18 dari tahun sebelumnya.

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**
2023 : 12,26 Tahun (↑) sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya.
2024 : 12,30 Tahun (↑) sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya.
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**
2023 : 8,36 Tahun (↑) sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya.
2024 : 8,56 Tahun (↑) sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya.
- **Pengeluaran Perkapita**
2023 : Rp 10.593.000 (↑) sebesar Rp.418.000 dari tahun sebelumnya.
2024 : Rp 10.965.000 (↑) sebesar Rp.372.000 dari tahun sebelumnya.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu mengalami fluktuasi besar sepanjang periode 2020–2024. Terjadi lonjakan tajam dari 72,4 pada 2020 menjadi 145,6 pada 2021 (peningkatan lebih dari dua kali lipat), yang mungkin terkait dengan faktor eksternal, seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan. Setelah lonjakan tahun 2021, AKI menurun drastis menjadi 36,1 pada 2022 dan stabil di angka 38,04 pada 2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas pelayanan.

Tabel 2.43. Angka Kematian Ibu

Tahun	Angka Kematian Ibu
2020	72,4/100.000 KH
2021	145,6/100.000 KH
2022	36,1/100.000 KH
2023	38,04/100.000 KH
2024	114,33/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Namun, pada tahun 2024, angka kematian ibu kembali melonjak ke 114,33 per 100.000 KH. Kenaikan ini cukup signifikan dan menunjukkan adanya masalah serius, seperti kemungkinan penurunan mutu layanan kesehatan, krisis tenaga medis, kurangnya intervensi kesehatan ibu, atau faktor lain seperti bencana atau wabah penyakit. Data ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perbaikan kesehatan ibu belum tercapai sepenuhnya, mengingat terjadi ketidakstabilan dari tahun ke tahun.

Tingginya AKI, terutama pada 2021 dan 2024, menjadi alarm bahwa perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap sistem kesehatan ibu di daerah ini, mencakup aspek layanan prenatal, persalinan, pasca-persalinan, serta faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh.

Tabel 2.44. Perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian ibu

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
AKI	72,4	145,6	36,1	38,04	114,33
kasus kematian ibu	4 kasus	8 kasus	2 kasus	2 Kasus	6 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Jumlah kematian Ibu pada tahun 2024 adalah 6 kasus kematian dengan penyebab kematian adalah 1 kasus dengan eklamsi, 3 kasus dengan perdarahan dan 2 kasus dengan komplikasi non obstetrik. Kemudian untuk tempat kematian 5 kasus kematian meninggal di rumah sakit rujukan serta 1 kasus dalam perjalanan proses rujukan dari PMB ke Puskesmas. Semua kasus kematian ini sudah terentri di dalam aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) yang merupakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan kematian berdasarkan Alamat Mati, Alamat KTP dan Alamat Domisili.

Jumlah kematian Ibu pada tahun 2024 adalah 6 kasus dengan jumlah Kelahiran Hidup Lampung Barat tahun 2024 adalah 5.248 Lahir Hidup. Sehingga jika dihitung jumlah rasio kematian ibu atau (*Maternal Mortality Ratio – MMR*) maka akan didapatkan hasil 114,33 persen. MMR menunjukkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam suatu periode waktu tertentu. Semakin rendah MMR, semakin baik kinerja kesehatan ibu di suatu wilayah. Untuk Kabupaten Lampung Barat terjadi peningkatan jumlah kasus kematian dari tahun sebelumnya yaitu dari 2 kasus kematian menjadi 6 kasus kematian.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tabel 2.45. Angka Kematian Bayi

Tahun	Angka Kematian Bayi
2020	2,90/1.000 KH
2021	4,55/1.000 KH
2022	1,1/1.000 KH
2023	2,28/ 1000 KH
2024	2,29/1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Jumlah kematian bayi pada tahun 2024 adalah 12 kasus kematian, dengan penyebab kematian adalah 4 kasus dengan BBLR, 2 kasus dengan Asfiksia, 2 kasus dengan Kelainan Kongenital, 4 kasus dengan gangguan respirasi dan 1 kasus dengan Sepsis. Untuk tempat kematian semua kasus meninggal di Rumah Sakit dan Klinik. Semua kasus kematian ini sudah terentri di dalam aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) yang merupakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan kematian berdasarkan Alamat Mati, Alamat KTP dan Alamat Domisili. Angka kematian bayi yang tinggi di

Kabupaten Lampung Barat sebagian besar disebabkan karena 1). Sistem rujukan yang masih lemah khususnya dalam system rujukan ibu dan bayi. 2). Pada beberapa kasus terjadi kesulitan didalam merujuk ke fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi tingkatannya. 3). Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan pentingnya perawatan Ante Natal Care yang memenuhi standar. 4). Kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan USG sebagai Langkah awal deteksi dini terhadap permasalahan dalam kehamilan. 5). Kendala dalam kebiasaan masyarakat setempat dalam menolak pengobatan atau rujukan. 6). Perlu dimaksimalkan kembali Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi.

Tabel 2.46. Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
AKB	2,9	4,55	1,1	2,28	2,29
Kasus Kematian Bayi	16 kasus	25 kasus	8 kasus	11 Kasus	12 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 adalah 12 kasus kematian dengan jumlah Lahir Hidup adalah 5.248 Lahir Hidup. Sehingga jika dilakukan perhitungan rasio kematian Bayi maka akan didapatkan hasil 2,29. AKB memberikan gambaran tentang tren kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, sehingga dapat digunakan untuk melihat perubahan kematian bayi dari waktu ke waktu. Jumlah kasus kematian bayi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 11 kasus menjadi 12 kasus kematian bayi.

Prevalensi Stunting,

Tabel 2.47. Data stunting tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Prosentase Stunting Lampung Barat	Target Nasional	Keterangan
1	2020	-	-	Tidak ada Survei Status Gizi (SSGI) di Tahun 2020
2	2021	22,7%	24,4%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021
3	2022	16,6%	21,6%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022

No	Tahun	Prosentase Stunting Lampung Barat	Target Nasional	Keterangan
4	2023	24,6	16 %	Hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023
5	2024	20,5	14 %	Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, perkembangan prevalensi stunting di Lampung Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Lampung Barat tercatat sebesar 22,7%, yang lebih baik dari target nasional yang mencapai 24,4%. Namun, pada tahun 2022, prevalensi stunting turun menjadi 16,6%, jauh lebih rendah dari target nasional sebesar 21,6%, menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan masalah gizi di daerah ini. Sayangnya, pada tahun 2023, prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 24,6%, melebihi target nasional yang sebesar 16%. Di tahun 2024, prevalensi stunting di Lampung Barat menunjukkan penurunan kembali menjadi 20,5%, namun masih berada di atas target nasional yang sebesar 14%. Meskipun ada penurunan dari tahun ke tahun, pencapaian target nasional masih jauh dari optimal, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam upaya pengentasan stunting di daerah ini. Target untuk tahun 2025 yaitu 17,8%.

Upaya Kabupaten Lampung Barat dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu kegiatan analisis situasi indikator layanan, Tahapan kedua dengan mengidentifikasi kendala cakupan layanan serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan penurunan stunting meliputi indikator, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya. Tahapan ketiga dengan pemetaan kegiatan tahun rencana berjalan dan tahun rencana, tahapan selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pelaporan cakupan layanan setiap 6 bulan sekali dengan data bersumber dari pekon/kelurahan.

Indeks Keluarga Sehat

Pada tahun 2024, indeks keluarga sehat mencapai angka 0,25 poin. Capaian ini menempatkan Lampung Barat pada posisi ke 5 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

PENYAKIT MENULAR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator program masing-masing jenis penyakit menular yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan, capaian indikator tersebut secara rinci dalam uraian di bawah ini

TBC

Tabel 2.48. Angka Penemuan BTA (+) Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS BARU YANG DITEMUKAN	TARGET KASUS	CDR (%)	SR (%)
1	2020	207	980	20.9	91,47%
2	2021	230	530	43,39%	91,43%
3	2022	423	1.094	38,67%	94,72%
4	2023	427	1151	41,36%	94,4%
5	2024	497	932	53,31%	92,59%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 497 kasus TBC yang ditemukan dan di obati dari target 932 kasus yang harus ditemukan (53,31%) dan untuk capaian success rate (SR) 92,59% sementara target SR adalah 90%.

Dalam rangka percepatan penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) maka akan dilakukan :

- Mendorong dibentuknya Satuan Tugas TBC Tingkat Kecamatan;
- Mendorong Pemenuhan Logistik Program Tuberkulosis (Cartridge Tes Cepat Molekuler Tuberkulosis) menggunakan dana APBD;
- Melakukan kegiatan penyuluhan dan skrining TBC kepada populasi beresiko tinggi (masyarakat) dengan alat rontgen portable di wilayah-wilayah kantong Tuberkulosis (TBC) /Estimasi kasus TBC tinggi;
- Pembinaan teknis dan validasi data TBC secara berkala di Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Swasta, Klinik dan Dana Pembangunan Manusia;
- Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit dalam melakukan management program TBC;
- Mendorong pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan kualitas gizi pasien-pasien TBC di wilayahnya (mendukung kegiatan investigasi kontak).

HIV

Tabel 2.49. Jumlah Penderita HIV Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	KASUS BARU (ORG)	KUMULATIF (ORG)	MENINGGAL (ORG)	KET
2020	3	9	0	-
2021	1	10	0	-
2022	2	12	1	-
2023	2	14	1	-
2024	2	16	0	-

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Untuk pelaksanaan program pelayanan Kesehatan orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) di kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 mengalami penambahan kasus baru sebanyak 2 (dua) orang, sehingga total kasus HIV yang sedang dalam pengobatan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 16 orang.

DBD

Tabel 2.50. Jumlah Penderita DBD Kabupaten Lampung Barat TAHUN 2020 – 2024

No	Puskesmas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sumber Jaya	16	0	0	0	52
2	Gedung Surian	1	0	0	1	3
3	Fajar Bulan	8	0	1	0	30
4	Sekincau	6	0	4	0	17
5	Srimulyo	2	0	0	0	1
6	Kenali	1	0	0	0	11
7	Batu Brak	4	1	1	0	16
8	Liwa	29	9	22	28	167
9	Buay Nyerupa	15	2	5	28	110
10	Lombok	2	0	0	5	107
11	BNS	0	0	0	1	3
12	Pagar Dewa	4	0	0	0	9
13	Kebun Tebu	5	1	0	0	108
14	Air Hitam	0	0	0	1	0
15	Batu Ketulis	3	0	4	4	21
Kabupaten		96	13	37	69	655

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular DBD di kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 mengalami kenaikan kasus yang sangat tinggi. Kasus DBD yang ditemukan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 655 kasus. Peningkatan kasus DBD ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kembali tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan pribadi untuk mencegah munculnya tempat – tempat perindukan nyamuk Aedes Aegypti yang menyebabkan penularan penyakit DBD.

MALARIA

Tabel 2.51. Angka Insidens Malaria Per Diabati Per Mil Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020– 2024

No	TAHUN	API
1.	2020	0
2.	2021	0
3.	2022	0
4.	2023	0
5.	2024	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Untuk program Malaria pada tahun 2024 ditemukan adanya 3 kasus malaria import dan API pada tahun 2024 adalah sebesar 0,01/1.000 penduduk. Kegiatan yang tetap harus dilakukan untuk mencegah munculnya kasus malaria dan penularan malaria adalah dengan penguatan surveilans kasus malaria dan penguatan surveilans migrasi malaria di Kabupaten Lampung Barat.

PENYAKIT KECACINGAN

Tabel 2.52. Capaian Pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024

NO	PUSKESMAS	2020	2021	2022	2023	2024
1	SUMBER JAYA	100,00	100%	100%	100 %	100%
2	BUNGIN	100,00	100%	100%	99,9 %	72,97%
3	FAJAR BULAN	100,00	100%	100%	101,42 %	96,74%
4	SEKINCAU	100,00	101,86%	100%	100 %	105,68%
5	SRIMULYO	99,69	99,69%	99,32%	90,52 %	91,14%
6	KENALI	98,99	98,84%	161%	100 %	100%
7	BATU BRAK	100,00	100%	100%	100 %	100%
8	LIWA	103,31	100%	100%	100 %	100%
9	B. NYERUPA	100,00	100%	100%	99,54 %	100%
10	LOMBOK	106,13	89,69%	95,38%	91,87 %	92,57%
11	B.N.SUOH	100,00	100%	100%	100 %	100%
12	PAGAR DEWA	100,00	100%	100%	100 %	100%
13	KEBUN TEBU	97,33	99,71%	100%	100 %	97,41%
14	BATU KETULIS	100,00	99,01%	100%	100,26 %	100,44%
15	AIR HITAM	100,00	100%	100%	97,76 %	100%
	KABUPATEN	99,94	99,26%	101,5%	99.42 %	97,83%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pelaksanaan program Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) kecacingan di Kabupaten Lampung Barat pda Tahun 2024 adalah sebesar 97,82%, Dimana target yang harus di capai adalah sebesar 90%.

PENYAKIT TIDAK MENULAR

Tabel 2.53. Kasus Kesakitan Penyakit Tidak Menular (20 besar penyakit)

Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
Gastritis	6049	Hipertensi	17.221	Hipertensi	31.361
Hipertensi	5436	Penyakit Jantung Koroner	305	Penyakit Jantung Koroner	85
Influenza	4828	Gagal Jantung	382	Gagal Jantung	37
Diabetes Mellitus Tipe II	2411	Diabetes Melitus	3.320	Diabetes Melitus	4.363
Artritis reumatoid	2311	Obesitas	5.035	Obesitas	2188
Dyspepsia	1847	Penyakit Tiroid	73	Penyakit Tiroid	17
Myalgia	1816	Stroke	144	Stroke	62
Common Cold	1494	Asma Bronchiale	538	Asma Bronchiale	427
Dermatitis Kontak Alergi	1356	SLE	-	SLE	18
Skabies	1151	Thalasemia	6	Thalasemia	0
Vertigo	1061	PPOK (Penyakit Pernafasan Obstruktif Kronis)	265	PPOK (Penyakit Pernafasan Obstruktif Kronis)	29
Diare	953	Osteoporosis	1	Osteoporosis	0
ISPA	890	Ginjal Kronik	21	Ginjal Kronik	2
Bronkitis Akut	759	Tumor Payudara	12	Tumor Payudara	0
Migrain	662	Retinoblastoma	2	Retinoblastoma	0
Kehamilan Normal	518	Leukimia	1	Leukimia	0
Persistensi Gigi Sulung	516	Kanker Serviks	-	Kanker Serviks	0
Asma bronkial	513	Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	628	Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	382
Demam Typoid	444	Cedera Akibat Kekerasan Dalam Rumah	3	Cedera Akibat Kekerasan Dalam Rumah	3

Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Tangga		Tangga	
CHF	403	Cedera Akibat Lain	46	Cedera Akibat Lain	27

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Universal Health Coverage (UHC)

Pada Tahun 2024 Dukungan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (75% dari 50% pajak rokok yang diterima). Pajak Rokok yang di terima Tahun 2024 sebesar : Rp. 9.671.246.298 dan di alokasikan untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 7.963.996.810. Capaian Kabupaten Lampung Barat dalam memenuhi batas minimal 75%. Dukungan anggaran untuk JKN telah memenuhi batas minimal, dimana pada tahun 2024 telah dialokasi kan sebesar 82%. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat sebanyak 310.990 dengan Jumlah keanggotaan sebanyak 309.574 atau 99,54 % dengan keaktifan kepesertaan sebesar 67,87%.

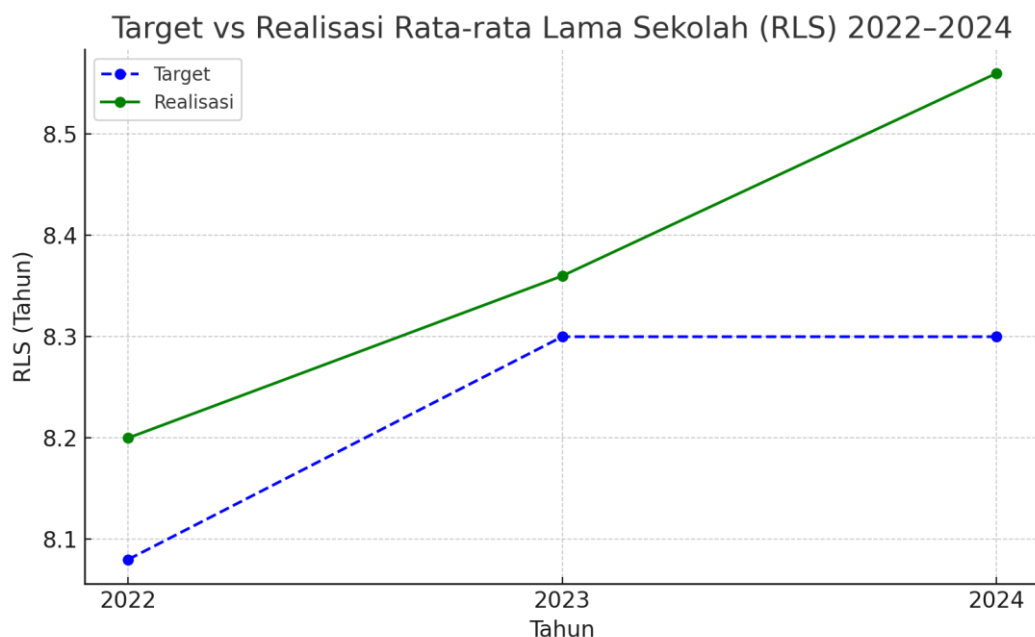
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel 2.54. Rata-Rata Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	RLS	8,08 tahun	8,20 tahun	8,30 tahun	8,36 tahun	8,30 tahun	8,56 tahun

Sumber: BPS, 2025



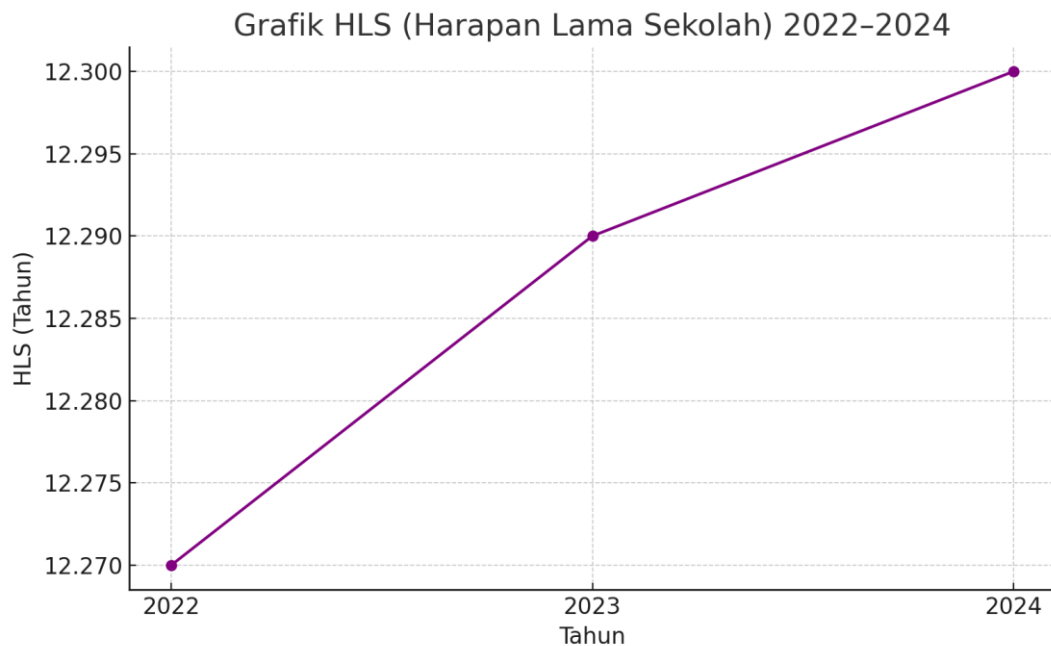
Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. RLS merupakan salah satu unsur dalam menghitung Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi angka RLS, semakin lama jenjang pendidikan yang sudah dicapai oleh penduduk. Dari table diatas dapat diketahui Peningkatan RLS Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2022 dengan capaian 8,20 Tahun meningkat menjadi 8,36 Tahun pada tahun 2023, dan tahun 2024 capaian RLS Lampung Barat sebesar 8,56 Tahun. Artinya, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Lampung Barat yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,56 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 8,85 Tahun maka capaian RLS Kabupaten Lampung Barat masih dibawah Nasional, akan tetapi angka RLS Lampung Barat masih lebih tinggi dari capaian Propinsi Lampung yaitu sebesar 8,36 Tahun. Upaya untuk meningkatkan RLS Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan non formal bagi masyarakat umum setiap tahunnya, namun yang menjadi kendala selama ini adalah masih sangat rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal melalui pendidikan Kejar Paket A, B dan C. Rendahnya minat masyarakat tersebut dapat disebabkan karena penduduk usia 25 tahun ke atas tersebut tidak menjadikan status pendidikannya sebagai prioritas karena mereka lebih berfokus pada pekerjaannya sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Harapan Lama Sekolah

Tabel 2.55. Harapan Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	HLS	12,27	12,29	12,30

Sumber: BPS, 2025



Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh penduduk usia sekolah yang diukur pada penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS Lampung Barat tahun 2024 sebesar 12,30 tahun yang berarti bahwa penduduk Lampung Barat diperkirakan akan dapat menempuh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tahun pertama perguruan tinggi. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan HLS Provinsi Lampung yang sebesar 12,78 tahun. HLS juga menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat diakses di Kabupaten Lampung Barat baik oleh penduduk Lampung Barat ataupun penduduk dari luar Lampung Barat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk dapat meningkatkan minat masyarakat setempat dan pendatang untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakatnya. Salah satu langkah konkret adalah penyediaan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa baru di jenjang SD/MI dan SMP/MTs sejak tahun 2018. Program ini bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan partisipasi sekolah. Pada tahun ajaran terbaru, program ini telah mencakup lebih dari 6.000 siswa di masing-masing jenjang pendidikan.

Selain itu, pemerintah daerah juga aktif melobi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendapatkan dukungan dalam peningkatan infrastruktur dan mutu pendidikan. Ini termasuk pembangunan serta rehabilitasi fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Untuk menjangkau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal, Pemkab Lampung Barat juga

mengintensifkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan melalui jalur non-formal.

Capaian SPM Urusan Pendidikan

Tabel 2.56. Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator	Jenjang	Capaian Tahun 2024
1	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	75,51%
2	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	71,07%
3	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	65,18%
4	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	68,81%
5	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	55,93%
6	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	97,98%
7	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	KKesetaraan	12,36%
8	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	38,82%
9	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	62,89%
10	D.10 Iklim Inklusivitas	SD	56,20%
11	D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	55,82%
12	D.4 Iklim Keamanan	SD	72,78%
13	D.4 Iklim Keamanan	SMP	68,23%
14	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	70,90%
15	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	71,62%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2025

Capaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 berdasarkan Raport Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebesar 70,49% dengan kategori tuntas pratama,

Dari masing-masing indikator SPM diatas ada satu indikator dengan capaian tinggi yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 dengan capaian 97,98%, delapan indikator dengan capaian baik yaitu Kemampuan Literasi SD dengan capaian 75,51%, Kemampuan Literasi SMP dengan capaian 71,07%, Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SD dengan capaian 72,78%, Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMP dengan capaian 68,23%, Iklim Kebinekaan SD dengan capaian 70,90%, Iklim Kebinekaan SMP dengan capaian 71,62%, Iklim Inklusivitas SD

dengan capaian 56,20%, dan Iklim Inklusivitas SMP 55,82%, dan ada tiga indikator dengan ketercapaian sedang diantaranya Skor Kemampuan Numerasi SD dengan capaian 65,18%, Skor Kemampuan Numerasi SMP dengan capaian 68,81% serta Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 dengan capaian 62,89%,

Untuk indikator dengan capaian rendah terdiri dari tiga indikator diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (5-6) dengan capaian 55,93%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan dengan capaian 12,36% dan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B, berdasarkan ketercapaian indikator diatas Langkah-langkah yang harus dilakukan Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan ketercapaian SPM dengan melakukan berbagai pembenahan diantaranya melakukan sinkron data antara Disdukcapil dengan Data Pokok Pendidikan, ataupun melakukan pendataan mandiri dengan melibatkan kecamatan/pekon guna mengetahui jumlah anak dan alasan mengapa anak tidak terdaftar di Layanan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Membangun Kerjasama dengan Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan, Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus, Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas, Kecukupan Fasilitas TIK, Peningkatan Kualitas Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah agar memiliki kompetensi memadai untuk menyelenggarakan layanan yang berkualitas bagi peserta didik, Pengajuan formasi guru ASN ataupun melakukan penataan/pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Pada jenjang SD, skor kemampuan literasi mencapai 75,51%, sementara pada jenjang SMP tercatat sebesar 71,07%. Untuk kemampuan numerasi, capaian pada jenjang SD adalah sebesar 65,18%, sedangkan pada jenjang SMP sebesar 68,81%. Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, secara umum terdapat tren peningkatan, meskipun peningkatannya relatif moderat. Pada tahun 2022, misalnya, skor literasi SD masih berada di kisaran 73%, sedangkan SMP sekitar 69%. Untuk numerasi, capaian di tahun 2022 di tingkat SD berkisar 63%, sementara SMP sekitar 66%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, kemampuan literasi dan numerasi siswa di Lampung Barat masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal numerasi di tingkat SD.

Kondisi di daerah ini mencerminkan adanya tantangan terkait kualitas pembelajaran dasar, ketersediaan sumber belajar, serta kompetensi guru dalam mengajarkan literasi dan numerasi secara efektif. Berbagai faktor seperti keterbatasan sarana prasarana, belum meratanya kualitas tenaga

pendidik, serta perbedaan tingkat sosio-ekonomi keluarga turut mempengaruhi capaian kemampuan siswa.

Untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Kabupaten Lampung Barat, beberapa program dapat diimplementasikan. Di antaranya adalah penguatan pelatihan guru berbasis literasi dan numerasi, penerapan program pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) yang mendorong keterampilan berpikir kritis, serta penyediaan bahan bacaan yang berkualitas di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Program lain yang perlu dikuatkan adalah literasi keluarga dan masyarakat, di mana orang tua dan lingkungan sekitar didorong untuk aktif mendukung kegiatan membaca dan berhitung anak-anak di luar jam sekolah. Selain itu, pelaksanaan asesmen literasi dan numerasi secara berkala penting dilakukan untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan intervensi pembelajaran sesuai kebutuhan.

Dengan kombinasi program peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana belajar yang memadai, serta keterlibatan komunitas pendidikan dan masyarakat luas, diharapkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Lampung Barat akan terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam tahun-tahun mendatang.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Tabel 2.57. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	56,57	63,08	68,29

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat mendapat nilai sebesar Rp.68,29 dan masuk dalam kategori Sedang.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan literasi masyarakat. IPLM mengukur beberapa unsur, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, tenaga perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Data PPKS

Tabel 2.58. Jumlah PPKS Kabupaten Lampung Barat

No.	PPKS	Tahun (Orang)		
		2022	2023	2024
1.	Anak			
a.	Anak balita terlantar	1	1	0
b.	Anak terlantar	8	8	21
c.	Anak Jalanan	0	0	0
d.	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	1	43
e.	Anak dengan kedisabilitasan	215	119	139
f.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	5	5	0
g.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	1	1
2.	Wanita			
a.	Wanita rawan sosial ekonomi	736	736	736
3.	Lanjut Usia Terlantar	49	44	241
4.	Penyandang Cacat			
a.	Penyandang disabilitas	3067	2702	2653
5	Tuna Sosial			
a.	Tuna Susila	1	1	1
b.	Gelandangan		1	1
c.	Pengemis			0
d.	Pemulung	4	4	5
e.	Bekas warga binaan	4	4	57
6	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya			
a.	Korban penyalahgunaan napza	2	2	0
7	Keluarga			
a.	Fakir miskin	16.768 (jiwa)	15.223 (Jiwa)	15.339
b.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	3	3	0
8	Masyarakat			
a.	Korban Trackfiking	0	0	0
b.	Korban tindak kekerasan	0	0	0
c.	Pekerja migran bermasalah sosial	0	0	0
d.	Korban bencana alam	137	81	723
e.	Korban bencana sosial	63	78	78
f.	Orang dengan HIV/AIDS	0	0	12

No.	PPKS	Tahun (Orang)		
		2022	2023	2024
	(ODHA)			
g.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	92
h.	Kelompok minoritas	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Data PSKS

Tabel 2.59. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	PSKS	Tahun (Org)		
		2022	2023	2024
1.	Pekerja sosial professional	10	10	10
2.	Pekerja sosial masyarakat	136	136	136
3.	Taruna Siaga Bencana	80	80	80
4.	Lembaga kesejahteraan sosial	12	12	9
5.	Karang Taruna	436	436	436
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	0	0	0
7.	Keluarga Pioner	22	22	22
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	0	0	0
9.	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	1	1	1
10.	Penyuluh Sosial	78	83	83
11.	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	15	15	15
12.	Dunia usaha	240	240	240

Sumber: Dinas Sosial, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Tabel 2.60. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	72.39	84.06	84.06	89.58	90.50

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Kerukunan Umat Beragama berada di angka 72,39. Angka ini menunjukkan kondisi kerukunan yang relatif baik, meskipun masih ada tantangan dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Faktor-faktor seperti perbedaan pandangan, dinamika sosial, serta isu-isu intoleransi mungkin masih memengaruhi kondisi kerukunan pada tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2021, indeks mengalami lonjakan signifikan menjadi 84,06. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam memperkuat toleransi, membangun dialog antaragama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Program-program pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dalam membangun harmoni sosial bisa menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan ini.

Pada tahun 2022, indeks tetap berada di angka 84,06, yang menunjukkan bahwa kondisi kerukunan tetap stabil. Meskipun tidak ada peningkatan, kestabilan ini bisa menjadi tanda bahwa upaya menjaga toleransi masih berjalan dengan baik, meskipun mungkin masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar indeks dapat meningkat lebih lanjut.

Pada tahun 2023, indeks kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 89,58. Peningkatan ini mengindikasikan semakin kuatnya rasa saling menghormati dan kerja sama antarumat beragama. Kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan dialog antaragama, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan bisa menjadi faktor yang mendukung tren positif ini.

Pada tahun 2024, indeks mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 90,50. Ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama semakin baik dan kuat. Angka ini mencerminkan keberhasilan berbagai pihak dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Ke depan, upaya mempertahankan dan meningkatkan kerukunan tetap perlu dilakukan agar situasi yang

kondusif ini terus terjaga dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika sosial atau politik yang bisa memicu ketegangan.

Tabel 2.61. Jumlah Penggiat Seni dan Budaya

Penggiat Seni Dan Budaya		Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
Seni Rupa					
	Jumlah Kelompok Seni Lukis	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan	7	7	7	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Patung	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Reklame				Kelompok
2. Seni Tari/Gerak					
	Tari Kreasi Baru				
	Jumlah Kelompok	16	16	16	Kelompok
	Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru	500	550	575	Orang
	Tari Tradisional				
	Jumlah Kelompok	10	10	10	Kelompok
	Jumlah Anggota Tari Tradisional	400	410	450	Orang
3. Seni Suara/Vocal					
	Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal	2	2	2	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal	30	30	40	Orang
4. Seni Musik Tradisional					
	Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional	70	70	70	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional	490	495	500	Orang
5. Seni Sastra					
	1. Jumlah Kelompok Seni Sastra	3	3	3	Kelompok
	2. Jumlah Anggota Seni Sastra	90	93	150	Orang
6. Seni Teater/Drama					
	Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Teater/Drama	90	94	100	Orang
7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya					

Pegiat Seni Dan Budaya		Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
	Pagelaran Seni Budaya				
	Jumlah Pagelaran	5	5	5	Kali
	Jumlah Pengunjung	7000	7000	7000	Orang
8. Celugam					
	Kerajinan Celugam				
	Jumlah pengrajin	5	5	5	IKM Aktif

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

Lampung Barat memiliki beragam seni budaya yang harus dilestarikan dan berkembang sehingga bisa lebih dikenal masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat pada table diatas tentang perkembangan data seni dan budaya diKabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.62. Kinerja Sektor Kebudayaan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	11,24%	12.25
2	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	3,22%	5.32

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Tabel 2.63. Data Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Kasus	4	24	11	2	
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum		2	7	3	0	
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	0	0	1	0	
(b) Jumlah	Orang	2	7	3	2	

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan Sebagai Korban						
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	4	17	8	2	
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	0	4	8	2	
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	4	13	10	7	
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	0	0	0	0	
B. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		6	20	9	9	
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan		2	7	3	2	
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	2	1	3	2	

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	0	0	0	0	
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan		4	13	6	7	
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	4	13	6	7	
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	0	0	0	0	
C. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit	1	3	3	3	
1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A	Unit	1	1	1	1	
2. LPAI (Lembaga perlindungan anak Indonesia)		-	1	1	1	

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3. KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia)		-	1	1	1	
Indeks Perlindungan Anak			58,66	60,94	60,16	

Sumber Data: Dinas KBPP&PPPA Tahun 2025

Indeks Gender

Tabel 2.64. Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2022 – 2023

Uraian	2022	2023
IPG (%)	93,4	93,4
IDG (%)	65,92	65,92

Sumber : Dinas PPKBPPPA Tahun 2025

Pembangunan Pemuda

Tabel 2.65. Indeks Pembangunan Pemuda

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Pemuda	60,63	62,59	63	61,34	61,84

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2025

Indeks Pembangunan Pemuda mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dengan menunjukkan perbaikan kondisi pemuda, tetapi terjadi penurunan pada 2023 sebelum sedikit naik lagi pada 2024. Merencanakan program-program yang dapat mendukung potensi pemuda, serta peningkatan pendidikan para pemuda dirasa sangat perlu untuk meningkatkan IPP Lampung Barat kedepannya. Selain itu perlu kebijakan yang lebih konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan pemuda agar mereka mempunyai peran lebih dalam pembangunan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan,

Tabel 2.66. Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2024

Jumlah Penduduk	313.756
Penduduk Produktif	217.666
Non Produktif	96.090
Angka Ketergantungan Penduduk	44,15%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Total jumlah penduduk tercatat sebanyak 313.756 jiwa, yang terdiri dari kelompok penduduk produktif dan non-produktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217.666 jiwa masuk dalam kategori penduduk produktif, yaitu mereka yang berada dalam rentang usia kerja, biasanya 15–64 tahun. Sementara itu, terdapat 96.090 jiwa yang masuk dalam kategori penduduk non-produktif, yaitu mereka yang berada di usia anak-anak (di bawah 15 tahun) atau lanjut usia (di atas 64 tahun).

Angka ketergantungan penduduk tercatat sebesar 44,15%, yang menunjukkan jumlah penduduk non-produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif. Artinya, setiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 44 orang penduduk non-produktif. Angka ini cukup baik, karena semakin rendah angka ketergantungan, semakin ringan beban penduduk produktif dalam menopang penduduk non-produktif.

Rasio ketergantungan yang berada pada level 44,15% menandakan bahwa wilayah ini memiliki potensi demografi yang baik, di mana jumlah tenaga kerja produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang bergantung pada mereka. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja produktif dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penciptaan lapangan kerja yang memadai, peningkatan keterampilan, dan investasi di sektor ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi ini bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan dan layanan sosial bagi kelompok non-produktif.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja

adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi TPAK, antara lain: Upah minimum, Rerata lama sekolah, Penduduk usia kerja.

Pada tahun 2023 TPAK Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebesar 82,01% turun sebanyak 1,16%. Hal tersebut tentunya sejalan dengan kenaikan Tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 TPAK kembali mengalami kenaikan sebesar 82,83% atau naik sebanyak 0,82%

Tabel 2.67. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	83,17	82,01 (↓)	82,83 (↑)

Sumber : BPS Tahun 2025

Jika dilihat dari jumlah angkatan Kerja cenderung mengalami naik turun pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Untuk jumlah angkatan kerja serta jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Penduduk Usia 15+ yang merupakan Angkatan Kerja	Jiwa	194.053	189.541 (↓)	193.092 (↑)
Penduduk Usia 15+ Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	39.275	41.588 (↑)	40.021 (↓)
Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja	Jiwa	189.970	185.269 (↓)	189.049 (↑)
Penduduk Usia 15+ Yang Termasuk Penganggura Terbuka	Jiwa	4.083	4.272 (↑)	4.043 (↓)

Sumber : BPS Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.69. Capaian Indeks Inovasi Daerah

No.	Tahun	Peringkat	Capaian Indeks Inovasi Daerah	
			Nilai	Kategori
1	2020	6	11,288	Terinovatif
2	2021	5	62,8	Sangat Inovatif
3	2022	14	65,39	Sangat Inovatif
4	2023	31	61,46	Sangat Inovatif
5	2024	30	69,93	Sangat Inovatif

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2025

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuasi dalam hal peringkat dan nilai, namun secara kategori masih masuk dalam kategori sangat inovatif. Kategori sangat inovatif berada pada interval nilai 60 – 100.

Capaian Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari 61,46 poin menjadi 69,93 poin. Jumlah Inovasi yang dilaporkan pada Tahun 2024 sebanyak 129 Inovasi Daerah. Beberapa catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan tabel kematangan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 :

- Lampung Barat sebagian besar berada pada parameter nilai maksimal yaitu 3
- Indikator yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan adalah Bimtek Inovasi, Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi Daerah dalam RKPD, Kecepatan Penciptaan Inovasi dan Kualitas Inovasi Daerah.

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Tabel 2.70. Capaian Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	96,06	96,23	108,54	123,87	136,04

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Tahun 2025

Peranan kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap total PDRB selama lima tahun terakhir berada dibawah 3 persen. Pada tahun 2020 kontribusi kategori ini sebesar 1,35 persen dan stabil di tahun 2024 menjadi 1,37 persen. Pada tahun 2024, nilai tambah yang tercipta dari kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sebesar 136,04 miliar rupiah.

Laju pertumbuhan kategori ini selama lima tahun menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi. Dari tahun 2020 sebesar 8,09 persen menjadi 10,25 persen pada tahun 2024. Terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan kunjungan ke penyedia akomodasi maupun penyedia makan minum yang menurun sebagai akibat pandemi Covid-19 menjadi 5,33 persen, dan kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024, dikarenakan kembali normalnya kegiatan di masyarakat setelah pandemi.

Pelaku Ekonomi Kreatif

Tabel 2.71. Pelaku Ekonomi Kreatif

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pelaku Ekonomi Kreatif	na	na	64	64	683

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2025

Sebelum tahun 2022 para pelaku ekonomi kreatif belum terdata dengan baik karena belum pernah ada program ekonomi kreatif dilaksanakan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Masa Covid-19 menjadi salah satu penyebab terbatasnya kegiatan pengumpulan data dan pelatihan terkait ekonomi kreatif. Pada tahun 2022 data mulai dikumpulkan namun dengan pengetahuan terbatas mengenai ekonomi kreatif sehingga data yang didapat hanya sedikit, dan tahun 2024 dengan koordinasi lintas OPD yang tepat dan lebih baik terdata sebanyak 683 pelaku ekonomi kreatif di Lampung Barat. Dari 683 pelaku ekonomi kreatif, subsektor kuliner yang paling banyak pelaku ekrafnya, yaitu sebanyak 455 pelaku yang terbagi menjadi beberapa jenis usaha diantaranya Kedai Makanan, Kedai Minuman, Cafe, Restoran, dan lainnya. Bisnis kuliner memang lebih mudah dimulai dibandingkan subsektor lain, seperti film, animasi, atau pengembang teknologi yang memerlukan keterampilan dan modal yang lebih kompleks. Dengan banyaknya pelaku ekraf di subsektor kuliner menunjukkan bahwa Lampung barat mempunyai keanekaragaman kuliner, dari makanan tradisional hingga makanan modern. Sebagian pelaku ekraf memanfaatkan warisan kuliner daerah sebagai menu utama ataupun makanan kemasan untuk dijual sebagai oleh-oleh.

Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan Kabupaten Lampung Barat tergolong rendah. Pada tahun 2021 tercatat bahwa rasio kewirausahaan daerah ini sebesar 0.1%. Kemudian meningkat menjadi 0.7% pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 menjadi 1,6% dan pada tahun 2024 tercatat angka rasio kewirausahaan Kabupaten Lampung Barat meningkat menjadi 1.88%. Meskipun angka diatas terus meningkat setiap tahunnya, namun masih

sangat jauh dari target pemerintah dimana angka kewirausahaan mencapai 4% dari total populasi.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Kinerja Sektor Perikanan

Tabel 2.72. Capaian Kinerja Sektor Perikanan

No	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	8.850,84	9.935,41	8.940,05	9.349	10.002,36
2	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	475,3	586,2	714,90	750,60	766,2
3	Total Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	9.326,14	10.521,61	9.654,95	10.099,6	10.768,56

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024 pertumbuhan produksi perikanan Kabupaten Lampung Barat yang mencakup dua subsektor, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Secara umum, terjadi peningkatan tren produksi dari tahun ke tahun, meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Perikanan Budidaya menunjukkan peningkatan produksi yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 8.850,84 ton dan meningkat menjadi 9.935,41 ton pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 8.940,05 ton, produksi kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 9.349 ton dan mencapai produksi sebesar 10.002,36 ton pada Tahun 2024. Sektor Perikanan Tangkap juga menunjukkan peningkatan yang relatif baik. Produksi pada tahun 2020 adalah 475,3 ton, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 766,2 ton pada tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2020 dan 2021, yakni dari 475,3 ke 586,2 ton, serta antara tahun 2021 dan 2022, mencapai 714,90 ton.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Kinerja Telekomunikasi

Tabel 2.73. Data telekomunikasi

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
1. Jumlah Pekon dan Kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet	134	134	134	Pekon
2. Jumlah Tower Komunikasi	112	112	116	Unit
3. Jumlah Smartvillage	7	7	7	Pekon/ Kel

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

Berdasarkan tabel di atas tentang Data Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 terdapat peningkatan pada jumlah tower komunikasi yang semula pada tahun 2023 sebanyak 112 menara tower, pada tahun 2024 bertambah 4 unit menjadi 116 menara tower. Sedangkan untuk jumlah pekon dan kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet dan jumlah *smartvillage* tidak mengalami peningkatan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Investasi PMDN/PMA

Tabel 2.74. Capaian Investasi PMDN/PMA

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Investasi PMDN/PMA	113.483.975.551	112.921.542.189	261.030.787.440	119.705.298.159	187.253.670.764

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP Tahun 2025

Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. Sumber investasi secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan Laporan LKPM. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan

mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang disampaikan secara berkala, dikecualikan bagi pelaku usaha skala mikro, perusahaan di bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank dan asuransi.

Kewajiban LKPM dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan bagi pelaku usaha skala kecil dan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) bagi pelaku usaha skala menengah dan besar secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”.

Dari tabel di atas, realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Rata-rata pelaku usaha di Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh skala UMK dengan realisasi investasi < 15 Milyar per tahun, namun kenaikan investasi dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh adanya pembangunan 3 (tiga) pembangkit listrik tenaga minihydro (PLTM) yang saat ini sudah dalam tahap produksi.

Ekspor Barang dan Jasa

Tabel 2.75. Ekspor Barang dan Jasa

Uraian	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	(2,795.23)	(3,082.05)	(3,237.65)

Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan data dalam tabel, diketahui bahwa nilai net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat mengalami tren defisit yang semakin membesar dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai net ekspor tercatat sebesar -2.795,23, kemudian menurun menjadi -3.082,05 pada tahun 2023, dan terus melebar hingga -3.237,65 pada tahun 2024. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat mengimpor lebih banyak barang dan jasa dibandingkan yang diekspornya, sehingga terjadi defisit dalam neraca perdagangan daerah. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk luar daerah dan kemungkinan lemahnya kapasitas produksi atau daya saing komoditas lokal. Jika tren ini tidak segera diatasi, maka dapat berdampak pada kestabilan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produksi lokal, memperkuat sektor UMKM, dan memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan Lampung Barat.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Tabel 2.76. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Infrastruktur /Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	-	-	76,12	62,71

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2025

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat baik yang dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Metode yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPANRB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Layanan Infrastruktur yang dinilai adalah Layanan Air Minum, Kualitas Lingkungan Hidup, Jaringan Listrik, Ruang Terbuka Hijau, Infrastruktur Internet, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Jalan, Transportasi Publik, Infrastruktur Irigasi, Lampu Penerangan Jalan Umum, Layanan Pengelolaan Sampah, dan Drainase.

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat baru dilaksanakan 2 kali pada tahun 2023 dan 2024. Nilai IKLI pada tahun 2024 sebesar 62,71 dengan Mutu pelayanan D atau Berkinerja Tidak Baik. Nilai pada tahun 2024 ini mengalami penurunan 13,41 poin dari tahun 2023.

Dari 12 Layanan Infrastruktur yang dinilai, ada 6 Layanan yang memiliki Mutu pelayanan Berkinerja Tidak Baik (D) yaitu Jembatan, Transportasi Publik, Irigasi, Lampu Penerangan Jalan Umum, Layanan Pengelolaan Sampah, dan Drainase.

Desa Mandiri

Pada Tahun 2024, terdapat peningkatan status pekon sebagai berikut

- a. Terdapat 5 pekon "berkembang" dari 16 pekon (tahun 2023) berubah status menjadi pekon "Maju"
- b. Dari 64 Pekon "Maju" di tahun 2023, terdapat 12 pekon "Maju" yang berubah status menjadi pekon "Mandiri" dan mendapat penambahan 5 pekon "Maju" baru pada tahun 2023
- c. Terdapat penambahan sebanyak 12 pekon "Mandiri" baru dari Tahun 2023 dengan persentase sebesar 8,51%. Hal ini melebihi dari target (Target penambahan 5 Pekon).

Dapat disimpulkan pencapaian pekon Mandiri tahun 2024 sebanyak 63 pekon dari target 56 pekon dengan pencapaian 111,3% atau sebesar 48,1% dari 131 Pekon di kabupaten Lampung Barat telah berstatus Pekon mandiri.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Tabel 2.77. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pajak Daerah (milyar)	11.79	13.05	14.39	14.85	15.82
2	PDRB ADHB (milyar)	7,131.89	7,477.51	8,277.70	9,015.23	9,903.24
3	Rasio Pajak terhadap PDRB	0.17%	0.17%	0.17%	0.16%	0.16%

Sumber : BPS, Tahun 2025

Pajak Daerah terus meningkat setiap tahun, dari Rp11,79 milyar pada 2020 menjadi Rp15,82 milyar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil. Sejalan dengan itu, PDRB ADHB juga mengalami kenaikan signifikan, dari Rp7.131,89 milyar pada 2020 menjadi Rp9.903,24 milyar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir.

Namun, meskipun Pajak Daerah dan PDRB ADHB sama-sama menunjukkan tren peningkatan, Rasio Pajak terhadap PDRB cenderung stagnan pada 0,17% selama periode 2020 hingga 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 0,16% pada 2023 dan 2024. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai nominal pajak daerah bertambah, kontribusinya terhadap total PDRB tidak meningkat, bahkan sedikit menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan PDRB yang lebih cepat dibandingkan peningkatan pajak, atau potensi optimalisasi pengumpulan pajak yang belum maksimal. Dengan demikian, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB perlu menjadi fokus dalam upaya mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

INFLASI

Indeks harga konsumen pada bulan Januari 2019 sebesar 137,77 persen dan pada bulan Desember 2019 sebesar 142,28 persen. Dengan kata lain, selama tahun 2019, terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 3,53 persen.

Tabel 2.78. Tingkat Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Lampung Barat	-	-	-	-	-
Provinsi Lampung	2,00	2,19	5,51	3,47%	1,57%

Sumber : BPS

Keterangan: Tidak terdapat data inflasi tahun 2020 s.d 2024 dikarenakan BPS Kabupaten Lampung Barat tidak melakukan perhitungan untuk kabupaten pada tahun 2020 s.d 2024.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Indeks RB	54.56	55.06	57.35	61.28	70.74
2	Nilai SAKIP	64.52	67.15	67,97	66.41	67.25

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Indeks RB menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu dari 57,35 pada 2022 menjadi 61,28 pada 2023, dan selanjutnya mencapai 70,74 pada 2024. Tren ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya reformasi birokrasi, yang dapat mengindikasikan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi, dan transparansi.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lampung Barat selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil namun signifikan dari sisi evaluasi kinerja birokrasi. Pada tahun 2022, nilai SAKIP berada di angka 67,97, kemudian mengalami penurunan menjadi 66,41 di tahun 2023, yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Namun, pada tahun 2024, nilai tersebut meningkat kembali menjadi 67,25, yang meskipun belum melampaui capaian tahun 2022, menunjukkan adanya perbaikan atau upaya perbaikan dari sisi tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun terdapat upaya menuju perbaikan, konsistensi dan penguatan sistem manajemen kinerja masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Upaya perwujudan reformasi birokrasi dilakukan melalui 2 arah, yaitu dari arah hulu dan dari arah hilir. Dari arah hulu, ditetapkan reformasi birokrasi general, berisi berbagai kegiatan utama yang menjadi mandatory pemerintah seperti indeks SPBE, Implementasi SAKIP, pelaksanaan sistem kerja baru, pembangunan ZI, dan lain sebagainya. Tujuan RB general adalah perbaikan sistem dan tata kelola internal. Dari arah hilir, ditetapkan reformasi birokrasi tematik. RB tematik bertujuan mengatasi masalah tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tema-tema RB yang akan di evaluasi ditetapkan oleh Kementerian PANRB, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan (penanganan stunting), serta percepatan prioritas aktual presiden (P3DN). Tematik ini mengalami perubahan per tahun 2026, menyesuaikan dengan kebutuhan dan asta cita presiden dan wakil presiden. Kebijakan spesifik yang diusulkan adalah kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh ASN di Kabupaten Lampung Barat. Tujuannya adalah memahami konteks RB dari hulu ke hilir, memahami peran yang dapat dilakukan baik sebagai individu atau sebagai bagian dari suatu organisasi, baik untuk RB general maupun untuk RB tematik.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 2.79. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

NO	NAMA INSTANSI	INDEK SPBE	PREDIKAT
1	Pemerintah Provinsi Lampung	4,09	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab.Lampung Tengah	2,68	Baik

NO	NAMA INSTANSI	INDEK SPBE	PREDIKAT
3	Pemerintah Kab.Lampung Utara	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab.Lampung Barat	2,62	Baik
5	Pemerintah Kab.Tanggamus	3,44	Baik
6	Pemerintah Kab. Way kanan	3,52	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,85	Baik
8	Pemerintah Kab.Pringsewu	3,05	Baik
9	Pemerintah Kab.Mesuji	3,99	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab.Metro	3,34	Baik
11	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,98	Baik

Sumber : Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendapatkan nilai indeks SPBE sebesar 2,62 poin dengan predikat baik. Nilai indeks SPBE tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibandingkan tahun 2023 dengan nilai indeks SPBE 2,75 poin predikat baik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa poin dalam penilaian SPBE yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sehingga berdampak pada menurunnya Nilai Indeks SPBE tahun 2024, sebagai berikut:

1. **Perencanaan Strategis SPBE:** Meskipun sudah ada dokumen Rencana Induk SPBE 2019-2024, dokumen tersebut belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE secara lengkap, seperti proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.
2. **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):** Meskipun beberapa aplikasi SPBE sudah dibangun dan terdapat SOP pembangunan aplikasi, proses pembangunan aplikasi belum mengikuti siklus pengembangan sistem yang terstruktur (SDLC). Selain itu, meskipun ada kerja sama terkait pemanfaatan sertifikat elektronik, bukti penggunaan API masih kosong. Layanan pusat data dan jaringan intra instansi sudah ada, tetapi belum ada prosedur baku dan penerapan di seluruh unit kerja.
3. **Penyelenggara SPBE:** Meskipun Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk, belum ada dokumen program kerja yang jelas. Program kerja tim dilaksanakan tanpa perencanaan yang terstruktur dan belum ada kolaborasi penerapan SPBE di instansi terkait.
4. **Manajemen SPBE:** Aspek manajemen seperti manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan sudah diterapkan, namun tanpa program kegiatan yang terencana dan pedoman yang jelas karena belum ada dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE.

5. **Audit TIK:** Meskipun sudah ada tim asesor internal untuk pemantauan dan evaluasi SPBE, audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE belum dilaksanakan.

Kinerja Statistik

Tabel 2.80. Data statistik sektoral

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
1. Jumlah data Statistik sektoral	300	238	230	Buku

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

Berdasarkan tabel di atas tentang data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatik melakukan pencetakan buku Lampung Barat Dalam Angka (LBDA) dan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didistribusikan kepada seluruh OPD di Kabupaten Lampung Barat untuk dipergunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Jumlah data statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebanyak 230 buku. Data tersebut menunjukkan penurunan jumlah buku sebanyak 8 buku dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah 238 buku. Hal tersebut disebabkan kurangnya anggaran untuk melakukan pencetakan buku.

Kinerja Persandian

Tabel 2.81. Data Persandian

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
1. Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	-
2. Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber DayaKeamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Kec	15 Kec	15 Kec	Kec
3. Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	Ruang
4. Jumlah Penyediaan			12 Bulan	Bulan

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan		

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota, jumlah pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dan jumlah penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada indikator kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu pemeliharaan rutin berkala peralatan komunikasi sandi posko lambara di 15 kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Pada indikator ketiga, kegiatan yang dilakukan yaitu pelaksanaan rutin standar keamanan ruang kerja pimpinan (kontra penginderaan) yang meliputi Ruang Kerja Bupati, Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Kerja Sekretaris Daerah. Pada indikator keempat, merupakan kegiatan bantuan komunikasi (bankom) kebencanaan yang tersebar pada tiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

Indeks Pelayanan Publik

Tabel 2.82. Indeks Pelayanan Publik

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2024
Indeks Pelayanan Publik	belum	belum	3.46	4.07	3,09

Sumber data : Setdakab Lampung Barat Tahun 2024

Indeks Integritas Nasional

Tabel 2.83. Capaian Indeks Integritas Nasional

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Integritas Nasional	-	-	70.92	69.09	70,23

Sumber : Inspektorat Daerah tahun 2025

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Kesadaran berintegritas atau kehidupan berintegritas adalah wujud algoritma integritas seperti halnya algoritma yang membaca pola aktivitas atau kebiasaan kita saat menggunakan gadget.

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah menjalankan prinsip transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran, serta upaya sosialisasi antikorupsi. Survei ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang integritas masing-masing lembaga dan mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan persepsi korupsi di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

KPK menilai bahwa tanpa adanya perbaikan signifikan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, upaya untuk mengurangi praktik korupsi akan terus menemui jalan buntu. Dengan demikian, di masa mendatang, nilai integritas lembaga tidak hanya mencerminkan kinerja internal, tetapi juga menjadi indikator utama bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Rilis SPI terbaru ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas di setiap lapisan pemerintahan. Harapannya, dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang lebih tegas, Indonesia dapat melangkah lebih jauh menuju era pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi. SPI bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan cermin dari budaya kerja dan komitmen antikorupsi yang harus terus diperkuat di setiap lini pemerintahan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan integritas demi Indonesia yang lebih baik

Pada Tahun 2020 dan 2021 KPK belum melakukan survey terhadap Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan Tahun 2022 sampai dengan sekarang terus dilaksanakan dengan sistem Pemda Lampung Barat memberikan data SDM (Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pihak Ketiga) dan KPK akan melakukan survey integritas secara acak dari data yang telah disampaikan. Naik turunnya dari skors yang didapatkan Pemda tergantung dari tingkat partisipasi (responden) yang telah dilaksanakan oleh KPK.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansi

Kinerja Kesbangpol

Tabel 2.84. Kinerja Kesbangpol

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA yang terjadi	0	0	0
2	Jumlah LSM	381	405	429
3	Jumlah Parpol	19	19	19

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2025

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Tabel 2.85. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Tahun			Satuan
	2022	2023	2024	
1. Jumlah Pelanggaran K3	106	60	60	Kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

Dari data table diatas dapat kami jelaskan terkait data Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Lampung Barat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan priode Januari s/d Desember 2024 terdata sebanyak 60 kasus atas pengawasan, penanganan, laporan, pengaduan yang dilakukan dengan proses penyelesaian kasus Nonyustisi/ pembinaan adapun jenis perda/ perbub yaitu Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan tertentu terdapat sebanyak 3 Kasus Pelanggaran, Perda NO 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum terdapat sebanyak 22 kasus pelanggaran, Perda No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat sebanyak 35 kasus pelanggaran.

Kinerja Hukum

Tabel 2.86. Capaian Kinerja Hukum

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	na	na	na	na	77,18 (BB)
2	Persentase Capaian Aksi HAM	66,64 (C)	na	85,45(B)	83,3 (B)	83,45 (B)

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan data terkait Indeks Reformasi Hukum dan Persentase Capaian Aksi HAM dari tahun 2020 hingga 2024. Pada Indeks Reformasi Hukum, data hanya tersedia pada tahun 2024 dengan nilai 77,18 yang termasuk dalam kategori BB, sementara tidak ada data yang dilaporkan pada tahun 2020 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran atau pelaporan indikator ini baru dilakukan pada tahun 2024 atau adanya kendala dalam pengumpulan data pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai yang diperoleh pada 2024 menunjukkan pencapaian

yang cukup baik, meskipun tanpa data sebelumnya sulit untuk menilai tren kinerja dari waktu ke waktu.

Sementara itu, pada Persentase Capaian Aksi HAM, terlihat adanya tren positif dari tahun 2020 ke 2022. Tahun 2020 mencatatkan capaian sebesar 66,64 dalam kategori C, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 85,45 dalam kategori B pada 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, meskipun nilainya sedikit menurun menjadi 83,3 dan 83,45, capaian tersebut tetap berada dalam kategori B, menunjukkan kestabilan kinerja yang cukup baik setelah peningkatan sebelumnya.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah

Tabel 2.87. Capaian Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Daya Saing Daerah	-	-	2,56	2,91	3,42

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2025

Indeks Daya Saing daerah (IDSD) merupakan instrument pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi kedalam 12 pilar. Dengan mengukur menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian/ Lembaga.

Pilar – pilar yang diukur meliputi institusi, infrastruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamika Bisnis, dan Kapabilitas Inovasi.

Penilaian IDSD Kabupaten Lampung Barat baru diukur pada Tahun 2022 dengan Nilai IDSD mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada Tahun 2024 ada 3 pilar dibawah nilai 3, yaitu :

- Pilar 8 yaitu Pasar tenaga Kerja dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 2,57. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2,72. Dengan indikator yang mengalami penurunan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif, Upah Pekerja dan Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki.
- Pilar 9 yaitu Sistem Keuangan dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 1,14. Indikator pilar ini meliputi Persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku, Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat dan Persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB.
- Pilar 12 yaitu Kapabilitas Inovasi dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 1,34. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 0,88. Pada pilar 12 ini, perlu peningkatan pada indikator pengembangan kluster, publikasi ilmiah, Aplikasi Kekayaan intelektual (KI), Indeks keunggulan lembaga riset dan Aplikasi merek dagang.

2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

Tabel 2.88. Capaian RPD Tahun 2023-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi	4,69%	4.36%
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	28,860,000	31,350,000
			Gini Rasio	0.274	0,290
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	11.12%	10,68
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2.25%	2,09
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		indeks pembangunan manusia (IPM)	71.72	72,41
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.72	72,41

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Realisasi 2023	Realisasi 2024
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,12 poin	67,71
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55	73,09
			Indeks Resiko Bencana	176,61	176,28
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,12 poin	67,71
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55	73,09
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	176,61	176,28
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	61,28 poin	70,74
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	61,28 poin	70,74
			Nilai SAKIP	66,41	67,25
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,09 poin	3,90
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,58.	90,50

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Realisasi 2023	Realisasi 2024
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,58.	90,50
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	11,24%	12.25
			Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	3,22%	5.32

Sumber : data diolah tahun 2025

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Lampung Barat memaparkan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, makna dari pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam hal ini masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Pada bab ini akan memaparkan terkait penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan berdasarkan bidang urusan wajib Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi pangkal munculnya pelayanan dasar.

Sesuai hasil entry pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> maka capaian SPM Lampung Barat.

Tabel 2.89. Capaian SPM Tahun 2024

No	NAMA	CAPAIAN
	KAB. LAMPUNG BARAT	82,31 %
1	PENDIDIKAN	70,77 %
2	KESEHATAN	93,11 %
3	PEKERJAAN UMUM	91,49 %
4	PERUMAHAN RAKYAT	50,00 %
5	TRANTIBUMLINMAS	96,24 %
6	SOSIAL	92,25 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar dalam SPM adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Selanjutnya Mutu Pelayanan Dasar dalam SPM adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pencapaian SPM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 82,31%. Dimana pencapaian SPM terbesar sebesar 96,24% pada urusan Trantibumlinmas dan pencapaian SPM terendah sebesar 50,00% pada urusan Perumahan Rakyat. Pencapaian yang tidak sesuai target ini dipengaruhi oleh pencapaian pada jenis pelayanan dasar dalam SPM yang memiliki bobot penilaian sebesar 80% dan sisanya dipengaruhi oleh pencapaian dari mutu pelayanan dasar dalam SPM sebesar 20%.

Tabel 2.90. Rincian Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	URAIAN	CAPAIAN
1	PAUD	57,45 %
2	Pendidikan Dasar	95,33 %
3	Pendidikan Kesetaraan	59,53 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 berdasarkan Raport Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebesar **70,49% dengan kategori tuntas pratama** sedangkan capaian berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagri, untuk PAUD tercapai 57,45%, dari perbandingan 100% maka ada sekitar 42,55% dalam hal ini jika dilihat dari data berarti Proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di Lampung Barat masih kurang.

Untuk Capaian Pendidikan Dasar berdasarkan hasil entry pada aplikasi Bangda Kemendagri adalah sebesar 95,33%, jika dilihat dari ketercapaian Pendidikan Dasar dapat dikategorikan Tinggi, sedangkan Capaian Pendidikan Kesetaraan masih rendah pada tahun 2024 dengan capaian 59,53%. Dalam hal ini Langkah-langkah yang harus dilakukan Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan ketercapaian SPM dengan melakukan berbagai pembenahan diantaranya melakukan sinkron data antara Disdukcapil dengan Data Pokok Pendidikan ataupun melakukan pendataan mandiri dengan melibatkan kecamatan/pekon, Membangun Kerjasama dengan Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan, Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus, Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, Pengajuan formasi guru ASN ataupun melakukan penataan/pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.91. Rincian Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,80 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,96 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,48 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	94,95 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93,16 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	95,08 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	96,14 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	91,19 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	89,92 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	94,46 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92,78 %

No	URAIAN	CAPAIAN
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	85,43 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Urusan Kesehatan pada tahun 2024 berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagr sebesar 93,11% dengan kategori pencapaian Tuntas Utama. Hasil pencapaian rata-rata dari 12 indikator kinerja/ jenis layanan SPM kesehatan ini diperoleh dari hasil jumlah persentase pencapaian layanan dasar dengan bobot 80% dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20%. Hal yang sangat berpengaruh pada nilai capaian SPM urusan Kesehatan ini adalah belum tercapainya secara maksimal terhadap pencapaian penerima layanan dasar pada setiap indikator kinerjanya. Pencapaian penerima layanan dasar terendah terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yaitu sebesar 66,68% sedangkan pencapaian tertinggi terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif yaitu sebesar 99,47%. Selanjutnya Pencapaian mutu minimal layanan dasar terendah terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yaitu sebesar 14,55% sedangkan pencapaian tertinggi terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut yaitu sebesar 20,00%.

Tabel 2.92. Rincian Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	85,73 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	97,25 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2024 berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagr sebesar 91,49% dengan kategori pencapaian Tuntas Utama. Dapat dijelaskan bahwa nilai capaian SPM urusan Pekerjaan Umum pada capaian indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar 97,25% dengan pencapaian penerima layanan dasar sebesar 77,80% ditambah dengan pencapaian mutu minimal layanan dasarnya sebesar 19,45%. Selanjutnya nilai capaian SPM urusan Pekerjaan Umum pada capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar 85,73% dengan pencapaian penerima layanan dasar sebesar 70,78% ditambah dengan pencapaian mutu minimal layanan dasarnya sebesar 14,94%.

Tabel 2.93. Rincian Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Urusan Perumahan rakyat pada tahun 2024 berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagr sebesar 50%% dengan kategori pencapaian Belum Tuntas. Dapat dijelaskan bahwa nilai capaian SPM urusan Perumahan rakyat belum tuntas dikarenakan pencapaian indikator kinerja Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 0% yang diakibatkan pada entry aplikasi SPM membutuhkan penjelasan dan penginputan berkenaan dengan 4 tahapan SPM yaitu bukti dukung pendataan, perhitungan, perencanaan, dan pelaksanaan. Hal ini belum dilakukan pada urusan perumahan rakyat sehingga disaat Pemerintah Daerah tidak mempunyai program relokasi yang dianggarkan dalam APBD maka pada aplikasi SPM meminta untuk melampirkan form 4 tahapan SPM tersebut. Sedangkan pada indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota mencapai nilai 100% walaupun tidak ada pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Hal ini dikarenakan Anggaran rehabilitasi rumah bagi korban bencana telah dianggarkan dalam APBD dan telah melampirkan SK bencana pada tahun 2024 dalam aplikasi SPM.

Tabel 2.94. Rincian Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	95,33 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	94,20 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	89,93 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	96,60 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100 %

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 95,33%. Nilai ini diperoleh dari hasil persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80% dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 15,33%.

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar urusan bencana pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 pada Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana mencapai 94.20% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) dengan target 1 dokumen, dapat direalisasikan pada triwulan ke IV, persentase capaian 100%
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana dengan target 312.990 orang, terealisasi 312.990 orang, persentase capaian sebesar 100% yang teridentifikasi sesuai dengan informasi yang tertulis dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia), dengan target 176 orang terealisasi 164 orang, persentase capaian sebesar 93.18%,
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana dengan target 30 Unit, terealisasi sebanyak 30 Unit dengan persentase capaian 100%.

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (damkar) mencapai nilai 100%. Nilai ini diperoleh dari hasil pencapaian penerima layanan dasar yang sesuai target total yang harus dilayani sebanyak 120 orang dan pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100%.

Realisasi pencapaian SPM urusan bencana pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 pada indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencapai 89.93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) target pengadaan sarana dan prasarana tahun 2024 sebanyak 38 Unit terealisasi 38 unit dengan persentase capaian 100%. Progres kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada triwulan ke IV sudah sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas yang telah disusun termasuk pemasangan 30 Rambu evakuasi bencana.
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) Pada kegiatan Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target peserta 26 orang di Kecamatan Balik Bukit namun hanya terelisasi sebanyak 14 Peserta.

Realisasi pencapaian SPM urusan bencana pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 pada indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencapai 89.93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana), pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana), target pada tahun 2024 sebanyak 2 orang, namun ada 5 orang yang menjadi korban bencana, baik bencana alam maupun non alam
3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) target pada tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen terealisasi sebanyak 18 Dokumen
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana, target pada tahun 2024 sebanyak 2 orang, namun ada 5 orang yang menjadi korban bencana, baik bencana alam maupun non alam

Tabel 2.95. Rincian Capaian SPM Urusan Sosial

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	95,38 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	91,67 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	93,85 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	88,33 %
5	Pelindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	92,00 %

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Dari 5 jenis indikator kinerja dan jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial sudah hampir tercapai semua target dan realisasinya. Seluruh persentase pencapaian penerima layanan dasar mencapai nilai 80%, akan tetapi pada pencapaian mutu/Jasa/SDM pada layanan dasar SPM tidak dapat terisi semua sehingga formulasi pada pencapaian total dalam aplikasi tidak mencapai nilai 100% mengikuti jumlah mutu layanan yang terisi. Contohnya untuk SPM lansia, hanya diberikan permakannya saja tapi tidak memberikan sandang pengobatan dan lain sebagainya.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah menjadi salah satu aspek strategis yang diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, sinergi antar daerah maupun dengan berbagai pihak eksternal menjadi kunci utama untuk mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Lampung Barat menyadari bahwa berbagai tantangan pembangunan yang kompleks tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga diperlukan kerjasama yang kokoh dan berkelanjutan dengan berbagai mitra strategis.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengupayakan kerjasama yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah guna memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kerjasama ini meliputi kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota tetangga, pemerintah pusat, hingga lembaga swasta dan masyarakat sipil. Melalui sinergi tersebut, diharapkan dapat tercipta efisiensi sumber daya, pertukaran informasi, serta inovasi bersama yang menunjang percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, kerjasama daerah juga diarahkan untuk memperluas akses investasi dan meningkatkan daya saing Kabupaten Lampung Barat di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah daerah secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, serta lembaga internasional yang memiliki kepentingan dan visi yang sejalan dengan program pembangunan Kabupaten. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, memperkuat basis industri lokal, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kerjasama daerah juga menjadi pijakan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan daerah sekitarnya dalam mengelola kawasan hutan, sumber daya air, dan ekosistem penting lainnya secara terpadu. Hal ini akan membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas wilayah dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan ekologis.

Kerjasama daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan administratif, melainkan sebagai strategi pembangunan yang fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penguatan kemitraan dan sinergi dengan berbagai pihak, Kabupaten Lampung Barat optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah. Kerjasama yang terjalin diharapkan

menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi dinamika pembangunan di masa depan.

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Lampung Barat

Dukungan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD Provinsi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Lampung Barat. Sumber pembiayaan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merealisasikan berbagai program strategis yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, berbagai inisiatif pembangunan akan sulit terealisasi secara optimal, sehingga berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

APBN dan APBD Provinsi tidak hanya berperan sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat menciptakan sinergi yang kuat. Hal ini memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan dan menghindari tumpang tindih program, sehingga target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Lebih jauh, dukungan dari APBN dan APBD Provinsi menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang memadai, Kabupaten Lampung Barat dapat melaksanakan program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar 10 program prioritas yang perlu didanai oleh APBN dan APBD Provinsi Lampung Barat selama periode 2026–2030 :

1. Pengembangan Pasar Tematik Danau Ranau

Pasar Tematik Danau Ranau, yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung, merupakan proyek strategis yang menggabungkan sektor pariwisata, perdagangan, dan budaya. Dengan anggaran sebesar Rp70 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pasar ini diharapkan menjadi pusat ekonomi kreatif yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pembangunan fisik pasar telah mencapai 30% pada Oktober 2024, dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Setelah selesai, pasar ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain sebagai pusat perdagangan, pasar tematik ini juga berfungsi sebagai destinasi wisata yang memperkenalkan produk lokal dan budaya Lampung Barat. Dengan adanya integrasi antara pasar dan sektor pariwisata, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.

2. Pembangunan Wisma Sindalapai sebagai Tourist Information Centre

Wisma Sindalapai, yang terletak di kawasan wisata Lumbok Seminung, berfungsi sebagai pusat informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat. Sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata, wisma ini menyediakan informasi mengenai destinasi wisata, akomodasi, dan budaya lokal. Dengan fasilitas yang memadai, Wisma Sindalapai diharapkan dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memperkuat citra Lampung Barat sebagai destinasi wisata unggulan.

Pembangunan dan pengelolaan Wisma Sindalapai memerlukan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi untuk memastikan fasilitas yang berkualitas dan pelayanan yang optimal. Selain itu, pelatihan bagi staf pengelola juga penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan informasi dan layanan kepada wisatawan.

3. Peningkatan Infrastruktur Jalan Trans Sumatera

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan Trans Sumatera di Lampung Barat sangat krusial untuk mendukung mobilitas barang dan orang. Dengan akses yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan menarik investasi ke daerah. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai guna merealisasikan proyek ini.

Selain itu, perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap jalan yang telah dibangun juga penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur tersebut. Partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga diperlukan untuk mencegah kerusakan dan memastikan jalan tetap dalam kondisi baik.

4. Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian

Lampung Barat memiliki sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Untuk mendukung produktivitas pertanian, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sangat diperlukan. Dengan sistem irigasi yang efisien, petani dapat mengelola sumber daya air dengan baik, meningkatkan hasil pertanian, dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi, serta menyediakan pelatihan bagi petani dalam pengelolaan sumber daya air. Kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat juga penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci untuk mendorong pembangunan daerah. Melalui program pendidikan dan pelatihan, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia kerja. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu juga penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Dengan SDM yang berkualitas, Lampung Barat dapat mengembangkan berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

6. Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit di Lampung Barat sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian akibat penyakit.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, perawatan, dan pengadaan peralatan medis. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan dan pendidikan juga penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal.

7. Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Internet

Di era digital, akses terhadap informasi dan komunikasi sangat penting. Pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet di Lampung Barat akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi, pendidikan, dan layanan publik secara online. Selain itu, jaringan internet yang baik juga mendukung perkembangan sektor ekonomi digital dan UMKM.

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan dukungan pendanaan dari APBN

dan APBD Provinsi, diharapkan infrastruktur telekomunikasi di Lampung Barat dapat berkembang pesat.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan

Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, pertambangan, dan perikanan. Untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatannya, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelestariannya.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga sangat diperlukan. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alam dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

9. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur dan Kurikulum

Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi untuk pembangunan daerah. Peningkatan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, pembaruan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman juga penting untuk mencetak generasi yang kompeten.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, serta penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan teknologi. Dengan pendidikan yang berkualitas, diharapkan dapat tercipta SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan global.

10. Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan sumber energi yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan panel surya di Lampung Barat dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk mendapatkan pendanaan dan teknologi dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Dengan dukungan APBN dan APBD Provinsi, diharapkan Lampung Barat dapat menjadi daerah yang mandiri dalam penyediaan energi.

2.1.8 BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Kabupaten Lampung Barat memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. BUMD ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal, penyedia layanan publik, dan mitra strategis dalam implementasi program-program pembangunan.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat didirikan pada 15 September 2015, BPRS ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan berbasis syariah, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan prinsip kehati-hatian dan fokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, BPRS diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat sektor riil di Lampung Barat.

Selain itu, PT. Pesagi Mandiri Perkasa juga memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai pengelola destinasi wisata dan pusat ekonomi lokal, PT. Pesagi Mandiri Perkasa dapat mendukung program-program unggulan dalam RPJMD, seperti pengembangan pasar tematik dan destinasi wisata berbasis budaya. Dengan penguatan kapasitas dan profesionalisme, BUMD ini dapat menjadi mitra utama dalam meningkatkan daya tarik wisata dan kontribusi ekonomi daerah.

Perumda Air Minum Limau Kunci merupakan BUMD yang fokus pada penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Dalam konteks RPJMD, peran Perumda ini sangat vital dalam mendukung program pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi operasional, Perumda dapat memastikan akses air bersih yang merata dan berkualitas, yang merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan.

PT. Bank Lampung juga berperan dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan layanan perbankan dan pembiayaan. Sebagai mitra strategis, PT. Bank Lampung dapat berkolaborasi dengan BUMD lainnya dalam mendanai proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Sinergi antara BUMD ini akan memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mempercepat realisasi program-program dalam RPJMD.

Secara keseluruhan, BUMD di Lampung Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan peran strategis masing-masing, BUMD ini dapat berkolaborasi secara

sinergis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas BUMD menjadi kunci utama dalam memastikan kontribusi positif mereka terhadap pembangunan daerah.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Kinerja Pelaksanaan APBD

Tabel 2.96.
Realisasi APBD Tahun 2020 s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1.	PENDAPATAN DAERAH	1,011,011,754,760	1,007,143,618,928	1,024,279,168,592	985,835,507,765	1,111,191,957,434
5.1.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61,219,465,454	71,498,892,558	70,315,342,633	68,747,829,755	71,823,776,728
5.1.1.1.1.	Pajak Daerah	11,794,800,883	13,052,711,728	14,390,450,282	14,854,325,262	15,820,932,765
5.1.1.1.2.	Retribusi Daerah	3,018,063,766	3,516,611,279	2,237,859,703	2,305,628,800	2,166,946,349
5.1.1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4,809,979,700	5,923,153,837	5,569,077,716	5,653,827,321	5,854,018,935
5.1.1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41,596,621,105	49,006,415,713	48,117,954,933	45,934,048,372	47,981,878,679
5.1.1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	895,400,401,306	899,997,134,370	941,241,799,959	917,087,678,010	1,039,368,180,706
5.1.1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	707,243,876,702	844,790,713,397	870,256,487,463	855,646,664,112	956,625,034,394
5.1.1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62,140,456,604	55,206,420,973	70,985,312,496	61,441,013,898	82,743,146,312
5.1.1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	126,016,068,000	-	-	-	-
5.1.1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	54,391,888,000	35,647,592,000	12,722,026,000	-	-
5.1.1.3.1.	Hibah	-	-	12,722,026,000	-	-
5.1.1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54,391,888,000	35,647,592,000	-	-	-
5.1.2.	BELANJA DAERAH	984,638,003,140	1,025,317,695,529	1,081,589,995,536	984,408,509,394	1,068,232,029,401
5.1.2.1.	BELANJA OPERASI	636,827,545,344	709,118,209,923	715,281,044,749	693,087,941,502	734,513,264,699
5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	424,325,254,536	399,752,460,194	395,256,776,924	413,304,423,702	444,086,680,344

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	198,758,705,808	283,144,415,580	293,591,618,382	243,672,753,950	247,658,956,652
5.1.2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	4,469,946,021	3,555,499,062	2,534,971,060
5.1.2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	522,500,000	-	-
5.1.2.1.5.	Belanja Hibah	13,493,585,000	22,250,295,549	19,513,941,922	32,310,714,788	40,232,656,643
5.1.2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	250,000,000	3,971,038,600	1,926,261,500	244,550,000	-
5.1.2.2.	BELANJA MODAL	140,869,506,620	132,249,602,506	191,561,287,922	117,007,426,132	155,348,663,663
5.1.2.2.1.	Belanja Modal Tanah	239,570,000	1,152,130,400	-	-	-
5.1.2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,402,844,896	23,110,102,932	37,544,778,356	23,471,410,062	20,116,516,662
5.1.2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42,336,328,293	35,286,366,461	41,842,220,791	20,128,517,180	88,928,047,259
5.1.2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48,597,784,030	68,608,479,260	107,650,228,900	67,418,166,745	41,372,206,332
5.1.2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,292,979,401	4,092,523,453	3,821,418,300	5,836,651,645	4,734,413,410
5.1.2.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	702,641,575	152,680,500	197,480,000
5.1.2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,108,088,093	2,220,535,100	2,417,830,965	1,508,132,360	1,961,201,439
5.1.2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	22,108,088,093	2,220,535,100	2,417,830,965	1,508,132,360	1,961,201,439
5.1.2.4.	BELANJA TRANSFER	184,832,863,083	181,729,348,000	172,329,831,900	172,805,009,400	176,408,899,600
5.1.2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	1,317,346,400	1,830,761,000	1,475,794,900	1,634,829,400	1,692,863,600
5.1.2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	183,515,516,683	179,898,587,000	170,854,037,000	171,170,180,000	174,716,036,000
	SURPLUS / (DEFISIT)	26,373,751,620	- 18,174,076,601	- 57,310,826,944	1,426,998,371	42,959,928,033
5.1.4.	PEMBIAYAAN					
5.1.4.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,251,996,908	77,278,865,778	114,951,176,859	48,174,340,190	30,683,213,321
5.1.4.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35,251,996,908	57,625,748,528	56,959,356,109	48,174,340,190	30,683,213,321
5.1.4.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	19,653,117,250	57,991,820,750	-	-
5.1.4.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,000,000,000	2,145,433,068	9,466,009,725	18,918,125,240	19,918,098,140
5.1.4.2.1.	Penyertaan Modal Daerah	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
5.1.4.2.2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	145,433,068	7,466,009,725	17,918,125,240	17,918,098,140
		-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	31,251,996,908	75,133,432,710	105,485,167,134	29,256,214,950	10,765,115,181

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	57,625,748,528	56,959,356,109	48,174,340,190	30,683,213,321	53,725,043,214

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

Neraca Daerah

Tabel 2.97.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.1.	ASET					
5.3.1.1.	A. Aset Lancar	92,790,480,221	96,424,355,015	76,200,542,730	92,436,350,840	125,023,378,725
5.3.1.2.	B. Investasi Jangka Panjang	39,151,070,830	40,961,012,190	41,955,870,815	41,330,213,726	42,716,307,711
5.3.1.3.	C. Aset tetap	2,370,966,719,945	2,372,746,206,811	2,540,752,455,850	2,558,944,191,578	2,540,973,890,596
5.3.1.5.	D. Aset Lainnya	132,469,111,769	136,382,645,507	184,239,405,289	225,439,714,024	197,386,200,458
	JUMLAH ASET	2,635,377,382,764	2,646,514,219,524	2,843,148,274,683	2,918,150,470,168	2,906,099,777,491
5.3.2.	KEWAJIBAN					
5.3.2.1.	A. Kewajiban Jangka Pendek	9,676,234,788	17,404,915,165	24,112,385,891	29,937,934,224	39,433,935,209
5.3.2.2.	B. Kewajiban jangka Panjang	302,089,601	17,763,394,438	52,261,014,935	34,342,951,595	16,424,888,255
	JUMLAH KEWAJIBAN	9,978,324,389	35,168,309,603	76,373,400,826	64,280,885,819	55,858,823,464
5.3.3.	EKUITAS	2,625,399,058,375	2,611,345,909,921	2,766,774,873,858	2,853,869,584,349	2,850,240,954,026
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,635,377,382,764	2,646,514,219,524	2,843,148,274,683	2,918,150,470,168	2,906,099,777,491

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

Kerangka Pendanaan

Tabel 2.98.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2025 s.d 2030
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1,107,753,893,942	1,268,267,203,024	1,450,265,866,780	1,553,815,620,593	1,667,963,972,006	1,785,657,113,172
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	89,878,015,942	91,874,203,302	96,467,913,467	101,291,309,140	106,355,874,597	111,673,668,327
1.1.1	Pajak Daerah	35,238,479,989	36,042,958,802	37,845,106,742	39,737,362,079	41,724,230,183	43,810,441,692
1.1.2	Retribusi Daerah	42,942,841,783	46,721,444,500	49,057,516,725	51,510,392,561	54,085,912,189	56,790,207,799
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5,854,018,934	3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,842,675,236	6,109,800,000	6,415,290,000	6,736,054,500	7,072,857,225	7,426,500,086
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,017,875,878,000	1,176,392,999,722	1,353,797,953,313	1,452,524,311,452	1,561,608,097,409	1,673,983,444,845
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	936,357,070,000	1,077,724,795,115	1,250,196,338,475	1,343,742,615,872	1,447,387,317,050	1,554,051,625,468
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81,518,808,000	98,668,204,608	103,601,614,838	108,781,695,580	114,220,780,359	119,931,819,377

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya						
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
5	BELANJA DAERAH	1,104,835,231,322	1,273,348,540,404	1,473,265,866,780	1,576,815,620,593	1,690,963,972,006	1,808,657,113,172
5.1	BELANJA OPERASI	815,125,033,734	888,079,324,912	1,027,509,384,455	1,099,729,143,907	1,179,341,205,274	1,261,425,401,875
5.1.01	Belanja Pegawai	498,508,061,452	507,769,644,932	587,489,479,186	628,781,177,231	674,298,646,651	721,229,832,458
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297,574,355,239	360,189,315,437	416,740,643,492	446,032,521,986	478,323,484,892	511,616,848,155
5.1.03	Belanja Bunga	3,079,314,290	3,079,314,290	3,562,766,634	3,813,175,686	4,089,211,474	4,373,820,593
5.1.05	Belanja Hibah	15,933,302,753	16,981,050,253	19,647,075,143	21,027,969,819	22,550,184,554	24,119,677,399
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30,000,000	60,000,000	69,420,000	74,299,185	79,677,703	85,223,271
5.2	BELANJA MODAL	113,081,887,138	208,640,905,043	241,397,527,134	258,364,152,329	277,067,133,316	296,351,005,795
5.2.01	Belanja Modal Tanah		200,140,000	231,561,980	247,837,314	265,778,257	284,276,424
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,030,913,276	35,170,881,240	40,692,709,594	43,552,796,688	46,705,583,640	49,956,292,262
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,249,915,928	41,771,010,107	48,329,058,694	51,725,866,584	55,470,302,066	59,331,035,090
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52,714,541,704	126,252,155,596	146,073,744,025	156,340,537,123	167,658,028,606	179,327,027,397

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,716,516,230	4,691,718,100	5,428,317,842	5,809,847,161	6,230,421,997	6,664,059,368
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	370,000,000	555,000,000	642,135,000	687,267,458	737,018,750	788,315,255
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,147,413,550	2,647,413,550	3,063,057,477	3,278,344,472	3,515,663,828	3,760,354,031
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,147,413,550	2,647,413,550	3,063,057,477	3,278,344,472	3,515,663,828	3,760,354,031
5.4	BELANJA TRANSFER	174,480,896,900	173,980,896,900	201,295,897,713	215,443,979,884	231,039,969,588	247,120,351,471
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,770,299,900	3,770,299,900	4,362,236,984	4,668,836,811	5,006,813,907	5,355,288,155
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170,710,597,000	170,210,597,000	196,933,660,729	210,775,143,073	226,033,155,680	241,765,063,316
	Jumlah Belanja	1,104,835,231,322	1,273,348,540,404	1,473,265,866,780	1,576,815,620,593	1,690,963,972,006	1,808,657,113,172
	Total Surplus/(Defisit)	2,918,662,620	(5,081,337,380)	(23,000,000,000)	(23,000,000,000)	(23,000,000,000)	(23,000,000,000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(2,918,662,620)	5,081,337,380	23,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19,918,662,620	19,918,662,620	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17,918,662,620	17,918,662,620	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19,918,662,620	19,918,662,620	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
	Pembiayaan Netto	(2,918,662,620)	5,081,337,380	23,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	0	(0)	(0)	(0)

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah masalah yang harus dihadapi oleh suatu wilayah. Permasalahan pembangunan daerah memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan sektor publik untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi saat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur suatu wilayah.

Berbagai permasalahan pembangunan daerah terbagi ke dalam berbagai aspek, sebagai berikut :

Aspek SDM

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran. Pada tahun 2024 angka kemiskinan sebesar 10,68%.

Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial, dan pengangguran menjadi tantangan utama dalam pembangunan Lampung Barat. Berdasarkan data tahun 2024, angka kemiskinan mencapai 10,68%, menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dan berbagai persoalan sosial, seperti akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Lampung Barat 2025–2029 harus difokuskan pada program-program inovatif, seperti peningkatan investasi di sektor padat karya, penguatan UMKM, serta perluasan akses layanan sosial dasar yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah sebesar 8,56 tahun.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi salah satu tantangan pembangunan di Lampung Barat. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah tercatat hanya 8,56 tahun, yang menunjukkan banyaknya penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing daerah. Penyusunan RPJMD 2025–2029 perlu mengutamakan program yang mendorong aksesibilitas pendidikan, seperti beasiswa, peningkatan infrastruktur pendidikan, dan kampanye kesadaran pentingnya pendidikan untuk masa depan.

3. Tingkatnya apresiasi terhadap budaya lokal masih rendah. Pada tahun 2024 persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi baru mencapai 12,25%.
Kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal di Lampung Barat menjadi tantangan serius untuk melestarikan identitas dan kekayaan budaya daerah. Hingga tahun 2024, hanya 12,25% warisan budaya tak benda yang berhasil disertifikasi, mencerminkan rendahnya upaya pengelolaan dan pelestarian budaya. Dalam RPJMD 2025–2029, perlu ada perhatian khusus pada penguatan identitas budaya melalui sertifikasi warisan budaya, pengembangan festival budaya lokal, serta pemberdayaan komunitas seni untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan leluhur.
4. Belum optimalnya kualitas kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2024 angka harapan hidup sebesar 73,96%.
Kualitas kesehatan masyarakat Lampung Barat masih membutuhkan perhatian serius. Pada tahun 2024, angka harapan hidup mencapai 73,96%, yang masih bisa ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis. Penyusunan RPJMD 2025–2029 harus mencakup program peningkatan akses layanan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah, serta kampanye gaya hidup sehat untuk mendorong masyarakat menjalani pola hidup lebih baik.
5. Belum optimalnya Pembangunan pemuda. Pada tahun 2024 indeks Pembangunan pemuda baru mencapai 61,84%.
Pembangunan pemuda di Lampung Barat belum menunjukkan hasil yang maksimal. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2024 baru mencapai 61,84%, menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar pada sektor pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemuda. Dalam RPJMD 2025–2029, program-program yang menargetkan peningkatan kapasitas pemuda, seperti pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses modal usaha, dan wadah kreativitas pemuda, perlu mendapatkan prioritas untuk menciptakan generasi yang mandiri dan kompetitif.
6. Belum optimalnya pemberdayaan gender. Pada tahun 2023, indeks pemberdayaan gender baru mencapai 65,92%.
Pemberdayaan gender di Lampung Barat juga masih memerlukan perhatian, dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2023 sebesar 65,92%. Angka ini mencerminkan perlunya penguatan peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. RPJMD 2025–2029 harus memuat kebijakan yang mendorong kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi formal, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

7. Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan. Pada tahun 2024, indeks ketahanan pangan baru mencapai 76,18%. Keamanan dan ketahanan pangan di Lampung Barat juga belum sepenuhnya terjaga, dengan indeks ketahanan pangan pada tahun 2024 sebesar 76,18%. Hal ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan. Penyusunan RPJMD 2025–2029 perlu memprioritaskan program diversifikasi pangan lokal, peningkatan produktivitas pertanian, pengelolaan rantai distribusi, serta edukasi masyarakat tentang pola konsumsi sehat dan bergizi untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

Aspek Ekonomi

1. Rendahnya PDRB perkapita. Pada tahun 2024, PDRB perkapita baru mencapai RP.31,35 juta.
Rendahnya PDRB per kapita di Lampung Barat mencerminkan masih terbatasnya aktivitas ekonomi dan tingkat produktivitas masyarakat. Pada tahun 2024, PDRB per kapita hanya mencapai Rp31,35 juta, angka ini masih jauh dari potensi maksimal yang dapat dicapai daerah. Dalam RPJMD 2025–2029, diperlukan kebijakan yang mendorong investasi, pengembangan sektor unggulan, dan penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.
2. Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal. Pada tahun 2024, produksi perikanan baru mencapai 10.768,56 ton.
Produksi dan pengelolaan hasil perikanan di Lampung Barat masih menghadapi berbagai kendala, dengan total produksi perikanan pada tahun 2024 hanya mencapai 10.768,56 ton. Optimalisasi sektor ini melalui pengembangan teknologi budidaya, pelatihan bagi nelayan, dan peningkatan akses pasar dapat menjadi strategi penting dalam RPJMD 2025–2029 untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.
3. Belum optimalnya produksi pertanian. Pada tahun 2024, produksi kopi sebesar 62.979,5 ton.
Produksi kopi sebagai salah satu komoditas unggulan Lampung Barat pada tahun 2024 hanya mencapai 62.979,5 ton, menandakan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. RPJMD 2025–2029 harus mencakup program peningkatan produktivitas melalui akses bibit unggul, pelatihan petani, dan peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jalan pertanian dan irigasi, untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian.

Aspek Pemerintahan

1. Belum optimalnya pencapaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2023, nilai SAKIP baru mencapai 67,25 poin.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lampung Barat pada tahun 2023 hanya mencapai nilai 67,25 poin, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. RPJMD 2025–2029 harus memuat strategi penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
2. Masih tingginya potensi bencana di Lampung Barat. Pada tahun 2024, indeks resiko bencana sebesar 176,28 poin.
Indeks risiko bencana di Lampung Barat pada tahun 2024 mencapai 176,28 poin, menunjukkan ancaman tinggi terhadap keselamatan dan keberlanjutan pembangunan. RPJMD 2025–2029 perlu mencakup langkah mitigasi yang komprehensif, seperti penguatan infrastruktur tahan bencana, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana.
3. Masih rendahnya daya saing daerah. Pada tahun 2024, indeks daya saing daerah baru mencapai 3,42 poin.
Indeks daya saing Lampung Barat pada tahun 2024 baru mencapai 3,42 poin, menandakan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan kompetitivitas daerah. Dalam RPJMD 2025–2029, perlu dilakukan pengembangan sektor unggulan, peningkatan konektivitas, dan penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi berdaya saing tinggi.
4. Belum optimalnya indeks inovasi daerah. Pada tahun 2024, indeks inovasi daerah baru mencapai 69,93 poin.
Dengan indeks inovasi daerah sebesar 69,93 poin pada tahun 2024, Lampung Barat perlu mendorong pengembangan ide-ide kreatif untuk memacu pembangunan. RPJMD 2025–2029 harus mencakup program pengembangan pusat inovasi, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, serta dukungan terhadap penggunaan teknologi inovatif.

Aspek Infrastruktur

1. Belum optimalnya capaian infrastruktur. Pada tahun 2024, indeks kualitas layanan infrastruktur baru mencapai 62,71 persen.
Indeks kualitas layanan infrastruktur pada tahun 2024 baru mencapai 62,71 persen, menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. RPJMD 2025–2029 harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, sanitasi, dan energi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Masih rendahnya pencapaian desa mandiri. Pada tahun 2024, desa mandiri baru mencapai 63 desa.
 ingga tahun 2024, jumlah desa mandiri di Lampung Barat baru mencapai 63 desa. RPJMD 2025–2029 perlu mempercepat transformasi desa melalui program pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar untuk memperluas jumlah desa mandiri.
3. Masih rendahnya jumlah smartvillage. Pada tahun 2024, smartvillage baru mencapai 7 pekon.
 Dengan hanya 7 pekon yang tergolong sebagai smart village pada tahun 2024, Lampung Barat perlu mempercepat digitalisasi desa. RPJMD 2025–2029 harus mencakup pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan digital untuk masyarakat desa agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing lokal.

Aspek Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya pencapaian indeks lingkungan hidup. Pada tahun 2024, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,09 poin.
 Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,09 poin pada tahun 2024 menunjukkan perlunya langkah strategis dalam pengelolaan lingkungan. RPJMD 2025–2029 harus memuat program pengurangan polusi, rehabilitasi ekosistem, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.
2. Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal. Potensi EBT pada PLTA Way Besai yaitu dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 Mwe. Potensi pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe, PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 Mwe.
 Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Lampung Barat, seperti PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan beberapa proyek lainnya, masih belum dimanfaatkan secara maksimal. RPJMD 2025–2029 harus memprioritaskan percepatan pemanfaatan EBT melalui investasi, pengembangan teknologi, dan kemitraan dengan pihak swasta untuk mendorong Lampung Barat menjadi daerah yang berkelanjutan dan mandiri energi.
3. Masih rendahnya pengelolaan sampah. Jumlah Sampah terkelola di fasilitas Pengelolaan Sampah baru terkelola dari 11 % sampai 34% dilaporkan di Neraca Pengelolaan sampah setiap tahun.

Isu strategis daerah

Fokus ke Kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas

1. **Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial**
Lampung Barat masih menghadapi tantangan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,68% pada tahun 2024, diperlukan strategi komprehensif melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, serta perlindungan sosial yang terintegrasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menempuh Jenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi**
Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi masih rendah, dengan rata-rata lama sekolah hanya 8,56 tahun pada tahun 2024. Perlu ada kampanye dan program beasiswa yang lebih luas untuk mendorong minat melanjutkan pendidikan sebagai langkah meningkatkan kualitas SDM.
3. **Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah**
Tingkat partisipasi sekolah masih belum merata, terutama pada kelompok usia pendidikan menengah dan tinggi. Upaya peningkatan harus difokuskan pada penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan penguatan program afirmasi bagi kelompok rentan.
4. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan**
Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik menjadi salah satu pilar utama peningkatan mutu pendidikan. Program pelatihan berkelanjutan dan pengangkatan tenaga pendidik berbasis kompetensi sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
5. **Terdegradasinya Budaya Lokal Akibat Pengaruh Budaya Luar**
Pengaruh budaya luar mengakibatkan degradasi nilai dan identitas budaya lokal, dengan hanya 12,25% warisan budaya tak benda yang tersertifikasi pada tahun 2024. Pelestarian budaya lokal harus dilakukan melalui revitalisasi tradisi, dukungan terhadap pelaku seni, dan edukasi budaya di sekolah.
6. **Masih Tingginya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular, Tidak Menular, dan Stunting**
Angka prevalensi penyakit menular, tidak menular, dan stunting masih tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan akses layanan kesehatan. RPJMD 2025–2029 harus mencakup strategi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, penguatan pencegahan penyakit, dan peningkatan fasilitas kesehatan.

7. Peningkatan Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat
Peningkatan standar pelayanan kesehatan menjadi prioritas untuk mendukung kesehatan masyarakat. Dengan angka harapan hidup sebesar 73,96 tahun pada 2024, Lampung Barat perlu memperkuat pemerataan fasilitas kesehatan dan pelatihan tenaga medis.
8. Kurangnya Keterlibatan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan
Organisasi kepemudaan di Lampung Barat memiliki peran strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Program pelibatan pemuda dalam pembangunan ekonomi kreatif dan sosial harus menjadi fokus dalam RPJMD.
9. Kurangnya Perhatian terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu diperkuat. Indeks pemberdayaan gender sebesar 65,92% pada tahun 2023 mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran gender dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
10. Belum Optimalnya Pembangunan yang Responsif Gender
Isu gender harus menjadi arus utama dalam pembangunan. Program-program berbasis gender perlu diperluas untuk meningkatkan peran perempuan di sektor ekonomi, politik, dan sosial.
11. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Belum Optimal
Indeks ketahanan pangan sebesar 76,18 pada tahun 2024 mencerminkan perlunya langkah strategis dalam meningkatkan produksi pangan lokal dan distribusi yang adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Pengendalian Penduduk Belum Berjalan secara Optimal
Laju pertumbuhan penduduk di Lampung Barat memerlukan pengendalian yang lebih terintegrasi melalui program KB dan edukasi keluarga berencana untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia.

Fokus Pembangunan pada Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Menurunnya Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan
Produksi sektor pertanian dan perkebunan menunjukkan tren penurunan, dengan produksi kopi hanya mencapai 62.979,5 ton pada tahun 2024. Diperlukan upaya revitalisasi sektor ini melalui pengenalan teknologi modern, pelatihan petani, dan diversifikasi produk untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi.
2. Rendahnya Produksi pada Sektor Peternakan serta Optimalisasi Manajemen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Produksi sapi potong dan kambing masih belum optimal, disertai dengan tantangan dalam manajemen kesehatan hewan. Strategi penguatan peternakan berbasis komunitas serta dukungan layanan kesehatan hewan harus ditingkatkan untuk mendorong kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah.

3. Rendahnya Produksi Perikanan Dibandingkan Potensi yang Tersedia
Produksi perikanan hanya mencapai 10.768,56 ton pada tahun 2024, jauh dari potensi yang ada. RPJMD 2025–2029 harus mencakup pengembangan teknologi budidaya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan hasil produksi.
4. Produktivitas dan Daya Saing Produk Olahan Masih Rendah
Produk olahan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum memiliki daya saing tinggi di pasar. Pengembangan sentra industri pengolahan, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk lokal harus menjadi fokus pembangunan ekonomi.
5. Rendahnya Investasi pada Sektor Unggulan
Investasi di sektor unggulan Lampung Barat masih rendah, menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan insentif investasi, penguatan infrastruktur penunjang, dan promosi potensi daerah diperlukan untuk menarik minat investor.
6. Rendahnya Penciptaan Lapangan Kerja Baru
Kesempatan kerja baru melalui UMKM masih terbatas, berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Digitalisasi UMKM, kemudahan akses pembiayaan, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk memperluas lapangan kerja.
7. Digitalisasi Ekonomi pada Pengelolaan UMKM dan Koperasi Modern
Transformasi digital dalam pengelolaan UMKM dan koperasi modern perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar. RPJMD harus mencakup program pelatihan digital dan pengembangan infrastruktur teknologi bagi pelaku usaha kecil.
8. Destinasi Wisata Belum Dikembangkan Secara Optimal
Jumlah wisatawan domestik belum mencapai target optimal, mengindikasikan perlunya pengembangan destinasi wisata yang lebih kreatif dan inovatif. Penguatan promosi, peningkatan fasilitas, dan dukungan ekonomi kreatif berbasis pariwisata menjadi langkah strategis.
9. Rendahnya Kompetensi Pemasaran dan Promosi Wisata
Kompetensi pemasaran pariwisata masih rendah, sehingga potensi wisata Lampung Barat kurang terekspos. Pelatihan pemasaran digital dan kolaborasi dengan pelaku usaha wisata menjadi penting untuk memperluas jangkauan promosi.

Fokus Pembangunan pada Tatacara Pemerintahan yang baik, Akuntabel, Inovatif dan Transparan

1. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Kurang Optimal
Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh berdampak pada rendahnya efisiensi layanan publik. Program penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi tata kelola, dan pengawasan berbasis masyarakat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas.

2. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Pekon
Kapasitas aparatur pekon dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan pemerintahan di tingkat desa.
3. Rendahnya Daya Inovasi Daerah
Indeks inovasi daerah baru mencapai 69,93 pada tahun 2024, menunjukkan perlunya dorongan lebih besar untuk memacu kreativitas dan pengembangan ide-ide inovatif.
4. Transformasi Digital dalam Sistem Pemerintahan
Digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Pemerintahan
Ketegasan batas wilayah pemerintahan penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi konflik administrasi.

Fokus Pembangunan pada Infrastruktur yang Berkualitas dan penanggulangan kebencanaan

1. Peningkatan Jalan Mantap
Peningkatan kualitas jalan mantap menjadi salah satu prioritas strategis dalam mendukung konektivitas wilayah di Lampung Barat. Jalan yang memadai tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan RPJMD 2025–2029, peningkatan jalan mantap ditargetkan dapat mencapai 80% melalui optimalisasi anggaran pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan.

Investasi pada infrastruktur jalan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Fokus utama terletak pada pembangunan jalan penghubung antar desa dan jalan menuju sentra produksi seperti perkebunan dan pertanian. Hal ini akan menciptakan keterhubungan ekonomi yang lebih inklusif serta mengurangi beban biaya logistik bagi pelaku usaha lokal. Peningkatan jalan mantap juga akan menciptakan aksesibilitas yang lebih baik menuju destinasi wisata unggulan di Lampung Barat, sehingga memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Air Baku
Lampung Barat memiliki potensi air baku yang besar, namun pemanfaatannya masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, dan pertanian. RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan pemanfaatan ini hingga 85% melalui pengembangan infrastruktur pengelolaan air baku, seperti bendungan dan jaringan distribusi air.

Selain itu, integrasi program pemanfaatan air baku dengan sektor pertanian dan industri harus dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pembangunan sistem pengolahan air baku juga akan memastikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, Lampung Barat dapat mengoptimalkan potensi air baku sebagai salah satu kekuatan pembangunan daerah.

3. **Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Air Tanah**
Penggunaan air tanah di Lampung Barat seringkali tidak terkendali, mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan dan penurunan kapasitas akuifer. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan air tanah dilakukan tanpa regulasi yang memadai, terutama di sektor domestik dan industri kecil. RPJMD 2025–2029 harus mencakup regulasi ketat dan pemantauan terhadap eksploitasi air tanah untuk mencegah overuse yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Penerapan teknologi pemantauan dan pengelolaan air tanah berbasis digital dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan penggunaan yang bijaksana. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan juga penting untuk mendorong perilaku hemat air. Dengan pengendalian yang baik, Lampung Barat dapat menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin ketersediaan air tanah bagi generasi mendatang.

4. **Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan**
Akses masyarakat terhadap sumber air minum layak di Lampung Barat masih menjadi tantangan besar. RPJMD 2025–2029 harus memprioritaskan peningkatan cakupan layanan air minum layak melalui pembangunan jaringan perpipaan, sistem distribusi, dan pengembangan sumber air bersih yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD air minum, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memperluas akses layanan ini. Program revitalisasi sumber air yang rusak dan pengelolaan air berbasis komunitas juga penting untuk menjamin keberlanjutan. Dengan peningkatan akses terhadap air minum layak, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan, serta mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia di Lampung Barat.

5. **Meningkatnya Layanan Irigasi dalam Kondisi Baik**
Ketersediaan irigasi dalam kondisi baik merupakan elemen penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian di Lampung Barat. Untuk mencapai target 85% pada tahun 2029, RPJMD harus memprioritaskan rehabilitasi saluran irigasi rusak dan pembangunan jaringan irigasi baru di wilayah strategis pertanian.

Selain itu, penerapan teknologi irigasi modern, seperti irigasi tetes dan irigasi pintar berbasis sensor, perlu diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan irigasi secara mandiri juga akan mendukung keberlanjutan layanan ini. Dengan layanan irigasi yang optimal, hasil panen dapat meningkat secara signifikan, mendukung ketahanan pangan daerah dan pendapatan petani.

6. Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak dan Aman
Akses masyarakat terhadap layanan sanitasi layak di Lampung Barat masih memerlukan perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur sanitasi, seperti toilet umum sehat dan sistem pengelolaan limbah domestik, harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, program edukasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi aman perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim fasilitas. Pemerintah daerah juga perlu mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung pembiayaan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Dengan layanan sanitasi yang memadai, angka penyakit terkait sanitasi buruk dapat ditekan, serta kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

7. Meningkatnya Moda Transportasi Umum

Moda transportasi umum di Lampung Barat masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah. RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan jumlah moda transportasi umum melalui pengadaan armada baru, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan jalur-jalur transportasi strategis.

Pemerintah juga harus mendorong integrasi transportasi umum dengan teknologi digital, seperti aplikasi pemesanan tiket online dan informasi jadwal transportasi. Dengan layanan transportasi umum yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mendukung pengembangan wilayah secara keseluruhan.

8. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi
Sarana dan prasarana transportasi di Lampung Barat memerlukan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2024, kondisi sarana transportasi publik, seperti terminal dan halte, masih belum memadai. RPJMD harus mencakup peningkatan fasilitas tersebut serta pengembangan infrastruktur pendukung, seperti jembatan, pelabuhan, dan jalur transportasi alternatif.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan lebih lancar, mengurangi biaya logistik

dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan. Program pembangunan ini juga dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan taraf hidup, dan mempercepat pembangunan daerah.

9. Meningkatkan Layanan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara Merata

Penyediaan layanan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata di Lampung Barat merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong transformasi digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan cakupan hingga 90% melalui pembangunan infrastruktur jaringan, seperti menara telekomunikasi dan perluasan jaringan fiber optik.

Pemanfaatan teknologi digital juga harus didorong dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk digitalisasi UMKM dan layanan publik. Dengan layanan TIK yang merata, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi, pendidikan daring, serta peluang ekonomi berbasis digital, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah.

10. Meningkatkan Manajemen Mitigasi Bencana

Lampung Barat memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, dengan indeks risiko bencana mencapai 176,28 pada tahun 2024. Oleh karena itu, peningkatan manajemen mitigasi bencana menjadi prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029. Fokus utama adalah penguatan kapasitas lembaga terkait, penyediaan peralatan tanggap darurat, dan pelatihan mitigasi bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

Selain itu, penyusunan peta risiko bencana yang komprehensif dan integrasi sistem peringatan dini berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak bencana. Dengan manajemen mitigasi yang lebih baik, risiko korban jiwa dan kerugian material akibat bencana dapat ditekan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

11. Mewujudkan Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni, Terjangkau, dan Berkelanjutan

RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan hingga 90% melalui program perumahan rakyat yang inklusif, seperti subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perumahan berbasis komunitas, dan revitalisasi kawasan hunian kumuh.

Program ini juga mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan perumahan, sehingga menciptakan hunian yang

tidak hanya layak dan terjangkau tetapi juga berkelanjutan. Dengan akses yang lebih baik terhadap perumahan, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, mendukung indikator pembangunan manusia yang lebih baik.

12. Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

RPJMD 2025–2029 akan menitikberatkan pada pengentasan permukiman kumuh melalui pendekatan terpadu yang melibatkan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman juga akan dilakukan melalui program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Dengan langkah ini, permukiman kumuh dapat direvitalisasi menjadi kawasan yang lebih sehat, aman, dan layak huni, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan/Wilayah Danau, Daerah Aliran Sungai, Rawan Bencana, dan Permukiman Perkotaan

Pemanfaatan ruang di kawasan strategis seperti wilayah danau, daerah aliran sungai (DAS), dan area rawan bencana di Lampung Barat memerlukan pengendalian yang lebih baik. Pada tahun 2024, pemanfaatan ruang di wilayah-wilayah ini belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). RPJMD 2025–2029 perlu menitikberatkan pada penegakan aturan tata ruang, termasuk penertiban aktivitas yang melanggar, seperti alih fungsi lahan dan pembangunan ilegal.

Program ini juga harus mencakup penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang lebih spesifik untuk kawasan strategis dan rawan bencana. Dengan pengendalian yang lebih ketat, potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan, risiko bencana dapat ditekan, dan pemanfaatan ruang dapat lebih optimal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

14. Memantapkan Pengembangan Wilayah dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Lingkungan Hidup

Pengembangan wilayah di Lampung Barat membutuhkan pendekatan holistik yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2024, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terlihat, dengan kontribusi ekonomi wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. RPJMD 2025–2029 harus menekankan pengembangan wilayah secara merata melalui penguatan sektor unggulan lokal, seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan, serta investasi pada infrastruktur penunjang.

Aspek sosial budaya juga harus diperhatikan dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan pengembangan ruang budaya masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH), perlu menjadi prioritas. Dengan pendekatan ini, pembangunan wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Fokus Pembangunan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Mengendalikan Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi tantangan signifikan di Lampung Barat. RPJMD 2025–2029 menargetkan pengendalian melalui penguatan regulasi, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian produktif, serta program insentif bagi petani yang mempertahankan fungsi lahan mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang.
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan penambahan area RTH melalui rehabilitasi kawasan terbuka, penghijauan ruang publik, dan pembangunan taman kota. Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, fungsi ekologis, estetika, dan sosial RTH dapat lebih optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung mitigasi perubahan iklim.
3. Penurunan Kualitas Kawasan Lindung
Kawasan lindung di Lampung Barat mengalami tekanan signifikan akibat deforestasi dan aktivitas ilegal, yang menurunkan kualitas lingkungan hidup. RPJMD 2025–2029 menargetkan rehabilitasi kawasan ini melalui reboisasi, penguatan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.
4. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Panas Bumi
Lampung Barat memiliki potensi panas bumi yang besar, seperti di PLTP Ulubelu dan Way Besai, dengan kapasitas mencapai 90 MW. Namun, pemanfaatan energi ini masih minim. RPJMD 2025–2029 akan memfasilitasi investasi di sektor panas bumi melalui kerja sama dengan pihak swasta, penyederhanaan perizinan, dan promosi potensi energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

5. **Pemanfaatan Potensi Limbah**
RPJMD 2025–2029 menargetkan pengembangan teknologi pengolahan limbah, seperti pengolahan limbah organik menjadi kompos dan pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Program ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
6. **Pencemaran Perairan Danau dan Sungai**
Danau dan sungai di Lampung Barat, seperti Danau Ranau dan Sungai Way Besai, mengalami pencemaran akibat limbah domestik dan pertanian. RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan program pengelolaan terpadu, termasuk penyediaan fasilitas pengolahan limbah cair dan kampanye kesadaran lingkungan bagi masyarakat untuk mengurangi pencemaran.
7. **Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca**
Lampung Barat mengalami peningkatan emisi gas rumah kaca sebesar 5% per tahun akibat aktivitas transportasi dan industri. RPJMD 2025–2029 menargetkan pengurangan emisi melalui penggunaan energi baru terbarukan, perbaikan sistem transportasi publik, dan penghijauan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung target penurunan emisi nasional dan mitigasi perubahan iklim.
8. **Perubahan Iklim atau Ketahanan Iklim**
Perubahan iklim telah menyebabkan ketidakpastian pola hujan di Lampung Barat, berdampak pada sektor pertanian. RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan program adaptasi perubahan iklim, termasuk pengembangan varietas tanaman tahan cuaca ekstrem dan pengelolaan sumber daya air yang efisien untuk meningkatkan ketahanan iklim masyarakat.
9. **Perdagangan Karbon sebagai Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
Perdagangan karbon menjadi peluang ekonomi baru bagi Lampung Barat, terutama dari kawasan hutan yang luas. Pada tahun 2024, Lampung Barat belum memanfaatkan potensi ini secara optimal. RPJMD 2025–2029 akan mendorong sertifikasi kawasan hutan untuk perdagangan karbon serta kerja sama dengan pihak swasta guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.
10. **Peningkatan Layanan Pengelolaan Persampahan**
RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan cakupan layanan hingga 90% melalui pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) modern, pengadaan kendaraan pengangkut sampah, dan program daur ulang berbasis komunitas.

11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Fasilitas lingkungan seperti tempat pengolahan limbah cair dan fasilitas pemantauan kualitas udara masih kurang memadai di Lampung Barat. RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana tersebut untuk mendukung kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

12. Konflik Satwa dengan Manusia

Konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah dan harimau masih sering terjadi di wilayah hutan Lampung Barat, dengan 15 insiden dilaporkan pada tahun 2024. RPJMD 2025–2029 akan memperkuat program mitigasi konflik ini melalui pembangunan koridor satwa, pengelolaan habitat satwa liar, dan edukasi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mencegah konflik.

BAB III

Visi, Misi, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2025-2029 disamping selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat, juga selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang :

A. HEBAT

1. **HARMONI**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian.
Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.
2. **ELOK**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosialkemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.
3. **BERBUDAYA**, Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.
4. **AMAN**, bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas.

5. **TAQWA**, bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek Pembangunan

B. SETIA

1. **SEHAT DAN CERDAS**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. **TEGAS DAN INOVATIF**, mengandung arti sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti, serta membangun proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.
3. **ADIL, MAKMUR DAN MERATA**, masyarakat Kabupaten Kabupaten Lampung Barat yang dapat menikmati pembangunan secara merata.

Adapun makna Lampung Barat **HEBAT DAN SETIA**, “Semangat dan kebersamaan dan kesetiaan untuk Lebih Mengoptimalkan Potensi yang Ada dan Sangat Besar untuk Kesejahteraan Masyarakat secara adil dan merata.” Dalam hal ini adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Lampung Barat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Lampung Barat secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kabupaten Lampung Barat juga berpedoman pada Visi Pembangunan Lampung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2025-2029 yaitu “Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”

Visi Lampung Barat sebagai Rumah Bersama yang “Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju

Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)” selaras dengan visi pembangunan nasional yakni Indonesia maju, berdaulat dan mandiri. Visi masyarakat Lampung Barat yang menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong selaras dengan visi pembangunan nasional Indonesia yang berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan kelima penjelasan dari visi Kabupaten Lampung Barat selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Visi Pembangunan Nasional 2025-2029 :
“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2029 :
“Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”



Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 :
“Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”

Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa

adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan “Lampung Barat Hebat dan Setia” sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Barat 2025-2029, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya.** Konsep Lampung Barat sehat dan cerdas sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik dan memastikan akses kesehatan untuk rakyat agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan kelima misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Lampung Barat yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang, serta memajukan dan Melestarikan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.
- 2) **Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.** Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil- menengah yang inklusif dan kreatif.
- 3) **Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.** Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak serta membangun proses kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
- 4) **Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.** Misi ini Bermakna memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga

keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi

- 5) **Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong.** Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
- 6) **Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.** Membangun infrastruktur yang mendukung aktifitas perekonomian secara adil dan merata di seluruh wilayah.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Keselarasan misi pembangunan Kabupaten dan Provinsi

Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029	Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025 -2029
Misi 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya	Misi 2. Memperkuat Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produktif
Misi 2. Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Misi 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif
Misi 3. Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	Misi 3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas
Misi 4. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	Misi 3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	Misi 3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029	Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025 -2029
Misi 6. Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	Misi 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif
	Misi 2. Memperkuat Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produktif

Tabel 3.2. Keselarasan misi pembangunan Kabupaten dan Nasional

Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029	Misi Pembangunan Nasional 2025 -2029 (Asta Cita)
Misi 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya	PN 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Misi 2. Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Misi 3. Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
Misi 4. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai

Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029	Misi Pembangunan Nasional 2025 -2029 (Asta Cita)
	masyarakat yang adil dan makmur
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Misi 6. Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	PN 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Keselarasan misi RPJP Kabupaten Lampung Barat dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJP Kabupaten Lampung Barat

MISI RPJMD TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJPD LAMPUNG BARAT UNTUK RPJMD KE-1 (2025-2029)
Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya	Misi 1 Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya
Misi 2 Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.	Misi 2 Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian.
Misi 3 Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	Misi 3 Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai

MISI RPJMD TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJPD LAMPUNG BARAT UNTUK RPJMD KE-1 (2025-2029)
Misi 4 Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	Misi 5 Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.
Misi 5 Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	Misi 3 Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai
Misi 6 Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.	Misi 4 Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2022-2024 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4. Sinkronisasi Tujuan Kabupaten dan Provinsi

TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN PROVINSI
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal	Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN PROVINSI
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana

Tabel 3.5. Sinkronisasi Sasaran Strategis Kaupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional

SASARAN KABUPATEN	SASARAN PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang yang berkualitas dan berdaya saing	2.1.1 Meningkatkan Kualitas daya Saing Pendidikan	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
	2.1.2 Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	
	2.1.3 meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	
Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif dan perlindungan anak	2.1.4 Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
Meningkatnya pengendalian penduduk	2.1.4 Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

SASARAN KABUPATEN	SASARAN PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan	1.1.6 meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Meningkatnya Ketahanan dan kemandirian pangan	1.1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	PN 2. Memantapkan Sistem Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
Meningkatnya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah	3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	1.1.1 Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
	1.1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	
	1.1.3 Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	
	1.1.4 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	1.1.6 meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	
Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	1.1.4 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	3.1.1 Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

SASARAN KABUPATEN	SASARAN PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
	3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	
Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila dan demokrasi	3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	1.1.5 Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)"	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dan berbudaya	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,41	72,75	73,43	74,02	74,55	75,10	75,71
			Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,41	72,75	73,43	74,02	74,55	75,10	75,71
				Prevalensi Stunting	20.50%	17.80	17.22	16.37	15.90	15.43	14.96
			Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.407	0.405	0.403	0.401	0.399	0.397	0.395
				Indeks Perlindungan Anak	60.18 (tahun 2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.12%	1.11%	1.10%	1.09%	1.08%	1.07%	1.06%

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	61.52	61.83	62.14	62.45	62.76	63.07	63.39
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	10,68	9,86 - 10,11	9.00-9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25
				Gini Rasio	0,290	0,263	0.260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272
			Meningkatnya Ketahanan dan kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76.18	76.56	76.94	77.33	77.72	78.10	78.49
		Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah		Persentase pemajuan kebudayaan daerah	10,43%	12.64%	12,63%	14,83%	17,03%	19,23%	21,42%
			Meningkatnya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	12,25%	13.48%	14.60%	15.73%	16.85%	17.97%	19.10%
				Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	5,32%	7.57%	9.67%	11.82%	13.97%	16.12%	18.27%

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal		Laju pertumbuhan ekonomi (Persen)	4,36%	4.59%	4.83%	5.09%	5.36%	5.64%	5.94%
				PDRB per kapita (Rp Juta)	31.35	33,68	37,35	40.35	43.35	46.35	49.35
			Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	PDRB per kapita (Rp Juta)	31.35	33,68	37,35	40.35	43.35	46.35	49.35
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35.66%	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	37.99%
				Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	2.05%	1,98%	1,97%	1,96%	1,95%	1,94%	1,93%
				Tingkat Inflasi (%)	1,57% (angka Prov)	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.09	1.90 - 2.08	1.75 - 2.05	1.70 - 2.02	1.60 - 1.99	1.50 - 1.98	1.40 - 1.95

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Nilai investasi (Rupiah)	187.253.670.764	104.640.000.000	25.000.000.000	26.250.000.000	27.693.750.000	29.355.375.000	31.410.251.250
				Indeks Akses Keuangan Daerah (poin)	3.5	3.56	3.59	3.63	3.66	3.69	3.70
			Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Rasio Kewirausahaan	1.88	2.00	2.40	2.60	2.80	2.80	3.00
	Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52
				Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	70.74	72.00	72.50	73.00	73.50	74.00	75.00
				Indeks Pelayanan Publik	3.9	3.94	3.98	4.02	4.06	4.10	4.14
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52
				Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	70.74	72.00	72.50	73.00	73.50	74.00	75.00

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Indeks Pelayanan Publik	3.90	3.94	3.98	4.02	4.06	4.10	4.14
	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,09	74,64	74.89	75.14	75.39	75.65	75,90
			Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	73,09	74,64	74.89	75.14	75.39	75.65	75,90
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38
	Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.5	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25
				Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	72 poin	74.15 poin	75 poin	75,15 poin	75,30 poin	75,45 poin	75,60 poin
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.5	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25
	Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana		Indeks layanan infrastruktur daerah,	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46
				Indeks Resiko Bencana	176,28	118.93	117.99-117.09	117.06-115.24	116.12-113.40	115.19-111.55	114.25-109.71
			Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	176,28	118.93	117.99-117.09	117.06-115.24	116.12-113.40	115.19-111.55	114.25-109.71

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Arah Kebijakan

Tabel 3.8 Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Bedaya Saing, Agamis, Taqwa, Sehat, Cerdas, Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dan berbudaya	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, program Pendidikan non formal, wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tisk sekolah, pengelolaan organisasi pemuda, prestasi pemuda, wirausaha muda, prestasi olahraga, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fungsi rumah sakit daerah, jaminan Kesehatan Masyarakat, pemeriksaan Kesehatan gratis, program keluarga harapan, perlindungan hak kaum disabilitas, Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat), Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa, Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, penanganan Rawan Pangan, serta Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat. Kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi semua kelompok. Dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas sosial, pengendalian penduduk dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi terus didorong melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan akses dan ketersediaan pangan serta ketahanan dan kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal. Di samping itu, pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk

Visi	Misi	Arah Kebijakan
		memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.
	Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	Arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat, guna membentuk karakter sosial yang berlandaskan moral, toleransi, dan semangat gotong royong. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman, kebijakan difokuskan pada peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, penguatan kelembagaan sosial, serta sinergi antara aparat dan warga dalam pencegahan konflik dan kriminalitas. Di sisi lain, upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilakukan melalui pendidikan kebangsaan, dialog lintas agama dan budaya, serta penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah daerah juga mendorong terciptanya harmoni sosial dengan menjunjung tinggi kebhinekaan sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan dan kehidupan demokratis di tengah masyarakat.
	Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, BUMPEkon, serta Koperasi Merah Putih yang dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri
	Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	Arah kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis integritas guna mewujudkan birokrasi yang amanah dan berkeadaban. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkatkan melalui reformasi birokrasi yang konsisten, penegakan disiplin aparatur, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis

Visi	Misi	Arah Kebijakan
		elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan etika aparatur juga menjadi fokus untuk menciptakan iklim pemerintahan yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta kebudayaan lokal.
	Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.

Visi	Misi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Strategi

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat, strategi pembangunan disusun sebagai pedoman dalam mencapai visi dan misi daerah secara efektif dan terukur. Strategi ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap strategi yang ditetapkan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, strategi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan perencanaan yang sistematis dan implementasi yang tepat, strategi ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kabupaten Lampung Barat di tingkat regional maupun nasional.

Tabel 3.7 Strategi

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
	Misi 1. : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dan berbudaya							
1	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, program Pendidikan non formal, wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tiasak sekolah, pengelolaan organisasi pemuda, prestasi pemuda, wirausaha muda, prestasi olahraga, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fungsi rumah sakit daerah, jaminan Kesehatan Masyarakat, pemeriksaan Kesehatan gratis, program keluarga harapan, perlindungan hak kaum disabilitas, Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat),	SDM Berakhlak	Penguatan layanan pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penyediaan layanan dasar yang merata dan terjangkau.	Pengembangan keterampilan kerja berbasis potensi lokal dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan preventif.	Penguatan sistem perlindungan sosial dan ketahanan keluarga, serta optimalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.	Konsolidasi program lintas sektor dalam pembangunan SDM serta pengembangan SDM unggul melalui inovasi dan teknologi.
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, dan Perlindungan Anak			Penyuluhan dan advokasi terkait hak-hak perempuan dan anak	Penguatan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan	Meningkatkan akses layanan kesehatan dan sosial bagi keluarga	Optimalisasi peran lembaga masyarakat dalam inklusivitas	Evaluasi dan peningkatan kebijakan kesetaraan gender
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk			Peningkatan akses dan edukasi tentang program KB	Optimalisasi layanan kesehatan reproduksi	Integrasi kebijakan kependudukan dengan pembangunan	Penguatan peran kader kesehatan dan keluarga berencana	Evaluasi efektivitas program kependudukan

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
		Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa, Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, penanganan Rawan Pangan, serta Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat. Kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak,				ekonomi		
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	kesetaraan gender, dan pembangunan masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi semua kelompok. Dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas sosial, pengendalian penduduk dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi terus didorong melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan akses dan ketersediaan pangan serta ketahanan dan kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjamin		Penguatan program bantuan sosial berbasis data terpadu dan dukungan lintas sektor (desa, dinsos, Bappeda, dunia usaha, dan lembaga filantropi).	Pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dan wirausaha	Optimalisasi program padat karya untuk masyarakat miskin	Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan gratis	Evaluasi dan penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan
5	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan			Peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi pangan	Penguatan infrastruktur pertanian dan irigasi	Implementasi teknologi pertanian berkelanjutan	Optimalisasi rantai distribusi dan akses pangan	Evaluasi dan pengembangan kebijakan ketahanan pangan
6	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya			Pemetaan dan revitalisasi objek budaya	Pengembangan event budaya daerah	Digitalisasi dan promosi cagar budaya	Pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Evaluasi dan penguatan kebijakan budaya

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
		ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal. Di samping itu, pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.						
Misi 2. Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal								
7	Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	Arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat, guna membentuk karakter sosial yang berlandaskan moral, toleransi, dan semangat gotong royong. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman, kebijakan difokuskan pada peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, penguatan kelembagaan sosial, serta sinergi antara aparat dan warga dalam pencegahan konflik dan kriminalitas. Di sisi lain, upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilakukan melalui pendidikan kebangsaan, dialog lintas agama dan budaya, serta penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan	Ekonomi Gotong Royong	Pengembangan sektor unggulan daerah (kopi, pertanian, perikanan) melalui kemitraan antara pemda, koperasi, dan pelaku usaha	Optimalisasi pasar dan distribusi hasil produksi	Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif	Penguatan inovasi berbasis teknologi dalam ekonomi daerah	Evaluasi pertumbuhan ekonomi dan strategi keberlanjutan
8	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah			Digitalisasi UMKM dan koperasi	Pelatihan manajemen usaha bagi UMKM	Fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran produk	Penguatan branding produk daerah	Evaluasi dan pengembangan kebijakan UMKM berkelanjutan

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
		yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah daerah juga mendorong terciptanya harmoni sosial dengan menjunjung tinggi kebhinekaan sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan dan kehidupan demokratis di tengah masyarakat.						

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
	Misi 3. Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban							
9	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, BUMPekon, serta Koperasi Merah Putih yang dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri	Pemerintahan Transparan dan Melayani	Reformasi birokrasi, SDM aparatur dan Revitalisasi sarana pelayanan publik melalui kolaborasi antara pemerintah, BPSDM, dan KemenPAN-RB.	Digitalisasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi	Penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas dan Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik	Peningkatan transparansi, partisipasi publik dan Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat	Evaluasi dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan serta layanan publik berbasis kebutuhan Masyarakat

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
	Misi 4. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.							
10	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Arah kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis integritas guna mewujudkan birokrasi yang amanah dan berkeadaban. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkatkan melalui reformasi birokrasi yang konsisten, penegakan disiplin aparatur, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan etika aparatur juga menjadi fokus untuk menciptakan iklim pemerintahan yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta kebudayaan lokal.	Lambar Sejuk dan Bersih	Penghijauan dan restorasi lahan kritis	Penguatan pengelolaan sampah dan limbah	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan	Penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan	Evaluasi dan pengembangan kebijakan lingkungan berkelanjutan

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
	Misi 5. Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong							
11	Meningkatnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana,	Beriman dan bertoleransi	Peningkatan patroli dan fasilitas keamanan	Optimalisasi peran masyarakat dalam keamanan lingkungan	Peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi	Sinergi aparat dan masyarakat dalam menjaga ketertiban	Evaluasi sistem keamanan berbasis komunitas
12	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila dan demokrasi			Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila	Penguatan organisasi masyarakat sipil	Kampanye toleransi dan hak asasi manusia	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi	Evaluasi dan penguatan program wawasan kebangsaan

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
		kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.						
	Misi 6. Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah							
13	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah	Infratraktur Mantap	Pembangunan infrastruktur prioritas dengan pendekatan padat karya dan partisipasi masyarakat serta dukungan dana DAK dan provinsi.	Peningkatan konektivitas antarwilayah	Penguatan akses air bersih dan sanitasi	Optimalisasi pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur	Evaluasi dan perencanaan pembangunan jangka panjang

No	Sasaran Pemda	Arah Kebijakan	Program Unggulan	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
14	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.		Penyusunan peta risiko bencana	Pelatihan masyarakat tanggap bencana	Penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi	Optimalisasi penanggulangan bencana berbasis teknologi	Evaluasi kesiapsiagaan dan respons bencana daerah

Uraian strategi pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 menitikberatkan pada pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, ketahanan sosial, dan inovasi. Fokus utama diarahkan pada penguatan layanan pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta pemerataan akses layanan dasar. Pengembangan keterampilan berbasis potensi lokal dan penguatan sistem perlindungan sosial menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang adaptif dan produktif. Menjelang 2030, konsolidasi program lintas sektor dan pengembangan SDM unggul berbasis inovasi dan teknologi akan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang berdaya saing tinggi..
2. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Anak
Strategi yang diterapkan dalam sasaran ini mencakup advokasi hak-hak perempuan dan anak, penguatan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan, serta peningkatan layanan kesehatan dan sosial bagi keluarga. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan melindungi kelompok rentan dari diskriminasi serta kekerasan.
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk
Strategi pengendalian penduduk melibatkan peningkatan akses program keluarga berencana (KB), optimalisasi layanan kesehatan reproduksi, serta integrasi kebijakan kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan daerah.
4. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan
Strategi utama dalam pengentasan kemiskinan mencakup peningkatan bantuan sosial berbasis data akurat, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat miskin.
5. Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Strategi ketahanan pangan meliputi peningkatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, serta penguatan rantai distribusi dan akses pangan. Implementasi teknologi pertanian berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.
6. Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
Dalam upaya pelestarian budaya, strategi yang diterapkan meliputi pemetaan dan revitalisasi objek budaya, pengembangan event budaya daerah, serta digitalisasi dan promosi cagar budaya. Pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan juga menjadi langkah penting dalam menjaga warisan budaya daerah.

7. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Ekonomi
Strategi peningkatan ekonomi daerah mencakup pengembangan sektor unggulan, optimalisasi pasar, serta penguatan inovasi berbasis teknologi dalam ekonomi daerah.
8. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM
Strategi dalam peningkatan UMKM mencakup digitalisasi usaha, pelatihan manajemen bisnis, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran produk.
9. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Strategi yang diterapkan meliputi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan pemerintahan, penguatan sistem pengawasan dan transparansi serta pelayanan publik mencakup revitalisasi sarana pelayanan, digitalisasi pelayanan berbasis teknologi, serta peningkatan sistem pengaduan masyarakat.
10. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Strategi lingkungan hidup meliputi penghijauan, pengelolaan sampah, serta penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan.
11. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat
Strategi keamanan dan ketertiban berfokus pada peningkatan patroli dan fasilitas keamanan, optimalisasi peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta penerapan sistem keamanan berbasis teknologi.
12. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi
Strategi dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi mencakup pendidikan nilai-nilai kebangsaan, penguatan organisasi masyarakat sipil, serta kampanye toleransi dan hak asasi manusia.
13. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur
Strategi dalam bidang infrastruktur mencakup pembangunan infrastruktur prioritas, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta optimalisasi pemeliharaan infrastruktur.
14. Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana
Strategi ini mencakup penyusunan peta risiko bencana, pelatihan masyarakat tanggap bencana, serta penguatan sistem mitigasi berbasis teknologi.

Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029, diperlukan perencanaan yang matang, termasuk dalam aspek pendanaan. Kerangka Pendanaan Pembangunan menjadi bagian krusial dalam dokumen RPJMD, karena menentukan kelayakan dan keberlanjutan program serta kegiatan pembangunan yang telah dirancang.

Pendanaan pembangunan daerah harus bersumber dari berbagai mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer dari pemerintah pusat, pendanaan dari sektor swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi sumber daya keuangan menjadi faktor utama dalam menjamin efektivitas implementasi program pembangunan.

Penyusunan Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat mempertimbangkan proyeksi penerimaan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran. Dengan perencanaan pendanaan yang terarah dan realistis, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 3.9 Program Prioritas

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)
LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya - Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal - Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban - Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan - Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong - Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (poin)	
		1. Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (poin)	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	
			-		2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Jumlah bahasa dan sastra yang terlestarikan		1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			Meningkatnya mutu layanan Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar,		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal		
			Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet yang ikut event olahraga (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Persentase Peningkatan Pemustaka		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Terlaksananya Pemetaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Terlaksananya Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Dinas Kesehatan)		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		2. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (poin)	
				Indeks Perlindungan Anak (poin)	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak seta perlindungan perempuan dan anak		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak seta perlindungan perempuan dan anak		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			Meningkatnya pemanfaatam data gender dan anak		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi,		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			penelantaran , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
		3. Meningkatnya pengendalian penduduk		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	
				Laju Pertumbuhan Penduduk (Persentase)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB	mCPR (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	TFR (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Terkendalinya penambahan jumlah penduduk		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		4. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan		Tingkat Kemiskinan (%)	
				Rasio Gini (Indeks)	
			Meningkatnya Anak Terlantar terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Anak Terlantar terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Meningkatnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Meningkatnya Keluarga Miskin dan Rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya Kualitas Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan sosial	Persentase Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Meningkatnya Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			dasarnya		
			Meningkatnya Masyarakat Rentan Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Masyarakat Rentan Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya Pekon/Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan pendataan data fakir miskin	Presentase Pekon/Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya pelayanan pemulihan sosial bagi korban bencana	Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau nonalam yang	Presentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau nonalam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Presentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase komponen utama taman makam pahlawan yang direhabilitasi (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			Meningkatnya Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Meningkatnya peran Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	Presentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Meningkatnya Ketahanan dan kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan (poin)	
			Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase pangan segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Tercapainya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama (beras) (Ton)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Terwujudnya Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur kemandirian Pangan Pemerintah (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
			Terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	2. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah			Persentase pemajuan kebudayaan daerah (%)	
		Meningkatnya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah		Persentase pelestarian warisan budaya (%)	
				Persentase cagar budaya peringkat kabupaten (%)	
			Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Meningkatnya pemajuan kebudayaan		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Daerah		KEBUDAYAAN
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat lampung barat tentang informasi sejarah		2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
			Terlaksananya pelestarian kesenian daerah		2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	3. Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal			Laju pertumbuhan ekonomi (%)	
				PDRB per kapita (Juta Rupiah)	
		Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi		Tingkat Inflasi (%)	
				Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	
				PDRB per kapita (Juta Rupiah)	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			-		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			% alat UTTP tertera sah	Persentase Alat UTTP tertera sah (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang memadai	Persentase Destinasi wisata yang memadai (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanian (Dinas	Persentase kelembagaan Tani yang meningkat kapasitasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Tanaman Pangan dan Hortikultura)		
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja		2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diakses dan	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Dipublikasikan Melalui Media Publikasi Website DPMPTSP (%)	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya Penempatan tenaga kerja		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas Pekerbunan dan Peternakan)	Persentase Penanganan bencana pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Penanganan bencana pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase peningkatan prasarana pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya penyediaan sarana pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya penyediaan sarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya perlindungan tenaga kerja		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Meningkatnya perlindungan tenaga		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			kerja		
			Meningkatnya Pertumbuhan dan Omset IKM		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya Pertumbuhan dan Omset IKM		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya pertumbuhan IKM Formal	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya pertumbuhan IKM Formal	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Meningkatnya pertumbuhan IKM Formal		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			Persentase pasar pemda yang terbangun atau direvitalisasi	Persentase pasar rakyat yang terbangun atau direvitalisasi (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Persentase peningkatan omset UMKM yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok	Persentase rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat (Orang)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
		Meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah		Peningkatan Jumlah UMKM (%)	
				Persentase Koperasi sehat (%)	
			Persentase Koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Persentase koperasi yang meningkat volume usaha	Persentase koperasi yang meningkat volume usaha (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	4. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan			Indeks reformasi birokrasi (poin)	
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	
				Indeks Daya Saing Daerah (poin)	
		9. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
		Pemerintahan			
				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	
			-		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			-		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Jumlah pekon mandiri (Kecamatan Sumber Jaya)		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
			Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks KIP (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Poin)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
			Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Penelitian dan Pengkajian	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan Inovasi yang Dilaksanakan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam	Jumlah Inovasi Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Inovasi)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Pengembangan Inovasi Daerah		
			Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan bidang perkenomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
				melaporkan (%)	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas anak (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa		2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase keselarasan RPJMD dengan Rentra PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
					KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Penganggaran pendapatan daerah yang tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase penyampaian Penatausahaan Keuangan tepat waktu oleh Perangkat Daerah	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				(%)	
				Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamat Arsip		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			Persentase desa yang dibina dan diawasi (Kecamatan Sumber Jaya)		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (Kecamatan Sumber Jaya)		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Sumber Jaya)		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Undangan		
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Sumber Jaya)		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
			Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Persentase penetapan objek pajak (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Cakupan pengawasan pengelolaan pendapatan (Angka)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks PEMDI (Poin)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Tingkat Ketersediaan Arsip		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	5. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas			Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)	
				Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah (poin)	
		10. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup		Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	
			meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			meningkatkan tata kelola persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
				Persentase Jumlah Sampah Berkurangnya (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Mitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang tertindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan bak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase ruang terbuka hijau (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Indeks Kualitas Lahan (Poin)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas udara (Poin)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks kualitas air (Poin)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			peningkatan penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB (poin)	
				Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	
				Persentase Potensi Konflik SARA yang terselesaikan (%)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
		11. Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat		Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	
			Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		12. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya kesadaran masyarakat generasi muda akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada sekolah Tingkat SLTA (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	7. Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana			Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	
				Indeks layanan infrastruktur daerah (%)	
		13. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Jalan Mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			minum	Penyaluran Air Minum (%)	PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yag tertatat	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan penataan Ruang		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Kualitas sistem drainase lingkungan	Persentase drainase lingkungan dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya layanan data dan informasi jasa konstruksi	Persentase Ketersediaan data dan informasi jasa kontruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			meningkatnya pengelolaan tanah kosong		2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			meningkatkan pengelolaan tanah tanah ulayat		2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
			Meningkatnya Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas..	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas.	Persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "B" pada jam sibuk (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			meningkatkan penyelesaian ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
			Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan		2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			irigas		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya Permukiman yang sudah Dilengkapi PSU		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara terkena bencana	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Tersedianya penunjang urusan pengelolaan pelayaran		2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		14. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
			Meningkatnya kualitas layanan informasi rawan bencana	Persentase cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase desa tangguh bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
			Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase dokumen Rekomendasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Program Unggulan “Sat Ananda Sakti”

Program Unggulan “Sat Ananda Sakti” atau Enam program sakti menuju kebahagiaan, merupakan salah satu fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Program ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. Dengan mengusung semangat gotong royong dan kolaborasi, “Sat Ananda Sakti” bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki layanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Melalui Program Unggulan “Sat Ananda Sakti,” Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis yang meliputi pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Program ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi pelaku aktif dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan partisipatif dan terintegrasi, “Sat Ananda Sakti” diharapkan dapat menjadi katalisator transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Lampung Barat di tingkat regional maupun nasional selama periode 2025-2029.

Tabel 3.10 Program Unggulan “Sat Ananda Sakti”

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
A	SDM Berakhlak	Seragam dan Tas Gratis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Jenis, 13.332 Siswa	2 Jenis, 13.599 Siswa	3 Jenis, 13871 Siswa	3 Jenis, 14.148 Siswa	3 Jenis, 14.432 Siswa
		Beasiswa S1 Jurusan Terkait Kopi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
		Semua Bisa Sekolah (Pendidikan Kesetaraan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga
		Seniman Masuk Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Orang	24 Orang	26 Orang	30 Orang	40 Orang
		Pembinaan Sanggar Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49 Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga
		Optimalisasi Taman Budaya Lamban Pancasila	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
		Bebas Stunting	Dinas Kesehatan	12.5	12	11.5	10.9	10.3
		Penguatan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	beasiswa dokter umum: 5	beasiswa dokter umum: 5	beasiswa dokter umum: 5	beasiswa dokter umum: 2	-
				dokter umum: 8	dokter umum: 11	dokter umum: 11	dokter umum: 14	dokter umum: 16
				beasiswa dokter gigi: 4	beasiswa dokter gigi: 6	beasiswa dokter gigi: 8	beasiswa dokter gigi: 10	beasiswa dokter gigi: 12
		Kemiskinan turun (nutrisi lansia dan kelompok rentan lainnya)	Dinas Sosial	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Kemiskinan turun (Bantuan KUBE)	Dinas Sosial	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok
		Penurunan pengangguran melalui revitalisasi peranan BLK	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1%	1%	1%	1%	1%
B	Ekonomi Gotong Royong	1 Penguatan sektor pertanian melalui bantuan sarana prasarana						
		"Budidaya Kopi Berkelanjutan"	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan Bibit Kopi Unggul		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha
		"Bebas OPT Kopi"	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan perangkat hama PBKo (Penggerek Buah Kopi)		20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha
		"Mutu Kopi Terbaik"	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan Huller		20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
		- Bantuan Pemecah Biji Kopi Basah		20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		- Bantuan Mesin Roasting, Mesin <i>Packaging</i> , dan Mesin Pembubuk		2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan
		- Terpaljemur (Optimalisasi Dasa Desa)		500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar
		- Mesin Babat Rumput		200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit
		<i>"Konsumsi Pangan Hewani Meningkat"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan Budidaya Ayam Buras		1500 ekor	1500 ekor	1500 ekor	1500 ekor	1500 ekor
		- Bantuan Budidaya Ternak Kambing		500 ekor	500 ekor	500 ekor	500 ekor	500 ekor
		2 Kemiskinan Turun						
		<i>"Tumpang Sari Kopi"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan saprodi dan pembinaan diversifikasi tanaman kopi dengan tanaman pangan atau hortikultura		50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha
		- Integrasi kopi dengan ternak		5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		kambing						
		- Mesin Pencacah Rumput/ <i>Chopper</i> untuk pakan ternak		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
		- Mesin APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik)		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
		3 Penguatan SDM Pertanian						
		"SDM Pertanian Unggul"	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bimbingan teknis atau pembinaan terhadap kelompok tani komoditas tanaman perkebunan		10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok
		- Diklat Paramedik Peternakan		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
		- Diklat Inseminator		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
		Pelatihan di Sekolah Kopi						
		- Pelatihan Budidaya Kopi		125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang
		- Pelatihan <i>Green Grading</i> /Sortasi Biji Kopi		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		- Pelatihan <i>Roasting</i> Kopi		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		- Pelatihan Uji Cita Rasa Kopi		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		- Pelatihan Barista		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		Penguatan Pendidikan Advokasi						
		- Pembentukan Kurikulum Pelatihan Sesuai SKKNI Kopi dan Standar Ekspor		1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum
		- Peningkatan Fasilitas dan alat Pelatihan						
		- Ruang Kelas			1 Ruang Kelas			1 Ruang Kelas
		- Alat Pelatihan		Kelengkapan Kelas Pelatihan Budi Daya	Kelengkapan Kelas Green Grading	Kelengkapan Kelas Roasting	Kelengkapan Kelas Barista	
		- Pembentukan Komunitas Penggiat Kopi		1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok
		Peningkatan Keterlibatan Generasi Muda						
		- Lomba Kopi dengan menggandeng anak muda sebagai pelaksana dan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Peserta kegiatan						
		- Mengikutsertakan generasi muda dalam pameran dan kompetensi		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
		4 Sekolah Kopi Masuk Pekon						
		"Sekolah Kopi Masuk Pekon"	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		Optimalisasi Dana Desa						
		- Sekolah Kopi Masuk Pekon sebagai wadah pelatihan bagi petani kopi dari cara budidaya yang baik hingga proses pasca panen, pengolahan dan lainnya dengan memanfaatkan potensi kopi di masing-masing desa/pekon		27 pekon	27 pekon	27 pekon	27 pekon	23 pekon

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		- Pendampingan Tenaga Pengajar/ Tutor Sekolah Kopi		11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang
		5 Penanganan hulu hilir kopi robusta						
		"Semua tentang Kopi"	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Pemantauan, pembinaan, dan bimbingan teknis budidaya kopi berkelanjutan, mutu kopi, dan pengolahan kopi		15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok
		Program seribu sarana usaha dan pembinaan pelaku usaha perikanan dalam 5 (Lima) Tahun	Dinas Perikanan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan
		Investasi Meningkatkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000.000	26.250.000.000	27.693.750.000	29.355.375.000	31.410.251.250

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Lampung Barat Creative Hub (Komunitas)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	3 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
		Sebagai kolaborator pada Event-Event (kegiatan) Promosi/Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Baik di dalam daerah, luar daerah, maupun nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Contoh : Pagelaran/Festival baik di dalam maupun luar daerah, Pameran Potensi Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya, dll.						
		BUMDES Berdaya Saing	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	5 Bumdes Status berkembang	6 Bumdes Status berkembang	7 Bumdes Status berkembang	8 Bumdes Status berkembang	9 Bumdes Status berkembang
		UMKM naik kelas	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	55 UMKM dan Koperasi	60 UMKM dan Koperasi	66 UMKM dan Koperasi	72 UMKM dan Koperasi	79 UMKM dan Koperasi

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Koperasi Merah Putih	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	136 desa/kel				
		Sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura						
		- Irigasi Pertanian Baik	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
		Penguatan SDM Pertanian						
		- Penyuluh Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
		- Kelompok Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani
C	Pemerintahan Transparan dan Melayani	Jemput Bola Pelayanan administrasi Kependudukan (Jebol Pelanduk)	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Mall Pelayanan Publik (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,400	2,600	2,800	3,000	3,200
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan RSUD)</i>	Dinas Kesehatan	83.00	84.00	85.00	86.00	86.00
		Kepatuhan Penyelenggara Negara Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%
		Birokrasi bebas korupsi	Inspektorat	3 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD)	3 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD)	4 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD, Puskesmas Balik Bukit)	4 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD, Puskesmas Balik Bukit)	4 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD, Puskesmas Balik Bukit)

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Sosialisasi dan pembinaan anti korupsi (Sosialisasi dan pembinaan anti korupsi)	Inspektorat	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)
		Pamong Membangun Inovasi Berkelanjutan (PM INTAN)	Badan Riset dan Inovasi Daerah	140 Inovasi	152 Inovasi	164 Inovasi	176 Inovasi	188 Inovasi
		Transformasi Digital Pelayanan Publik (satu klik untuk layanan publik)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
		Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi APBD dengan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	131 pekon	131 pekon	131 pekon	131 pekon	131 pekon
D	Lambar Sejuk dan Bersih	Kampanye sehari tanpa kendaraan bermotor (sepeda santai)	Dinas Lingkungan Hidup	200 peserta	250 peserta	300 peserta	350 peserta	400 peserta
		Bibit Tanaman Gratis	Dinas Lingkungan Hidup	2001 batang	2500 batang	3000 batang	3500 batang	4000 batang
		Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 5 Pekon = 25 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 5 Pekon = 25 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 6 Pekon = 30 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 6 Pekon = 30 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 6 Pekon = 30 Buah)

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Pengembangan Geopark Kaldera Suoh	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1 Dokumen Penetapan Geopark	1 Dokumen Penetapan Sekolah Lapang Geologi	1 Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	1 Lokasi Pusat Konservasi dan Rehabilitasi Flora dan Fauna	1 Dokumen Penetapan Geopark oleh UNESCO
E	Beriman dan bertoleransi	Bantuan Marbot, Imam, Guru Ngaji, Hafis qur'an, Guru Agama katholik dan Kristen	Sekretariat Daerah	136 Orang, 136 Orang, 544 Orang, 20 orang, 2 orang, 2 orang	272 Orang, 272 Orang, 544 Orang, 20 orang, 2 orang, 2 orang	272 Orang, 272 Orang, 544 Orang, 25orang, 2 orang, 2 orang	408 Orang, 408 Orang, 680 Orang, 2025orang, 2 orang, 2 orang	408 Orang, 408 Orang, 608 Orang, 30 orang, 2 orang, 2 orang
		Umroh Gratis dan Pelayanan Haji dan Wisata Religi	Sekretariat Daerah	100 Orang, 600 orang, 150 orang	125 Orang, 600 orang, 150 orang	150Orang, 600 orang, 200 orang	150 Orang, 600 orang, 200 orang	150 Orang, 600 orang, 200 orang
		Pembangunan Masjid	Sekretariat Daerah	1 Masjid	1 Masjid	1 Masjid	1 Masjid	1 Masjid
		Bantuan Rumah Ibadah	Sekretariat Daerah	20 Masjid	20 Masjid	20 Masjid	20 Masjid	20 Masjid
F	Infratraktur Mantap	Pembangunan Pustu Pekon	Dinas Kesehatan	7	3	4	3	1
		Jalan Bagus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.10%	60.40%	61.80%	63.30%	65.00%
		Irigasi Bagus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	60.00%	60.95%	61.90%	62.85%	63.80%

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Sanitasi sehat dan layak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	99.65%	99.75%	99.85%	99.95%	100.00%
		Air minum layak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	91.25%	92.25%	93.25%	94.25%	95.25%
		Seluruh wilayah terkoneksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.10%	60.40%	61.80%	63.30%	65.00%
		Penataan Kota Liwa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Zona 6	Zona 1, 6 dan 7	Zona 6, 8 dan 9	Zona 8 dan 9	Zona 4

Tabel 3.11. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Proyek Prioritas Nasional (PSN)

Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	PSN
Penguatan layanan pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, program Pendidikan non formal, wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tiasak sekolah, pengelolaan organisasi pemuda, prestasi pemuda, wirausaha muda, prestasi olahraga, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fungsi rumah sakit daerah, jaminan Kesehatan Masyarakat, pemeriksaan Kesehatan gratis, program keluarga harapan, perlindungan hak kaum disabilitas, Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat), Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa, Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan	Program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penyediaan layanan dasar yang merata dan terjangkau		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
Pengembangan keterampilan kerja berbasis potensi lokal dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan preventif		Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
Penguatan sistem perlindungan sosial dan ketahanan keluarga, serta optimalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota
Konsolidasi program lintas sektor dalam pembangunan SDM serta pengembangan SDM unggul melalui inovasi dan teknologi		Program Penuntasan TBC

Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	PSN
	pengentasan kemiskinan, penanganan Rawan Pangan, serta Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat. Kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi semua kelompok. Dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas sosial, pengendalian penduduk dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi terus didorong melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan akses dan ketersediaan pangan serta Ketahanan dan kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal. Di samping itu, pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.	

Tabel 3.12. Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan RPJMN

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
1	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Liwa, antara lain melalui:				
a	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	Optimalisasi pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUPR

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
b	Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau	Penguatan pengelolaan sampah dan limbah	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PUPR
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PUPR

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
c	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penyediaan layanan dasar yang merata dan terjangkau.	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, program Pendidikan non formal, wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tiasak sekolah, pengelolaan organisasi pemuda, prestasi pemuda, wirausaha muda, prestasi olahraga, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fungsi rumah sakit daerah, jaminan Kesehatan Masyarakat, pemeriksaan Kesehatan gratis, program keluarga harapan, perlindungan hak kaum disabilitas, Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat), Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa, Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, penanganan Rawan Pangan, serta Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat. Kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi semua kelompok. Dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas sosial, pengendalian penduduk dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi terus didorong melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan akses dan ketersediaan pangan serta ketahanan dan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnakerprin LB

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
			kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal. Di samping itu, pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.		

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
d	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Optimalisasi pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PUPR

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
2	Pengembangan SPAM Perkotaan Liwa	Penguatan akses air bersih dan sanitasi	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PUPR

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
3	Preservasi jalan ruas Liwa– Bukit kemuning dan Liwa–Krui	Pembangunan infrastruktur prioritas	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PUPR

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
4	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa (PHTC)	Penguatan layanan pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak sebagai fondasi peningkatan kualitas SDM jangka panjang	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, program Pendidikan non formal, wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tiasak sekolah, pengelolaan organisasi pemuda, prestasi pemuda, wirausaha muda, prestasi olahraga, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fungsi rumah sakit daerah, jaminan Kesehatan Masyarakat, pemeriksaan Kesehatan gratis, program keluarga harapan, perlindungan hak kaum disabilitas, Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat), Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa, Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, penanganan Rawan Pangan, serta Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat. Kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi semua kelompok. Dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas sosial, pengendalian penduduk dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi terus didorong melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan akses dan ketersediaan pangan serta ketahanan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
			kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal. Di samping itu, pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.		

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
5	Pengembangan kota agropolitan Liwa	Pembangunan infrastruktur prioritas	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUPR
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
6	Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, kelapa)	Peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi pangan	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
7	Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa)	Peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi pangan	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, BUMPekon, serta Koperasi Merah Putih yang dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
			ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa)	Pengembangan sektor unggulan daerah	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, BUMPekon, serta Koperasi Merah Putih yang dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
9	Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa)	Penguatan infrastruktur pertanian dan irigasi	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, BUMPekon, serta Koperasi Merah Putih yang dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
10	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa	Penguatan infrastruktur pertanian dan irigasi	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, BUMKed, serta Koperasi Merah Putih yang dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PUPR
11	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
			pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.		
12	Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
13	Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
14	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem,	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
			kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.		
15	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri	Penghijauan dan restorasi lahan kritis	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
16	Penguatan pengelolaan hutan lestari	Penghijauan dan restorasi lahan kritis	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
17	Perlindungan dan pengamanan hutan	Penghijauan dan restorasi lahan kritis	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
18	Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi	Penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
19	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	Penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
20	Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana	Pelatihan masyarakat tanggap bencana	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
21	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	Peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi pangan	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, program Pendidikan non formal, wajib belajar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
			13 tahun, penanganan anak tisak sekolah, pengelolaan organisasi pemuda, prestasi pemuda, wirausaha muda, prestasi olahraga, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fungsi rumah sakit daerah, jaminan Kesehatan Masyarakat, pemeriksaan Kesehatan gratis, program keluarga harapan, perlindungan hak kaum disabilitas, Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat), Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa, Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, penanganan Rawan Pangan, serta Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat. Kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi semua kelompok. Dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas sosial, pengendalian penduduk dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi terus didorong melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan akses dan ketersediaan pangan serta ketahanan dan kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal. Di samping itu, pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.		

No	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 3.13. Dukungan terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung

Program Unggulan Provinsi Lampung	Nama Program RPJMD Lampung Barat	OPD Lampung Barat	Bentuk dukungan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi bahan pangan dan Keamanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Perkebunan dan Peternakan	kampanye gizi produk peternakan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Fasilitasi UMKM Pendukung Makan Bergizi
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, produksi budidaya
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, produksi budidaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PMP	Pembinaan dan pengawasan Bumdes
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMP	fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa

Program Unggulan Provinsi Lampung	Nama Program RPJMD Lampung Barat	OPD Lampung Barat	Bentuk dukungan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Memberikan pelatihan dan Pendidikan untuk pelaku usaha lokal/UMKM dalam meningkatkan produksi yang berkualitas sesuai standar
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Menentukan target penerima manfaat (misalnya, siswa dari keluarga kurang mampu), Memastikan makanan bergizi gratis didistribusikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan siswa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Kab/kota untuk memperlancar distribusi makan bergizi gratis
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Memastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang diberikan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	memastikan gizi makanan yang diberikan sesuai standar
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	pelayanan kesehatan gizi masyarakat
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	pelayanan kesehatan ibu dan anak

Program Unggulan Provinsi Lampung	Nama Program RPJMD Lampung Barat	OPD Lampung Barat	Bentuk dukungan
Pemerataan Akses dan mutu pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	penanganan ATS
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	penguatan Literasi dan numerasi
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan program yang terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan potensi dan permasalahan daerah. Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD ini dirancang melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down, dan dituangkan dalam program kerja masing-masing perangkat daerah.

Program perangkat daerah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Setiap program mencerminkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Setiap perangkat daerah wajib menyusun program dan kegiatan secara rinci, yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Program-program tersebut juga harus mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU) serta selaras dengan indikator kinerja perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta memastikan keterpaduan antar sektor. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, guna mencapai target-target pembangunan secara optimal.

Program Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.1 V2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					332.989.794.750,66		412.608.108.865		449.325.386.879		488.951.616.672		540.911.637.098	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					269.531.027.482,66		325.794.207.217		358.284.749.967		394.016.263.968		433.320.738.104	
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	71,96	79,5	79,5	268.908.228.881	79,55	325.282.622.847	80	357.722.007.161	80,1	393.397.939.619	80,15	432.640.315.323	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila))	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	71,96	79,5	79,5	622.798.601,66	79,55	511.584.370	80	562.742.806	80,1	618.324.349	80,15	680.422.781	1.01.2.22.0.00.01.0001 - UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					63.245.267.468		85.391.049.000		89.560.499.000		93.397.201.000		105.993.932.120	
Meningkatnya mutu layanan Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (%)	56,52	56,52	56,85	63.245.267.468	57	85.391.049.000	58	89.560.499.000	59	93.397.201.000	60	105.993.932.120	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 (%)	98,4	98,4	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	14,91	14,91	15,21		20		25		30		35		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Iklim Inklusivitas SD (%)	57,57	57,57	58,77		59,97		61,27		62,47		63,77		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Iklim Inklusivitas SMP (%)	54,97	54,97	69,47		70,87		72,27		73,67		75,07		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Iklim Keamanan SD (%)	72,96	72,96	74,46		75,96		77,46		78,96		80,46		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Iklim Keamanan SMP (%)	66,76	66,76	68,16		69,56		70,96		72,36		73,76		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Iklim Kebinekaan SD (%)	68,56	68,56	69,96		71,36		72,76		74,16		75,56		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Iklim Kebinekaan SMP (%)	69,09	69,09	70,49		71,89		73,29		74,69		76,09		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	73,43	73,43	74,93		76,43		78,03		79,63		81,23		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	37,96	37,96	39,86		41,76		43,76		45,96		48,26		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Skor Kemampuan Literasi SD (%)	71,32	71,32	75,51		76,27		77,03		77,8		78,58		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Skor Kemampuan Literasi SMP (%)	68,09	68,09	69,45		70,84		72,26		73,71		75,18		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Skor Kemampuan Numerasi SMP (%)	65,12	65,12	65,12		66,42		67,82		69,22		70,62		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0		1.200.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000		1.350.000.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	41,51	55	55	0	65	1.200.000.000	80	1.250.000.000	90	1.300.000.000	100	1.350.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					49.574.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pemetaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru SD (%)	88	87	90	49.574.000	92	150.000.000	95	150.000.000	98	150.000.000	100	150.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Pemerataan Guru SMP (%)	107	107	106		104		102		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Pemerataan Guru TK (%)	102	102	101		100		100		100		100		100
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					163.925.800		72.852.648		80.137.912		88.151.704		96.966.874	
Meningkatnya bahasa dan sastra yang terlestarikan	Persentase sastra daerah yang dikembangkan (%)	15	15	23,08	163.925.800	30,77	72.852.648	38,46	80.137.912	46,15	88.151.704	53,85	96.966.874	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					197.665.933.353		198.248.456.821		205.776.725.160,5		209.132.721.803,4		208.494.800.944,4	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					103.635.917.439		103.704.047.169		107.573.276.085,8		107.585.167.329		107.585.167.329	
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	60.624.834.516	78,8	60.661.782.416	79,3	63.703.147.476,8	79,9	63.715.038.720	80,6	63.715.038.720	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD Alimuddin Umar)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	25.434.987.640	78,8	25.434.987.640	79,3	25.434.987.640	79,9	25.434.987.640	80,5	25.434.987.640	1.02.0.00.0.00.02.0001 - RSUD Alimuddin Umar
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS AIR HITAM)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	564.022.424	78,8	564.022.424	79,3	592.223.545	79,9	592.223.545	80,5	592.223.545	1.02.0.00.0.00.02.0005 - Puskesmas Air Hitam
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS BATU BRAK)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.195.301.057	78,8	1.195.301.057	79,3	1.255.066.110	79,9	1.255.066.110	80,5	1.255.066.110	1.02.0.00.0.00.02.0002 - Puskesmas Batu Brak
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS BATU KETULIS)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	965.907.220	78,8	997.089.050	79,3	1.046.943.503	79,9	1.046.943.503	80,5	1.046.943.503	1.02.0.00.0.00.02.0003 - Puskesmas Batu Ketulis
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.300.000.000	78,8	1.300.000.000	79,3	1.365.000.000	79,9	1.365.000.000	80,5	1.365.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0010 - Puskesmas Bandar Negeri Suoh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS BUAY NYERUPA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.104.512.000	78,8	1.104.512.000	79,3	1.159.737.600	79,9	1.159.737.600	80,5	1.159.737.600	1.02.0.00.0.00.02.0007 - Puskesmas Buay Nyerupa
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS FAJAR BULAN)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.757.600.231	78,8	1.757.600.231	79,3	1.845.480.243	79,9	1.845.480.243	80,5	1.845.480.243	1.02.0.00.0.00.02.0006 - Puskesmas Fajar Bulan
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS GEDUNG SURIAN)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.091.500.000	78,8	1.091.500.000	79,3	1.146.075.000	79,9	1.146.075.000	80,5	1.146.075.000	1.02.0.00.0.00.02.0011 - Puskesmas Gedung Surian
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS KENALI)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.179.771.960	78,8	1.179.771.960	79,3	1.238.760.558	79,9	1.238.760.558	80,5	1.238.760.558	1.02.0.00.0.00.02.0014 - Puskesmas Kenali
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS LIWA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.772.054.887	78,8	1.772.054.887	79,3	1.808.157.631	79,9	1.808.157.631	80,5	1.808.157.631	1.02.0.00.0.00.02.0012 - Puskesmas Liwa
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS LOMBOK)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	499.892.330	78,8	499.892.330	79,3	524.886.947	79,9	524.886.947	80,5	524.886.947	1.02.0.00.0.00.02.0013 - Puskesmas Lombok
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS PAGAR DEWA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	782.212.736	78,8	782.212.736	79,3	821.323.373	79,9	821.323.373	80,5	821.323.373	1.02.0.00.0.00.02.0015 - Puskesmas Pagar Dewa
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS SEKINCAU)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.648.753.249	78,8	1.648.753.249	79,3	1.731.190.911	79,9	1.731.190.911	80,5	1.731.190.911	1.02.0.00.0.00.02.0004 - Puskesmas Sekincau
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS SRIMULYO)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.141.880.000	78,8	1.141.880.000	79,3	1.198.974.000	79,9	1.198.974.000	80,5	1.198.974.000	1.02.0.00.0.00.02.0016 - Puskesmas Srimulyo
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS SUMBER JAYA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.170.487.349	78,8	1.170.487.349	79,3	1.229.011.716	79,9	1.229.011.716	80,5	1.229.011.716	1.02.0.00.0.00.02.0008 - Puskesmas Sumber Jaya
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PUSKESMAS KEBUN TEBU)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81	79	77,6	1.402.199.840	78,8	1.402.199.840	79,3	1.472.309.832	79,9	1.472.309.832	80,5	1.472.309.832	1.02.0.00.0.00.02.0009 - Puskesmas Kebun Tebu
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					85.987.745.914		86.412.965.652		89.814.132.599,7		92.915.109.864,4		92.277.189.005,4	
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98,53	98,53	98,53	62.110.959.156	98,82	62.523.203.894	99,11	65.205.522.558,7	99,39	68.306.499.823,4	100	67.668.578.964,4	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	CDR TB (%)	58	58	58		58		60		67		70		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Fasilitas Pelayanan KesehatanTerakreditasi Paripurna (Unit)	0	0	13		13		14		15		15		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Hasil Penilaian Akreditasi Rumah Sakit (Unit)	1	1	1		1		1		1		1		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86		87		88		89		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan RSUD (%)	60	62	67,7		67,9		68		68,2		68,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Alimuddin Umar)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan RSUD (%)	60	62	67,7	8.849.691.108	67,9	8.849.691.108	68	8.849.691.108	68,2	8.849.691.108	68,4	8.849.691.108	1.02.0.00.0.00.02.0001 - RSUD Alimuddin Umar
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS AIR HITAM)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.066.178.650	87	1.067.043.650	88	1.120.395.833	89	1.120.395.833	90	1.120.395.833	1.02.0.00.0.00.02.0005 - Puskesmas Air Hitam
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS BATU BRAK)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.015.770.650	87	1.016.635.650	88	1.067.467.433	89	1.067.467.433	90	1.067.467.433	1.02.0.00.0.00.02.0002 - Puskesmas Batu Brak
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS BATU KETULIS)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	996.224.050	87	997.089.050	88	1.046.943.713	89	1.046.943.713	90	1.046.943.713	1.02.0.00.0.00.02.0003 - Puskesmas Batu Ketulis
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.041.067.150	87	1.042.797.150	88	1.094.937.008	89	1.094.937.008	90	1.094.937.008	1.02.0.00.0.00.02.0010 - Puskesmas Bandar Negeri Suoh
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS BUAY NYERUPA)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	916.007.350	87	916.007.350	88	962.190.968	89	962.190.968	90	962.190.968	1.02.0.00.0.00.02.0007 - Puskesmas Buay Nyerupa
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS FAJAR BULAN)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	948.260.050	87	949.125.050	88	996.581.302,5	89	996.581.302,5	90	996.581.302,5	1.02.0.00.0.00.02.0006 - Puskesmas Fajar Bulan
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS GEDUNG SURIAN)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	859.151.650	87	860.881.650	88	903.904.732,5	89	903.904.732,5	90	903.904.732,5	1.02.0.00.0.00.02.0011 - Puskesmas Gedung Surian
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat(PUSKESMAS KENALI)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	951.659.050	87	952.524.050	88	1.000.150.253	89	1.000.150.253	90	1.000.150.253	1.02.0.00.0.00.02.0014 - Puskesmas Kenali
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS LIWA)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	973.471.650	87	973.471.650	88	1.004.832.250	89	1.004.832.250	90	1.004.832.250	1.02.0.00.0.00.02.0012 - Puskesmas Liwa
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS LOMBOK)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	850.388.050	87	851.253.050	88	893.815.703	89	893.815.703	90	893.815.703	1.02.0.00.0.00.02.0013 - Puskesmas Lombok
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS PAGAR DEWA)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.212.745.250	87	1.214.475.250	88	1.275.199.013	89	1.275.199.013	90	1.275.199.013	1.02.0.00.0.00.02.0015 - Puskesmas Pagar Dewa
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS SEKINCAU)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.026.960.050	87	1.026.960.050	88	1.062.103.320	89	1.062.103.320	90	1.062.103.320	1.02.0.00.0.00.02.0004 - Puskesmas Sekincau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat(PUSKESMAS SRIMULYO)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.046.149.150	87	1.047.014.150	88	1.099.364.858	89	1.099.364.858	90	1.099.364.858	1.02.0.00.0.00.02.0016 - Puskesmas Srimulyo
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS SUMBER JAYA)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.008.491.050	87	1.009.356.050	88	1.059.823.853	89	1.059.823.853	90	1.059.823.853	1.02.0.00.0.00.02.0008 - Puskesmas Sumber Jaya
Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS KEBUN TEBU)	Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (%)	87	88	86	1.114.571.850	87	1.115.436.850	88	1.171.208.693	89	1.171.208.693	90	1.171.208.693	1.02.0.00.0.00.02.0009 - Puskesmas Kebun Tebu
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					7.289.257.200		7.378.431.200		7.594.454.760		7.810.478.320		7.810.478.320	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase Fasyankes yang memenuhi SDMK sesuai standart (%)	65	70	100	4.231.297.200	100	4.320.471.200	100	4.536.494.760	100	4.752.518.320	100	4.752.518.320	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Nakes RSUD yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase SDMK RSUD yang memenuhi standart (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	Persentase Nakes RSUD yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya (%)	100	100	100	3.057.960.000	100	3.057.960.000	100	3.057.960.000	100	3.057.960.000	100	3.057.960.000	1.02.0.00.0.00.02.0001 - RSUD Alimuddin Umar
	Persentase SDMK RSUD yang memenuhi standart (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0001 - RSUD Alimuddin Umar		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					422.081.000		422.081.000		447.383.325		464.289.100		464.289.100	
Terlaksananya Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Dinas Kesehatan)	Persentase Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang di lakukan pengendalian dan pengawasan (%)	80	85	75	422.081.000	80	422.081.000	82,5	447.383.325	85	464.289.100	90	464.289.100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					330.931.800		330.931.800		347.478.390		357.677.190		357.677.190	
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase Keluarga ber PHBS (%)	40	45	58	203.976.000	58,5	203.976.000	60	214.174.800	60,5	224.373.600	68	224.373.600	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35		45		55		60		70		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS AIR HITAM)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	6.950.000	45	6.950.000	55	7.297.500	60	7.297.500	70	7.297.500	1.02.0.00.0.00.02.0005 - Puskesmas Air Hitam
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS BATU BRAK)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	9.118.000	45	9.118.000	55	9.573.900	60	9.573.900	70	9.573.900	1.02.0.00.0.00.02.0002 - Puskesmas Batu Brak
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS BATU KETULIS)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	8.046.000	45	8.046.000	55	8.448.300	60	8.448.300	70	8.448.300	1.02.0.00.0.00.02.0003 - Puskesmas Batu Ketulis
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	6.304.000	45	6.304.000	55	6.619.200	60	6.619.200	70	6.619.200	1.02.0.00.0.00.02.0010 - Puskesmas Bandar Negeri Suoh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS BUAY NYERUPA)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	8.132.000	45	8.132.000	55	8.538.600	60	8.538.600	70	8.538.600	1.02.0.00.0.00.02.0007 - Puskesmas Buay Nyerupa
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS FAJAR BULAN)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	7.900.000	45	7.900.000	55	8.295.000	60	8.295.000	70	8.295.000	1.02.0.00.0.00.02.0006 - Puskesmas Fajar Bulan
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS GEDUNG SURIAN)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	7.691.800	45	7.691.800	55	8.076.390	60	8.076.390	70	8.076.390	1.02.0.00.0.00.02.0011 - Puskesmas Gedung Surian
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS KENALI)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	8.850.000	45	8.850.000	55	9.292.500	60	9.292.500	70	9.292.500	1.02.0.00.0.00.02.0014 - Puskesmas Kenali
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS LIWA)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	9.564.000	45	9.564.000	55	10.042.200	60	10.042.200	70	10.042.200	1.02.0.00.0.00.02.0012 - Puskesmas Liwa
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS LOMBOK)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	10.472.000	45	10.472.000	55	10.995.600	60	10.995.600	70	10.995.600	1.02.0.00.0.00.02.0013 - Puskesmas Lombok
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS PAGAR DEWA)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	7.839.000	45	7.839.000	55	8.230.950	60	8.230.950	70	8.230.950	1.02.0.00.0.00.02.0015 - Puskesmas Pagar Dewa
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS SEKINCAU)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	12.338.000	45	12.338.000	55	12.954.900	60	12.954.900	70	12.954.900	1.02.0.00.0.00.02.0004 - Puskesmas Sekincau
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS SRIMULYO)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	7.140.000	45	7.140.000	55	7.497.000	60	7.497.000	70	7.497.000	1.02.0.00.0.00.02.0016 - Puskesmas Srimulyo
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS SUMBER JAYA)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	10.362.000	45	10.362.000	55	10.880.100	60	10.880.100	70	10.880.100	1.02.0.00.0.00.02.0008 - Puskesmas Sumber Jaya
Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PUSKESMAS KEBUN TEBU)	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	35	35	35	6.249.000	45	6.249.000	55	6.561.450	60	6.561.450	70	6.561.450	1.02.0.00.0.00.02.0009 - Puskesmas Kebun Tebu
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					136.706.894.848,6		157.228.726.825		160.664.797.508		163.838.275.259		167.438.262.285	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.416.887.475		7.774.706.825		8.400.777.508		9.089.355.259		9.089.355.259	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81,55	80,05	80,3	9.416.887.475	80,55	7.774.706.825	80,8	8.400.777.508	81,05	9.089.355.259	81,3	9.089.355.259	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					41.113.309.000		19.782.700.000		21.520.700.000		20.666.800.000		20.666.800.000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigas	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	58,17	59,09	60	41.113.309.000	60,95	19.782.700.000	61,9	21.520.700.000	62,85	20.666.800.000	63,8	20.666.800.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0,915	0,915	1,1		1,1		1,1		1,1		1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					8.023.566.400		10.100.000.000		10.600.000.000		10.600.000.000		10.600.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	0	88,81	89,15	8.023.566.400	89,49	10.100.000.000	89,83	10.600.000.000	90,17	10.600.000.000	90,52	10.600.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.199.913.000		9.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		9.199.987.001	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	0	96,35	96,6	1.199.913.000	96,85	9.000.000.000	97,1	6.000.000.000	97,35	6.000.000.000	97,6	9.199.987.001	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.574.459.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya Kualitas sistem drainase lingkungan	Persentase drainase lingkungan dalam Kondisi Baik (%)	6	8	10	2.574.459.000	25	600.000.000	50	600.000.000	75	600.000.000	100	600.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					3.706.865.573,6		10.500.000.000		10.500.000.000		10.500.000.000		10.500.000.000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (%)	100	100	10	3.706.865.573,6	25	10.500.000.000	50	10.500.000.000	75	10.500.000.000	100	10.500.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.000.000.025	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertatat	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%)	0	0	15	0	30	600.000.000	45	600.000.000	60	600.000.000	100	1.000.000.025	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					70.161.651.400		97.495.000.000		100.867.000.000		104.405.800.000		104.405.800.000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Jalan Mantap (%)	0	59,1	60,4	70.161.651.400	61,8	97.495.000.000	63,3	100.867.000.000	65	104.405.800.000	66,7	104.405.800.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					76.320.000		76.320.000		76.320.000		76.320.000		76.320.000	
Meningkatnya layanan data dan informasi jasa konstruksi	Persentase Ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	0	100	20	76.320.000	40	76.320.000	60	76.320.000	80	76.320.000	100	76.320.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					433.923.000		1.300.000.000		1.500.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang di Kabupaten (%)	100	100	100	433.923.000	100	1.300.000.000	100	1.500.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					13.040.416.580		17.958.358.398		17.966.653.398		17.975.363.148		18.239.262.398	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					175.808.182		2.365.900.000		2.374.195.000		2.382.904.750		2.646.804.000	
Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara terkena bencana	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah (%)	0	0	20	175.808.182	40	2.365.900.000	60	2.374.195.000	80	2.382.904.750	100	2.646.804.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					572.150.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (%)	0	0	0,05	572.150.000	0,55	3.300.000.000	0,25	3.300.000.000	0,25	3.300.000.000	0,85	3.300.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					12.292.458.398		12.292.458.398		12.292.458.398		12.292.458.398		12.292.458.398	
Meningkatnya Permukiman yang sudah Dilengkapi PSU	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	0	0	19	12.292.458.398	38	12.292.458.398	58	12.292.458.398	79	12.292.458.398	100	12.292.458.398	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					18.896.391.576		32.706.861.054		33.083.966.774		33.774.285.550		34.543.910.862	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.540.687.726		17.515.997.369		17.790.227.206		18.091.880.026		18.423.698.128	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah (SATPOL PP)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	78,11	78,5	78,5	9.132.580.175	79	13.829.939.000	79	13.829.939.000	80	13.829.939.000	81,6	13.829.939.000	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah (BPBD)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	82	82	82	3.408.107.551	82	3.686.058.369	82	3.960.288.206	82	4.261.941.026	82	4.593.759.128	1.05.0.00.0.00.25.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.943.353.000		5.521.000.000		5.521.000.000		5.521.000.000		5.521.000.000	
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	1.943.353.000	100	5.521.000.000	100	5.521.000.000	100	5.521.000.000	100	5.521.000.000	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.878.764.050		2.693.863.685		2.796.739.568		3.185.405.524		3.623.212.734	
Meningkatnya kualitas layanan informasi rawan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0,02	0,02	0,06	42.725.400	0,06	150.000.000	0,06	150.000.000	0,06	400.000.000	0,06	150.000.000	1.05.0.00.0.00.25.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase desa tangguh bencana (%)	26,47	28,68	33,09	1.115.901.500	37,5	1.452.552.460	41,91	1.462.476.220	46,32	1.511.223.842	50,47	2.114.846.226	1.05.0.00.0.00.25.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	504.830.150	100	578.311.225	100	649.263.348	100	714.181.682	100	773.366.508	1.05.0.00.0.00.25.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase dokumen Rekomendasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (%)	70	70	70	215.307.000	70	513.000.000	70	535.000.000	70	560.000.000	70	585.000.000	1.05.0.00.0.00.25.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.533.586.800		6.976.000.000		6.976.000.000		6.976.000.000		6.976.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	100	100	92	2.533.586.800	94	6.976.000.000	96	6.976.000.000	98	6.976.000.000	100	6.976.000.000	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	15		15		15		15		1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.776.285.224		8.130.632.208		8.693.656.812		9.249.285.650		9.904.111.052	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.548.138.462		4.555.632.208		4.888.656.812		5.268.285.650		5.632.111.052	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80	78,95	79,2	3.548.138.462	79,3	4.555.632.208	79,4	4.888.656.812	79,5	5.268.285.650	79,6	5.632.111.052	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					192.584.000		310.000.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000	
Meningkatnya peran Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	Presentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	33,51	0	4,72	47.694.000	47,48	120.000.000	47,48	125.000.000	47,48	130.000.000	47,48	135.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Kualitas Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan sosial	Presentase Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	0	0	7	144.890.000	21	190.000.000	21	190.000.000	21	190.000.000	21	190.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					955.370.000		1.440.000.000		1.620.000.000		1.745.000.000		1.965.000.000	
Meningkatnya Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	39,1	19,55	6,77	390.032.000	7,45	640.000.000	7,56	740.000.000	7,63	820.000.000	7,92	980.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Anak Terlantar terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Anak Terlantar terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	112.278.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Presentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	0	63,23	453.060.000	63,74	650.000.000	64,24	715.000.000	64,75	745.000.000	65,76	785.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					633.160.000		920.000.000		945.000.000		970.000.000		1.005.000.000	
Meningkatnya Masyarakat Rentan Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Masyarakat Rentan Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	0	0,03	98.650.000	0,59	350.000.000	0,59	350.000.000	0,59	350.000.000	0,59	350.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pekon/Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan pendataan data fakir miskin	Presentase Pekon/Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan pendataan data fakir miskin (%)	100	100	100	104.000.000	100	120.000.000	100	140.000.000	100	160.000.000	100	180.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Keluarga Miskin dan Rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Presentase Keluarga Miskin dan Rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0	0	1,3	430.510.000	1,72	450.000.000	2,12	455.000.000	2,52	460.000.000	2,92	475.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					283.891.000		685.000.000		700.000.000		716.000.000		742.000.000	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau nonalam yang	Presentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau nonalam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	283.891.000	100	625.000.000	100	630.000.000	100	636.000.000	100	642.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya pelayanan pemulihan sosial bagi korban bencana	Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	0	0	0	0	11,25	60.000.000	12,5	70.000.000	13,75	80.000.000	15	100.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					163.141.762		220.000.000		225.000.000		230.000.000		235.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase komponen utama taman makam pahlawan yang direhabilitasi (%)	78,57	78,57	85,71	163.141.762	85,71	220.000.000	85,71	225.000.000	85,71	230.000.000	85,71	235.000.000	1.06.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.840.869.346		4.401.603.396		4.301.603.396		4.301.603.396		4.301.603.396	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.623.398.850		3.112.500.000		3.112.500.000		3.112.500.000		3.112.500.000	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80	80	80	2.623.398.850	80	3.112.500.000	80	3.112.500.000	80	3.112.500.000	80	3.112.500.000	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		100.000.000		0		0		0	
Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD (%)	0	0	25	0	25	100.000.000	25	0	25	0	25	0	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					325.731.500		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat (Orang)	40	30	40	325.731.500	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	5	5	5	220.000.000	5	220.000.000	5	220.000.000	5	220.000.000	5	220.000.000	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					671.738.996		669.103.396		669.103.396		669.103.396		669.103.396	
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja yang dilindungi dan Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina ()	100	100	100	671.738.996	100	669.103.396	100	669.103.396	100	669.103.396	100	669.103.396	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.827.928.100		5.924.092.255		6.453.623.410		6.881.528.281		7.397.995.068	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.585.872.050		3.899.000.855		4.184.442.010		4.457.026.881		4.706.741.668	
meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PPKBPPPA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,01	80	78	3.585.872.050	78,5	3.899.000.855	79	4.184.442.010	79,5	4.457.026.881	80	4.706.741.668	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					317.677.500		210.000.000		290.000.000		260.000.000		345.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	% ARG pada APBD (%)	2,5	4	5	317.677.500	6	210.000.000	7	290.000.000	8	260.000.000	10	345.000.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					71.184.200		341.710.000		371.710.000		401.710.000		431.710.000	
Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	0	100	211.710.000	100	231.710.000	100	251.710.000	100	271.710.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan (PPKBPPPA)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	44.474.200	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	26.710.000	100	0	100	0	100	0	100	0	2.08.2.14.0.00.11.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					43.048.000		107.000.000		127.000.000		147.000.000		167.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
-Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak seta perlindungan perempuan dan anak	Puspaga yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar (Buah)	0	0	0	43.048.000	0	107.000.000	1	127.000.000	1	147.000.000	1	167.000.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					31.157.700		50.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	57,29	58	59	31.157.700	59,5	50.000.000	60	70.000.000	60,5	80.000.000	61	90.000.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					297.076.250		263.500.000		286.000.000		318.000.000		352.000.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	57,29	57,29	59	297.076.250	59,5	263.500.000	60	286.000.000	60,5	318.000.000	61	352.000.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					481.912.400		1.052.881.400		1.124.471.400		1.217.791.400		1.305.543.400	
meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantarn , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	2.08.2.14.0.00.11.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Peningkatan AMPK yang mendapatkan layanan komprehensif					0		558.610.000		619.200.000		683.520.000		751.272.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.11.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PPKBPPPA)	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	224.141.000	100	236.500.000	100	247.500.000	100	276.500.000	100	296.500.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)					257.771.400		257.771.400		257.771.400		257.771.400		257.771.400	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.11.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.945.340.475		4.569.000.000		4.677.000.000		4.754.000.000		4.845.000.000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.903.751.975		3.015.000.000		3.034.000.000		3.043.000.000		3.052.000.000	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	72,61	80	80	2.903.751.975	80	3.015.000.000	80	3.034.000.000	80	3.043.000.000	80	3.052.000.000	2.09.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					84.618.000		105.000.000		130.000.000		135.000.000		135.000.000	
Terwujudnya Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur kemandirian Pangan Pemerintah (%)	1,4	1,4	2,2	84.618.000	4,4	105.000.000	6,6	130.000.000	8,8	135.000.000	11	135.000.000	2.09.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					734.371.500		979.000.000		1.030.000.000		1.080.000.000		1.149.000.000	
Terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (Skor)	87	84,1	88	734.371.500	88,5	979.000.000	89	1.030.000.000	89,5	1.080.000.000	90	1.149.000.000	2.09.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Tercapainya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama (beras) (Ton)	191.000	192.000	193.000	0	194.000	0	195.000	0	196.000	0	197.000	0	2.09.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	2.09.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					129.685.500		220.000.000		233.000.000		246.000.000		259.000.000	
Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,5	11,02	10,5	129.685.500	10	220.000.000	9,5	233.000.000	9	246.000.000	8,5	259.000.000	2.09.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					92.913.500		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	97,2	97,2	98,12	92.913.500	98,58	250.000.000	99,04	250.000.000	99,05	250.000.000	100	250.000.000	2.09.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.029.505.000		1.790.000.000		1.770.000.000		1.770.000.000		1.770.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					109.655.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
meningkatnya penyelesaian ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	0	20	109.655.000	40	90.000.000	60	120.000.000	80	120.000.000	100	120.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					200.140.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	persentase penyelsaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	100	20	200.140.000	40	700.000.000	60	700.000.000	80	700.000.000	100	700.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
meningkatnya pengelolaan tanah tanah ulayat	Persentase tanah ulayat yang di tetapkan (%)	0	0	0	0	40	50.000.000	60	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					719.710.000		950.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan)	1	1	1	719.710.000	1	950.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1.03.1.04.2.10.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.457.178.471		28.204.759.861		31.052.735.846		34.579.352.351		38.404.287.584	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.055.746.115		10.697.042.309		11.766.746.539		12.943.421.193		14.237.763.313	
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	82,46	81,98	81,99	5.055.746.115	82	10.697.042.309	82,1	11.766.746.539	82,15	12.943.421.193	82,2	14.237.763.313	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					604.459.000		664.904.900		731.395.390		804.534.929		1.184.988.422	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Mitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang tertindaklanjuti (%)	0	100	100	604.459.000	100	664.904.900	100	731.395.390	100	804.534.929	100	1.184.988.422	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					334.608.300		785.095.350		863.604.885		1.371.308.294		1.505.439.120	
Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	66,06	58,74	82,3	334.608.300	82,5	785.095.350	82,7	863.604.885	82,9	1.371.308.294	83,1	1.505.439.120	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93,52	82,24	72,89		73,29		73,69		74,09		74,49		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.503.923.756		2.904.316.352		3.139.747.987		3.453.722.785		3.869.095.064	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	42,32	44,74	65,86	2.503.923.756	65,93	2.904.316.352	66	3.139.747.987	66,07	3.453.722.785	66,14	3.869.095.064	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ruang terbuka hijau (%)	0	0	60		70		80		90		100		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					60.323.600		3.200.000.000		3.520.000.000		3.872.000.000		4.259.200.000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	100	60.323.600	100	3.200.000.000	100	3.520.000.000	100	3.872.000.000	100	4.259.200.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					53.901.000		659.291.100		725.220.210		797.742.231		877.516.454	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	0	0	63	53.901.000	66	659.291.100	70	725.220.210	75	797.742.231	80	877.516.454	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0		300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan bak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	0	0	100	300.000.000	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					201.820.500		222.002.550		244.202.805		268.623.086		295.485.394	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	201.820.500	100	222.002.550	100	244.202.805	100	268.623.086	100	295.485.394	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					159.557.000		175.512.700		193.063.970		212.370.367		233.607.404	
meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	10	159.557.000	15	175.512.700	20	193.063.970	25	212.370.367	30	233.607.404	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					0		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000	
peningkatan penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	0	0	100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.482.839.200		8.196.594.600		9.098.754.060		10.008.629.466		11.009.492.413	
meningkatkan tata kelola persampahan	Persentase Jumlah Sampah Terkurangi (%)	0	0	25	4.482.839.200	21	8.196.594.600	24	9.098.754.060	27	10.008.629.466	30	11.009.492.413	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Jumlah Sampah Tertangani (%)	0	0	75		79		76		73		70		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL					5.245.397.896		5.852.162.686		6.437.378.954		7.081.116.850		7.789.228.534	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.921.704.496		4.313.874.946		4.745.262.440		5.219.788.684		5.741.767.553	
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,5	80	80,2	30.606.500	80,25	33.667.150	80,3	37.033.865	80,35	40.737.252	80,4	44.810.977	2.12.0.00.0.00.09.0001 - UPT Disdukcapil Way Tenong
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,5	80	80,2	3.891.097.996	80,25	4.280.207.796	80,3	4.708.228.575	80,35	5.179.051.432	80,4	5.696.956.576	2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					554.442.000		653.611.200		718.972.320		790.869.552		869.956.507	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2,72	2,94	3,16	554.442.000	3,38	653.611.200	3,61	718.972.320	3,83	790.869.552	4,06	869.956.507	2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	81,5	81,6	81,7		81,8		81,9		82		82,1		2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENDATATAN SIPIL					155.199.500		209.219.450		230.141.395		253.155.535		278.471.087	
Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	155.199.500	100	209.219.450	100	230.141.395	100	253.155.535	100	278.471.087	2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					583.330.000		641.663.000		705.829.300		776.412.230		854.053.453	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	20	30	40	583.330.000	50	641.663.000	63	705.829.300	81	776.412.230	100	854.053.453	2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					30.721.900		33.794.090		37.173.499		40.890.849		44.979.934	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	68,5	71	75	30.721.900	78,57	33.794.090	82	37.173.499	85,71	40.890.849	89,28	44.979.934	2.12.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.718.390.051		9.805.611.463		11.256.154.727		12.674.506.044		14.316.995.172	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.576.274.751		4.091.682.543		4.702.861.059		5.407.756.546		6.218.203.546	
Meningkatnya Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	82	82,5	83	3.576.274.751	83,5	4.091.682.543	84	4.702.861.059	84,5	5.407.756.546	85	6.218.203.546	2.13.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					699.999.800		1.090.403.570		1.455.077.320		1.673.290.268		1.924.283.809	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	22,14	38,16	61	699.999.800	61,07	1.090.403.570	68,7	1.455.077.320	76,34	1.673.290.268	83,87	1.924.283.809	2.13.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					75.000.000		86.250.000		99.187.500		114.065.000		131.174.750	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	2,29	2,29	2,29	75.000.000	2,29	86.250.000	2,29	99.187.500	2,29	114.065.000	2,29	131.174.750	2.13.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.400.001.500		3.032.158.350		3.258.652.900		3.518.471.125		3.817.279.798	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentas Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100	2.400.001.500	100	3.032.158.350	100	3.258.652.900	100	3.518.471.125	100	3.817.279.798	2.13.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					967.114.000		1.505.117.000		1.740.375.948		1.960.923.105		2.226.053.269	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	50	50	50	967.114.000	50	1.505.117.000	50	1.740.375.948	62,5	1.960.923.105	75	2.226.053.269	2.13.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.827.832.320		6.489.424.235		7.130.866.144		7.606.562.968		8.315.217.873	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					541.800.000		591.000.000		630.400.000		675.860.000		724.046.000	
Terkendalnya penambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	0	0-0	32.3-32.3	541.800.000	32.0-32.0	591.000.000	31.7-31.7	630.400.000	31.5-31.5	675.860.000	31.00-31.00	724.046.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	0	0	61		61,5		62		62,5		63		2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	0	2,46		2,45		2,44		2,43		2,42		2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					7.084.016.020		4.375.210.995		4.842.682.094		5.295.670.303		5.811.136.832	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	0	0	8,7	7.084.016.020	8,4	4.375.210.995	8,1	4.842.682.094	7,8	5.295.670.303	7,5	5.811.136.832	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	0	0	75,6		75,7		75,8		75,9		76		2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.202.016.300		1.523.213.240		1.657.784.050		1.635.032.665		1.780.035.041	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Persentase calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)	0	0	65	1.202.016.300	67	1.523.213.240	70	1.657.784.050	75	1.635.032.665	76	1.780.035.041	2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase kelompok sasaran mendapatkan pendampingan oleh TPK (%)	0	0	65		67,5		70		75		75		2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	0	0	12,7		12,9		13,1		13,2		13,5		2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan dalam 42 hari pasca persalinan (%)	0	0	72		73		74		74		75		2.08.2.14.0.00.11.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.191.940.841		15.683.826.600		16.779.709.260		19.279.745.186		19.007.114.705	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.961.106.116		4.852.326.600		5.304.559.260		5.868.015.186		6.345.311.705	
Meningkatnya Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80,81	81	81	3.961.106.116	81,24	4.852.326.600	81,65	5.304.559.260	82,06	5.868.015.186	82,47	6.345.311.705	2.15.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.138.475.775		10.256.500.000		11.337.650.000		12.860.480.000		12.495.428.000	
Meningkatnya Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas.	Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan (%)	8	9	10	0	20	0	30	0	40	0	50	0	2.15.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas..	Persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "B" pada jam sibuk (%)	10	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	2.15.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)	17	16	15	5.138.475.775	14	10.256.500.000	13	11.337.650.000	12	12.860.480.000	11	12.495.428.000	2.15.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					92.358.950		575.000.000		137.500.000		551.250.000		166.375.000	
Tersedianya penunjang urusan pengelolaan pelayaran	Persentase Dermaga Sesuai Standar (%)	4	5	5	92.358.950	10	575.000.000	15	137.500.000	20	551.250.000	25	166.375.000	2.15.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.201.598.210		10.213.663.031		11.235.029.335		12.358.532.270		13.594.385.497	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.692.898.266		4.130.388.093		4.543.426.903		4.997.769.594		5.497.546.554	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	82,5	82,6	82,7	3.692.898.266	82,8	4.130.388.093	82,9	4.543.426.903	83	4.997.769.594	83,1	5.497.546.554	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.406.688.200		3.747.357.020		4.122.092.722		4.534.301.994		4.987.732.194	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks KIP (%)	85,7	86	87	3.406.688.200	88	3.747.357.020	89	4.122.092.722	90	4.534.301.994	91	4.987.732.194	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.102.011.744		2.335.917.918		2.569.509.710		2.826.460.682		3.109.106.749	
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks PEMDI (Poin)	2,62	1,3	1,35	2.102.011.744	1,4	2.335.917.918	1,45	2.569.509.710	1,5	2.826.460.682	1,55	3.109.106.749	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.563.393.570		4.889.223.747		5.376.996.122		5.907.545.733		6.490.650.306	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.858.394.970		4.066.413.967		4.471.905.364		4.917.945.900		5.408.590.489	
Meningkatnya Nilai Sakip OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	84,21	85,21	86,21	3.858.394.970	87,21	4.066.413.967	88,21	4.471.905.364	89,21	4.917.945.900	90,21	5.408.590.489	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	34	35	26	60.000.000	28	66.000.000	30	72.600.000	32	79.860.000	34	87.846.000	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					149.899.000		100.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000	
Terwujudnya koperasi yang meningkat volume usaha	Persentase koperasi yang meningkat volume usaha (%)	4	8	18	149.899.000	20	100.000.000	22	110.000.000	24	115.000.000	26	120.000.000	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					495.099.600		656.809.780		722.490.758		794.739.833		874.213.817	
Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	9	12	15	495.099.600	16	656.809.780	17	722.490.758	18	794.739.833	19	874.213.817	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.744.967.700		5.428.819.190		5.564.140.259		5.971.991.935		6.486.631.179	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.637.798.000		2.736.321.500		3.009.953.650		3.310.949.015		3.642.043.917	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	84,41	79,5	80,5	2.637.798.000	81	2.736.321.500	81,5	3.009.953.650	82	3.310.949.015	82,5	3.642.043.917	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					84.942.000		350.000.000		60.000.000		0		0	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	0	20	25	84.942.000	75	350.000.000	100	60.000.000	0	0	100	0	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					469.340.000		1.760.000.000		1.853.438.950		1.956.221.795		2.069.282.925	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	3	5	469.340.000	5	1.760.000.000	10	1.853.438.950	10	1.956.221.795	15	2.069.282.925	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					393.569.800		407.248.000		447.973.000		492.769.000		542.047.000	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	95	393.569.800	96	407.248.000	97	447.973.000	99	492.769.000	99	542.047.000	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan Standar Layanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					125.317.900		137.849.690		151.634.659		166.798.125		183.477.937	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan LKPM (%)	0	90	90	125.317.900	92	137.849.690	95	151.634.659	95	166.798.125	99	183.477.937	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					34.000.000		37.400.000		41.140.000		45.254.000		49.779.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diakses dan Dipublikasikan Melalui Media Publikasi Website DPMP TSP (%)	100	100	100	34.000.000	100	37.400.000	100	41.140.000	100	45.254.000	100	49.779.400	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.832.968.590		8.475.051.519		9.322.556.670		10.254.812.336		11.280.293.562	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.060.593.890		4.505.227.199		4.955.749.918		5.451.324.909		5.996.457.397	
Meningkatnya SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	72,75	74,36	75,36	4.060.593.890	76,87	4.505.227.199	78,4	4.955.749.918	79,97	5.451.324.909	81,57	5.996.457.397	2.19.3.26.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					443.330.500		1.571.518.300		1.728.670.130		1.901.537.143		2.091.690.855	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	0	3,04	443.330.500	3,11	1.571.518.300	3,2	1.728.670.130	3,33	1.901.537.143	3,5	2.091.690.855	2.19.3.26.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.329.044.200		2.398.306.020		2.638.136.622		2.901.950.284		3.192.145.310	
Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet yang ikut event olahraga (%)	38	41	42	1.329.044.200	43	2.398.306.020	44	2.638.136.622	45	2.901.950.284	46	3.192.145.310	2.19.3.26.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					238.001.000		272.801.100		300.081.210		330.089.331		363.098.264	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					238.001.000		272.801.100		300.081.210		330.089.331		363.098.264	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,46	2,6	2,8	238.001.000	3	272.801.100	3,2	300.081.210	3,4	330.089.331	3,6	363.098.264	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					410.759.000		451.834.900		497.018.390		546.720.229		601.392.252	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					410.759.000		451.834.900		497.018.390		546.720.229		601.392.252	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Poin)	1	1,5	2	410.759.000	2,5	451.834.900	3	497.018.390	3,5	546.720.229	4	601.392.252	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.969.630.900		2.704.137.890		2.929.051.822		3.066.457.004		3.317.601.714	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					895.716.400		1.292.504.300		1.371.254.873		1.457.880.360		1.553.167.406	
Meningkatnya pemajuan kebudayaan Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WB TB (%)	13,49	13,49	15,73	895.716.400	17	1.292.504.300	18	1.371.254.873	19	1.457.880.360	20	1.553.167.406	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					550.000.000		772.750.000		795.025.000		819.527.500		846.480.250	
Terlaksananya pelestarian kesenian daerah	Persentase Lembaga Kesenian yang dibina (%)	4,08	10	10,2	550.000.000	20,41	772.750.000	30,61	795.025.000	40,82	819.527.500	51,02	846.480.250	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase SDM Kesenian Pesrta Didik yang ditingkatkan pengetahuannya (%)	0,83	1,55	1,55		2,29		3,04		3,79		4,53		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					79.338.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	
Meningkatnya pengetahuan masyarakat lampung barat tentang informasi sejarah	Persentase peserta didik terbina pengetahuan sejarah lokalnya (%)	0	0	0,56	79.338.000	1,12	150.000.000	1,68	200.000.000	2,24	200.000.000	2,8	250.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					444.576.500		488.883.590		562.771.949		589.049.144		667.954.058	
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persentase Objek diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya kabupaten yang terverifikasi, terlindungi dan dikembangkan (%)	7,52	10,75	11,82	444.576.500	13,97	488.883.590	16,12	562.771.949	18,27	589.049.144	20,43	667.954.058	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.538.861.925		4.827.000.000		4.827.000.000		4.828.000.000		4.828.000.000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.769.437.625		2.851.000.000		2.851.000.000		2.852.000.000		2.852.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	84,31	84,91	85,51	2.769.437.625	86,11	2.851.000.000	86,71	2.851.000.000	87,31	2.852.000.000	87,91	2.852.000.000	2.23.2.24.0.00.17.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.680.424.300		1.886.000.000		1.886.000.000		1.886.000.000		1.886.000.000	
Terwujudnya Peningkatan Pemustaka	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (%)	0,79	2,5	3	1.680.424.300	3	1.886.000.000	3	1.886.000.000	3	1.886.000.000	3	1.886.000.000	2.23.2.24.0.00.17.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					89.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Meningkatnya pekestarian koleksi dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang dapat diverifikasi setiap tahunnya (%)	0	0	20	89.000.000	20	90.000.000	20	90.000.000	20	90.000.000	20	90.000.000	2.23.2.24.0.00.17.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					179.908.500		446.000.000		446.000.000		446.000.000		446.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					129.878.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	
Meningkatnya Ketersediaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku (Berkas)	50	50	35	129.878.000	35	195.000.000	35	195.000.000	35	195.000.000	35	195.000.000	2.23.2.24.0.00.17.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					50.030.500		251.000.000		251.000.000		251.000.000		251.000.000	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Penyelamat Arsip	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelamat Arsip Daerah (Arsip)	5	5	5	50.030.500	5	251.000.000	5	251.000.000	5	251.000.000	5	251.000.000	2.23.2.24.0.00.17.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.950.765.505		5.184.973.872		5.365.917.242		5.539.567.724		5.724.296.671	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.836.531.205		3.834.416.527		3.949.449.023		4.067.932.494		4.189.970.469	
Meningkatnya Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,88	79,9	79,95	3.836.531.205	80	3.834.416.527	80,05	3.949.449.023	80,1	4.067.932.494	80,15	4.189.970.469	3.25.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					293.000.500		494.704.715		527.871.856		548.959.412		576.177.471	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	0	1,5	1,6	293.000.500	1,7	494.704.715	1,8	527.871.856	1,9	548.959.412	2	576.177.471	3.25.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					530.054.000		550.021.620		570.791.568		592.398.081		614.876.926	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	0	1,5	1,6	530.054.000	1,7	550.021.620	1,8	570.791.568	1,9	592.398.081	2	614.876.926	3.25.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					133.278.800		139.942.740		146.939.877		154.286.871		162.001.214	
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	0	0	83	133.278.800	84	139.942.740	85	146.939.877	86	154.286.871	87	162.001.214	3.25.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					157.901.000		165.888.270		170.864.918		175.990.866		181.270.591	
Meningkatnya Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	0	0	5	157.901.000	6	165.888.270	7	170.864.918	8	175.990.866	9	181.270.591	3.25.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.966.116.160		2.639.310.916		2.903.242.006		3.193.566.207		3.512.922.826	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.206.882.760		1.535.991.336		1.689.590.468		1.858.549.516		2.044.404.466	
Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang memadai	Persentase Destinasi wisata yang memadai (%)	2	2	4	1.206.882.760	4	1.535.991.336	4	1.689.590.468	4	1.858.549.516	4	2.044.404.466	2.19.3.26.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					683.373.400		828.033.580		910.836.938		1.001.920.631		1.102.112.694	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	58	58	67	683.373.400	75	828.033.580	83	910.836.938	92	1.001.920.631	100	1.102.112.694	2.19.3.26.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					75.860.000		275.286.000		302.814.600		333.096.060		366.405.666	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	2	2	75.860.000	3	275.286.000	5	302.814.600	6	333.096.060	8	366.405.666	2.19.3.26.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					19.441.135.925		21.754.469.358		22.413.055.705		23.004.166.071		23.602.504.560	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.958.253.770		15.594.349.858		15.922.846.205		16.290.997.071		16.657.711.335	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	78,85	78,9	78,95	5.831.664.870	79	6.467.696.958	79,05	6.794.557.305	79,1	7.134.285.171	79,15	7.490.999.435	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura))	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	72,41	74,16	74,9	9.126.588.900	75,28	9.126.652.900	75,65	9.128.288.900	76,03	9.156.711.900	76,41	9.166.711.900	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.158.148.655		1.683.695.000		1.745.035.000		1.811.807.000		1.879.434.350	
Meningkatnya penyediaan sarana pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	2	2,01	2,05	652.461.400	2,16	1.226.800.000	2,21	1.288.140.000	2,28	1.352.547.000	2,31	1.420.174.350	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	18,64	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyediaan sarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian (%)	5,99	1,33	1,3	505.687.255	1,3	456.895.000	1,33	456.895.000	1,35	459.260.000	1,4	459.260.000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					937.900.700		1.880.493.000		2.075.493.000		2.154.243.000		2.236.930.500	
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)	50	25	25	557.407.700	25	1.500.000.000	25	1.575.000.000	25	1.653.750.000	25	1.736.437.500	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase peningkatan prasarana pertanian (%)	0,79	1,3	1,3	380.493.000	1,3	380.493.000	1,4	500.493.000	1,4	500.493.000	1,4	500.493.000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					375.000.000		405.000.000		425.250.000		446.512.500		468.838.125	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Dinas Pekerbunan dan Peternakan)	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	7,14	14,29	14,29	375.000.000	14,29	405.000.000	14,29	425.250.000	14,29	446.512.500	14,29	468.838.125	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					154.519.500		180.000.000		184.750.000		189.737.500		194.974.375	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas Pekerbunan dan Peternakan)	Persentase Penanganan bencana pertanian (%)	25	25	25	84.436.500	25	95.000.000	25	99.750.000	25	104.737.500	25	109.974.375	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	0	0	0,37		0,37		0,37		0,37		0,37		3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Penanganan bencana pertanian (%)	100	100	100	70.083.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.857.313.300		2.010.931.500		2.059.681.500		2.110.869.000		2.164.615.875	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi (%)	0	10	20	852.547.300	20	975.000.000	20	1.023.750.000	20	1.074.937.500	20	1.128.684.375	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase kelembagaan Tani yang meningkat kapasitasnya (%)	13,31	11,14	11,14	1.004.766.000	11,14	1.035.931.500	11,14	1.035.931.500	11,14	1.035.931.500	11,14	1.035.931.500	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					947.347.365		1.535.240.300		1.669.364.330		1.815.800.763		1.954.854.406	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					709.999.765		781.000.000		859.100.000		945.010.000		1.039.511.000	
Terlaksananya pembangunan dan revitalisasi pasar pemda	Persentase pasar rakyat yang terbangun atau direvitalisasi (%)	2	2	2	709.999.765	2	781.000.000	2	859.100.000	2	945.010.000	2	1.039.511.000	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					99.624.800		440.000.000		470.000.000		500.000.000		530.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya perubahan harga bahan kebutuhan pokok	Persentase rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting (%)	3	3	3	99.624.800	3	440.000.000	3	470.000.000	3	500.000.000	3	530.000.000	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0		165.000.000		180.000.000		200.000.000		210.000.000	
Terwujudnya pelaku usaha perdagangan yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas (%)	0	0	0	0	10	165.000.000	10	180.000.000	10	200.000.000	10	210.000.000	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					92.049.800		99.000.000		105.000.000		110.000.000		114.000.000	
Meningkatnya Alat UTTP tertera sah	Persentase Alat UTTP tertera sah (%)	8,3	8,3	8,5	92.049.800	8,7	99.000.000	8,9	105.000.000	9,1	110.000.000	9,4	114.000.000	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					45.673.000		50.240.300		55.264.330		60.790.763		61.343.406	
Terfasilitasinya penjualan Produk Koperasi dan UMKM	Persentase Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya (%)	18	18	18	45.673.000	18	50.240.300	18	55.264.330	18	60.790.763	18	61.343.406	2.17.3.30.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					718.976.000		875.000.000		875.000.000		875.000.000		875.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					653.976.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Omset IKM	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 5% pertahun (%)	5	5	5	653.976.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat (%)	1	1	1		1		1		1		1		2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Meningkatnya pertumbuhan IKM Formal	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	10	20	20	0	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
Meningkatnya pertumbuhan Ikm Formal	Persentase Izin Usaha Industri yang yang terdata di sistem Informasi Industri Nasional (%)	0	0	8	65.000.000	12	65.000.000	15	65.000.000	18	65.000.000	21	65.000.000	2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					128.156.809.129		145.394.748.702		159.934.121.762		176.003.296.061		193.819.067.898	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					109.102.409.929		124.444.414.782		136.888.863.850		150.568.330.460		165.633.040.655	
Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan, penataan organisasi, tugas protokol dan komunikasi pimpinan dan kinerja perangkat daerah yang akuntabel	Indeks Kematangan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	0	0	29	109.102.409.929	30	124.444.414.782	31	136.888.863.850	32	150.568.330.460	33	165.633.040.655	4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	84,6		84,7		84,8		84,9		85		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan sekretariat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					16.952.146.000		18.647.460.600		20.512.096.660		22.660.488.884		25.120.902.854	
Meningkatnya pelaksanaan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerja sama daerah, kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan (%)	100	100	100	16.952.146.000	100	18.647.460.600	100	20.512.096.660	100	22.660.488.884	100	25.120.902.854	4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah		
	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	0	0	65		65		65		65		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.102.253.200		2.302.873.320		2.533.161.252		2.774.476.717		3.065.124.389	
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan kebijakan sumber daya alam	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Lampung Barat (Poin)	0	0	74	2.102.253.200	74,5	2.302.873.320	75	2.533.161.252	75,5	2.774.476.717	76	3.065.124.389	4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase BUMD dan BLUD yang sehat (%)	0	0	60		70		80		90		100		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase penyampaian laporan pelaksanaan administrasi pembangunan perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.28.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					46.142.298.338		46.508.088.172		47.793.134.436		53.598.247.989		51.201.268.283	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.113.810.928		25.682.325.587		26.173.642.109		30.357.162.086		27.387.881.255	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80,5	80,75	77,5	20.076.454.330	78	20.195.007.783	78,5	20.325.098.007	79	22.739.019.500	79,5	20.963.531.792	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD
Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	0	0	100	4.714.243.798	100	5.138.847.098	100	5.488.781.429	100	6.902.402.586	100	6.035.785.463	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya dukungan fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Dukungan Fraksi (%)	0	0	80	323.112.800	82,5	348.470.706	85	359.762.673	87,5	715.740.000	90	388.564.000	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					21.028.487.410		20.825.762.585		21.619.492.327		23.241.085.903		23.813.387.028	
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah (%)	70	70	75	8.650.965.800	77,5	10.367.971.995	80	10.713.642.305	82,5	12.677.750.939	85	11.813.503.479	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD (%)	0	0	80	258.082.000	82,5	264.534.050	85	271.147.401	87,5	285.016.418	90	299.941.194	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD (%)	0	0	90	347.352.800	92,5	373.989.900	95	402.885.801	97,5	385.566.249	100	417.762.874	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir (%)	0	0	70	2.326.576.400	72,5	2.443.415.990	75	2.566.148.637	77,5	1.813.596.697	80	2.764.956.367	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Publikasi Kinerja DPRD kepada Masyarakat	Persentase Publikasi Kinerja DPRD kepada Masyarakat (%)	100	100	95	5.761.449.610	97,5	3.607.850.650	100	3.788.243.183	100	3.997.525.600	100	4.219.230.114	4.02.0.00.0.00.27.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD (%)	100	100	95	3.684.060.800	97,5	3.768.000.000	100	3.877.425.000	100	4.081.630.000	100	4.297.993.000	4.02.0.00.0.00.27.0000 Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.553.995.761		8.113.093.215		8.924.402.536		9.816.842.790		10.798.527.068	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.849.676.661		4.038.342.205		4.442.176.425		4.886.394.067		5.375.033.474	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83,04	83,29	83,54	3.849.676.661	83,79	4.038.342.205	84,04	4.442.176.425	84,29	4.886.394.067	84,54	5.375.033.474	5.01.0.00.0.00.21.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.669.815.100		1.836.796.610		2.020.476.271		2.222.523.899		2.444.776.288	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan Rentra PD (%)	80	90	100	1.669.815.100	100	1.836.796.610	100	2.020.476.271	100	2.222.523.899	100	2.444.776.288	5.01.0.00.0.00.21.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	80	90	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.21.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.034.504.000		2.237.954.400		2.461.749.840		2.707.924.824		2.978.717.306	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	85	90	95	2.034.504.000	100	2.237.954.400	100	2.461.749.840	100	2.707.924.824	100	2.978.717.306	5.01.0.00.0.00.21.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	85	90	95		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.21.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan bidang perkenomian dan SDA (%)	85	90	95		100		100		100		100		100
5.02 - KEUANGAN					218.868.697.866		240.486.194.933		264.045.789.396		289.835.442.492		318.107.320.898	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.318.024.839		29.708.694.843		32.558.779.537		35.706.571.888		38.919.943.473	
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah BAPENDA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	70,68	70,69	70,69	3.851.599.704	70,69	3.970.235.294	70,69	4.322.236.034	70,69	4.723.236.034	70,7	4.927.236.034	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah BKAD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	84,6	85	85	23.466.425.135	85,25	25.738.459.549	85,5	28.236.543.503	85,75	30.983.335.854	86	33.992.707.439	5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					185.661.301.527		204.210.991.380		224.615.650.218		247.060.774.939		271.750.412.133	
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (BAPENDA)	Persentase Penganggaran pendapatan daerah yang tepat waktu (%)	100	100	100	164.403.000	100	164.403.000	100	164.403.000	100	164.403.000	100	164.403.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (BKAD)	Persentase Penetapan APBD tepat waktu (%)	100	100	100	185.496.898.527	100	204.046.588.380	100	224.451.247.218	100	246.896.371.939	100	271.586.009.133	5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penganggaran pendapatan daerah yang tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penyampaian Penatausahaan Keuangan tepat waktu oleh Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95,44	95	95		95		95		95		5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.171.372.100		2.388.509.310		2.693.360.241		2.890.096.265		3.258.965.892	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah (BKAD)	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu (%)	100	100	100	2.171.372.100	100	2.388.509.310	100	2.693.360.241	100	2.890.096.265	100	3.258.965.892	5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.717.999.400		4.177.999.400		4.177.999.400		4.177.999.400		4.177.999.400	
Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Cakupan pengawasan pengelolaan pendapatan (Angka)	0	200	200	3.717.999.400	200	4.177.999.400	200	4.177.999.400	200	4.177.999.400	200	4.177.999.400	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Penetapan Objek Pajak (%)	0	10	10		10		10		10		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah		
	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak (%)	0	20	20		20		20		20		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah		
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.726.970.046		7.447.074.798		7.822.540.073		8.317.067.280		8.847.740.108	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.151.905.346		3.509.800.298		3.850.693.073		4.072.512.280		4.467.538.108	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,85	78,78	78,78	3.151.905.346	78,79	3.509.800.298	78,8	3.850.693.073	78,81	4.072.512.280	78,82	4.467.538.108	5.03.5.04.0.00.23.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.575.064.700		3.937.274.500		3.971.847.000		4.244.555.000		4.380.202.000	
Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	0	0	4	2.575.064.700	8	3.937.274.500	12	3.971.847.000	16	4.244.555.000	20	4.380.202.000	5.03.5.04.0.00.23.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	0	0	70		72,5		75		77,5		80		5.03.5.04.0.00.23.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	0	0	4		8		12		16		20		5.03.5.04.0.00.23.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					5.882.739.955		6.280.547.275		6.144.872.275		6.274.072.275		6.396.272.275	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.841.496.275		2.857.857.275		2.867.182.275		2.871.382.275		2.868.582.275	
Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83,11	79,75	80	2.841.496.275	80,5	2.857.857.275	81	2.867.182.275	81,5	2.871.382.275	82	2.868.582.275	5.05.0.00.0.00.24.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					3.041.243.680		3.422.690.000		3.277.690.000		3.402.690.000		3.527.690.000	
Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Penelitian dan Pengkajian	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan Inovasi yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	814.251.200	100	880.000.000	100	800.000.000	100	820.000.000	100	840.000.000	5.05.0.00.0.00.24.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Inovasi)	132	135	140	2.226.992.480	152	2.542.690.000	164	2.477.690.000	176	2.582.690.000	188	2.687.690.000	5.05.0.00.0.00.24.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					17.271.826.095		17.009.783.863		18.711.185.749		20.582.304.324		22.640.534.758	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.611.928.295		11.246.440.453		12.371.507.998		13.608.658.798		14.969.524.679	
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83	83,5	83,5	10.611.928.295	84	11.246.440.453	84,5	12.371.507.998	85	13.608.658.798	85,5	14.969.524.679	6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.377.591.600		4.597.318.110		5.057.049.921		5.562.754.913		6.119.030.405	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	324	324	324	5.377.591.600	324	4.597.318.110	324	5.057.049.921	324	5.562.754.913	324	6.119.030.405	6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.282.306.200		1.166.025.300		1.282.627.830		1.410.890.613		1.551.979.674	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan (%)	83	83	83	1.282.306.200	83	1.166.025.300	83	1.282.627.830	83	1.410.890.613	83	1.551.979.674	6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					14.778.832.175		15.077.940.584		15.726.982.367		16.377.916.410		17.049.718.543	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.616.768.391		10.813.231.665		11.256.795.685		11.686.528.289		12.155.475.422	
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sumber Jaya)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	633.810.875	70	665.501.419	70	698.776.493	70	733.715.314	70	770.401.080	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sumber Jaya
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kelurahan Tugu Sari)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	197.984.250	70	207.883.463	70	218.277.886	70	229.191.231	70	240.651.442	7.01.0.00.0.00.30.0001 - Kelurahan Tugu Sari
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Way Tenong)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	761.026.500	70	792.406.650	70	832.026.984	70	873.628.335	70	917.309.749	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Way Tenong
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kelurahan Fajar Bulan)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	271.760.000	70	277.828.000	70	291.549.400	70	306.956.870	70	323.084.714	7.01.0.00.0.00.31.0001 - Kelurahan Fajar Bulan
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sekincau)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	661.515.725	70	668.595.611	70	702.025.395	70	737.126.662	70	773.982.995	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Sekincau
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kelurahan Sekincau)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	214.246.700	70	224.959.035	70	236.206.987	70	248.017.337	70	260.418.203	7.01.0.00.0.00.32.0001 - Kelurahan Sekincau
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Belalau)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	714.313.800	70	882.064.370	70	915.115.746	70	904.901.891	70	958.661.178	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Belalau
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Batu Brak)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	601.264.750	70	661.371.135	70	727.508.248	70	800.259.152	70	880.603.146	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Batu Brak
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Balik Bukit)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	1.036.799.760	70	892.656.293	70	937.289.111	70	984.153.564	70	1.023.361.242	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Balik Bukit
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kelurahan Pasar Liwa)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	207.896.200	70	217.136.010	70	227.992.811	70	239.392.452	70	251.362.053	7.01.0.00.0.00.35.0001 - Kelurahan Pasar Liwa
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kelurahan Way Mengaku)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	276.199.600	70	285.599.500	70	293.089.000	70	301.820.750	70	314.743.000	7.01.0.00.0.00.35.0002 - Kelurahan Way Mengaku

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukau)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	626.475.790	70	655.699.580	70	688.484.558	70	722.908.786	70	759.054.226	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Sukau
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Suoh)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	536.764.133	70	541.674.770	70	568.758.510	70	597.196.436	70	627.056.256	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Suoh
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Gedung Surian)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	515.647.250	70	536.389.613	70	563.209.097	70	613.550.849	70	620.938.117	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Gedung Surian
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebun Tebu)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	515.436.756	70	515.436.756	70	515.436.756	70	515.436.756	70	515.436.756	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Kebun Tebu
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Air Hitam)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	507.570.811	70	507.570.811	70	507.570.811	70	507.570.811	70	507.570.811	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Air Hitam
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Pagar dewa)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	613.646.070	70	584.104.249	70	610.416.710	70	637.759.798	70	667.390.037	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Pagar dewa
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Batu Ketulis)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	596.461.006	70	549.175.425	70	549.175.425	70	549.175.425	70	549.175.425	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Batu Ketulis
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Bandar Negeri Suoh)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	556.983.415	70	556.983.415	70	556.983.415	70	556.983.415	70	556.983.415	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Bandar Negeri Suoh
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Lumbok Seminung)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	0	0	70	570.965.000	70	590.195.560	70	616.902.342	70	626.782.455	70	637.291.577	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Lumbok Seminung
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					305.815.500		313.849.985		324.441.596		334.975.285		347.586.408	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Sumber Jaya)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	11.042.500	100	11.594.625	100	12.174.356	100	12.783.074	100	13.422.228	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sumber Jaya
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Way Tenong)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	14.500.000	100	15.225.000	100	15.986.250	100	16.785.563	100	17.624.840	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Way Tenong
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Sekincau)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	20.835.000	100	21.876.750	100	22.970.588	100	24.119.117	100	25.325.073	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Sekincau
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Belalau)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	17.600.000	100	18.480.000	100	19.404.000	100	20.374.200	100	21.392.910	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Belalau
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Batu Brak)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000	100	21.961.500	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Batu Brak
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Sukau)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	17.364.375	100	18.232.593	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Sukau
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Suoh)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	32.681.000	100	34.315.050	100	36.030.803	100	37.832.343	100	39.723.960	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Suoh
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Gedung Surian)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	31.991.200	100	33.590.760	100	35.270.299	100	37.033.813	100	38.885.504	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Gedung Surian
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Kebun Tebu)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	12.965.000	100	12.965.000	100	12.965.000	100	12.965.000	100	12.965.000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Kebun Tebu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Air Hitam)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	48.372.000	100	48.372.000	100	48.372.000	100	48.372.000	100	48.372.000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Air Hitam
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Batu Ketulis)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	20.000.000	100	18.148.000	100	18.148.000	100	18.148.000	100	18.148.000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Batu Ketulis
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Bandar Negeri Suoh)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	22.116.800	100	22.116.800	100	22.116.800	100	22.116.800	100	22.116.800	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Bandar Negeri Suoh
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Lumbok Seminung)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	28.196.000	100	29.400.000	100	30.800.000	100	31.600.000	100	33.900.000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Lumbok Seminung
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (Kecamatan Balik Bukit)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	0	0	100	15.516.000	100	15.516.000	100	15.516.000	100	15.516.000	100	15.516.000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Balik Bukit
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.400.011.884		2.489.444.061		2.607.173.416		2.730.534.491		2.862.395.189	
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Sumber Jaya)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	12.876.000	100	13.519.800	100	14.195.790	100	14.905.579	100	15.650.859	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sumber Jaya
Terwujudnya pekon mandiri (Kelurahan Tugu Sari)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	402.923.818	100	423.070.009	100	444.223.510	100	466.434.686	100	489.756.419	7.01.0.00.0.00.30.0001 - Kelurahan Tugu Sari
Terwujudnya pekon mandiri (Kelurahan Fajar Bulan)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	409.038.000	100	431.059.000	100	451.581.050	100	472.629.203	100	494.229.763	7.01.0.00.0.00.31.0001 - Kelurahan Fajar Bulan
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Sekincau)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	3.990.000	100	4.189.500	100	4.398.975	100	4.618.924	100	4.849.870	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Sekincau
Terwujudnya pekon mandiri (Kelurahan Sekincau)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	431.799.580	100	453.389.559	100	476.059.037	100	499.861.989	100	524.855.088	7.01.0.00.0.00.32.0001 - Kelurahan Sekincau
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Belalau)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	17.500.000	100	18.375.000	100	19.293.750	100	20.258.438	100	21.271.359	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Belalau
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Batu Brak)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	41.138.000	100	45.251.800	100	49.776.980	100	54.754.678	100	60.230.146	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Batu Brak
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Balik Bukit)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	20.762.500	100	16.986.375	100	17.835.694	100	18.727.478	100	19.663.853	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Balik Bukit
Terwujudnya pekon mandiri (Kelurahan Pasar Liwa)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	405.163.691	100	419.999.791	100	440.999.780	100	463.049.768	100	486.202.257	7.01.0.00.0.00.35.0001 - Kelurahan Pasar Liwa
Terwujudnya pekon mandiri (Kelurahan Way Mengaku)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	400.001.795	100	419.958.052	100	440.980.955	100	463.009.000	100	486.161.128	7.01.0.00.0.00.35.0002 - Kelurahan Way Mengaku
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Sukau)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	18.000.000	100	18.900.000	100	19.845.000	100	20.837.250	100	21.879.113	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Sukau
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Suoh)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	17.941.000	100	18.838.050	100	19.779.953	100	20.768.950	100	21.807.398	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Suoh
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Gedung Surian)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	39.661.500	100	31.916.325	100	33.512.142	100	35.187.748	100	36.947.136	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Gedung Surian
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Kebun Tebu)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	44.424.000	100	44.424.000	100	44.424.000	100	44.424.000	100	44.424.000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Kebun Tebu
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Air Hitam)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	43.287.000	100	43.287.000	100	43.287.000	100	43.287.000	100	43.287.000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Air Hitam
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Pagar dewa)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	12.150.000	100	12.150.000	100	12.150.000	100	12.150.000	100	12.150.000	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Pagar dewa
Terwujudnya pekon mandiri (Kecamatan Batu Ketulis)	Jumlah pekon mandiri (%)	0	0	100	29.490.000	100	22.999.800	100	22.999.800	100	22.999.800	100	22.999.800	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Batu Ketulis

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya pekan mandiri (Kecamatan Bandar Negeri Suoh)	Jumlah pekan mandiri (%)	0	0	100	21.130.000	100	21.130.000	100	21.130.000	100	21.130.000	100	21.130.000	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Bandar Negeri Suoh
Terwujudnya pekan mandiri (Kecamatan Lumbok Seminung)	Jumlah pekan mandiri (%)	0	0	100	28.735.000	100	30.000.000	100	30.700.000	100	31.500.000	100	34.900.000	7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Lumbok Seminung
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					549.790.500		563.210.530		581.568.529		600.926.597		621.190.209	
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Sumber Jaya)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	49.948.000	100	52.445.400	100	55.067.671	100	57.821.054	100	60.712.106	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sumber Jaya
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Way Tenong)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	48.250.000	100	51.075.000	100	53.361.250	100	55.711.813	100	58.129.903	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Way Tenong
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Sekincau)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	40.678.000	100	42.711.900	100	44.847.496	100	47.089.870	100	49.444.363	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Sekincau
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Belalau)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	22.890.000	100	24.034.500	100	25.236.225	100	26.498.036	100	27.822.938	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Belalau
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Batu Brak)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	23.577.000	100	25.934.700	100	28.528.170	100	31.380.987	100	34.519.085	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Batu Brak
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Balik Bukit)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	24.144.500	100	24.144.500	100	24.144.500	100	24.144.500	100	24.144.500	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Balik Bukit
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Sukau)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	30.000.000	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.728.750	100	36.465.188	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Sukau
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Suoh)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	27.974.600	100	29.373.330	100	30.841.997	100	32.384.096	100	34.003.301	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Suoh
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Gedung Surian)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	29.048.000	100	30.500.400	100	32.025.420	100	33.626.691	100	35.308.025	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Gedung Surian
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Kebun Tebu)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	69.539.000	100	69.539.000	100	69.539.000	100	69.539.000	100	69.539.000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Kebun Tebu
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Air Hitam)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	43.236.000	100	43.236.000	100	43.236.000	100	43.236.000	100	43.236.000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Air Hitam
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Pagar dewa)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	51.300.000	100	53.300.000	100	55.300.000	100	57.300.000	100	59.300.000	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Pagar dewa
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Batu Ketulis)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	29.950.000	100	25.150.400	100	25.150.400	100	25.150.400	100	25.150.400	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Batu Ketulis
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Bandar Negeri Suoh)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	37.715.400	100	37.715.400	100	37.715.400	100	37.715.400	100	37.715.400	7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Bandar Negeri Suoh
Menurunnya kasus gangguan keamanan (Kecamatan Lumbok Seminung)	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan (%)	0	0	100	21.540.000	100	22.550.000	100	23.500.000	100	24.600.000	100	25.700.000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Lumbok Seminung
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					227.047.900		225.705.065		234.964.725		244.659.848		254.748.112	
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Sumber Jaya)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	4.294.800	100	4.509.540	100	4.735.017	100	4.971.768	100	5.220.356	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sumber Jaya
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Way Tenong)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	20.250.000	100	21.262.500	100	22.325.625	100	23.441.906	100	24.614.002	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Way Tenong
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Sekincau)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	21.187.000	100	22.246.350	100	23.358.668	100	24.526.601	100	25.752.931	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Sekincau
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Belalau)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	13.400.000	100	14.070.000	100	14.773.500	100	15.512.175	100	16.287.784	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Belalau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Batu Brak)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	7.997.000	100	8.796.700	100	9.676.370	100	10.644.007	100	11.708.408	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Batu Brak
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Balik Bukit)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	11.125.000	100	11.681.250	100	12.265.313	100	12.878.578	100	13.522.507	7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Balik Bukit
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Sukau)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	13.000.000	100	13.650.000	100	14.332.500	100	15.049.125	100	15.801.581	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Sukau
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Suoh)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	20.009.000	100	21.009.450	100	22.059.923	100	23.162.919	100	24.321.065	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Suoh
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Gedung Surian)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	20.293.500	100	21.308.175	100	22.373.584	100	23.492.263	100	24.666.876	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Gedung Surian
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Kebun Tebu)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	10.464.000	100	10.464.000	100	10.464.000	100	10.464.000	100	10.464.000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Kebun Tebu
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Air Hitam)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	7.475.000	100	7.475.000	100	7.475.000	100	7.475.000	100	7.475.000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Air Hitam
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Pagar Dewa)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	20.250.000	100	21.262.500	100	22.325.625	100	23.441.906	100	24.614.002	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Pagar dewa
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Batu Ketulis)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	29.943.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Batu Ketulis
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Bandar Negeri Suoh)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	12.099.600	100	12.099.600	100	12.099.600	100	12.099.600	100	12.099.600	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Bandar Negeri Suoh
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (Kecamatan Lumbok Seminung)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)	0	0	100	15.260.000	100	15.870.000	100	16.700.000	100	17.500.000	100	18.200.000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Lumbok Seminung
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					679.398.000		672.499.278		722.038.416		780.291.900		808.323.203	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Sumber Jaya)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	46.720.000	100	49.056.000	100	51.508.801	100	54.084.240	100	56.788.452	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sumber Jaya
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Way Tenong)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	52.400.000	100	45.718.750	100	48.654.688	100	51.687.422	100	54.821.793	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Way Tenong
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Sekincau)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	80.309.900	100	63.550.095	100	66.727.600	100	70.063.980	100	73.567.178	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Sekincau
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Batu Brak)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	49.960.000	100	54.956.000	100	60.451.600	100	66.496.760	100	73.146.436	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Batu Brak
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Belalau)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	55.401.600	100	128.267.998	100	128.826.010	100	162.720.035	100	165.000.649	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Belalau
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Balik Bukit)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	57.305.800	100	57.305.800	100	57.305.800	100	57.305.800	100	57.305.800	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Balik Bukit

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Sukau)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.100.000	100	46.305.000	100	48.620.250	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Sukau
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Suoh)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	42.102.500	100	44.207.625	100	46.418.006	100	48.738.907	100	51.175.852	7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Suoh
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Gedung Surian)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	61.696.200	100	22.968.010	100	51.416.411	100	53.987.231	100	56.686.592	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Gedung Surian
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Kebun Tebu)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	32.320.000	100	32.320.000	100	32.320.000	100	32.320.000	100	32.320.000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Kebun Tebu
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Air Hitam)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	24.980.000	100	24.980.000	100	24.980.000	100	24.980.000	100	24.980.000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Air Hitam
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Pagar dewa)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	46.950.000	100	17.010.000	100	17.860.500	100	18.753.525	100	19.691.201	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Pagar dewa
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Batu Ketulis)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	30.000.000	100	29.652.000	100	29.652.000	100	29.652.000	100	29.652.000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Batu Ketulis
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Bandar Negeri Suoh)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	34.067.000	100	34.067.000	100	34.067.000	100	34.067.000	100	34.067.000	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Bandar Negeri Suoh
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Lumbok Seminung)	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	0	0	100	25.185.000	100	26.440.000	100	27.750.000	100	29.130.000	100	30.500.000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Lumbok Seminung
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.101.841.857		7.649.244.748		8.617.880.639		10.170.569.624		11.039.605.133	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.619.451.686		2.892.161.855		3.404.321.962		4.012.586.852		4.735.544.797	
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	78,2	78,3	78,4	2.619.451.686	78,6	2.892.161.855	79,8	3.404.321.962	79	4.012.586.852	79,2	4.735.544.797	8.01.0.00.0.00.26.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.138.553.018		1.244.254.620		1.377.649.152		1.515.414.067		1.666.955.474	
Meningkatnya kesadaran masyarakat generasi muda akan idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Cakupan penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada sekolah Tingkat SLTA (%)	33	44	52	1.138.553.018	70	1.244.254.620	80	1.377.649.152	90	1.515.414.067	100	1.666.955.474	8.01.0.00.0.00.26.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					927.688.253		993.292.578		1.092.621.836		1.651.884.020		1.322.072.422	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	25,97	26,6	38,12	927.688.253	51,91	993.292.578	65,7	1.092.621.836	79,51	1.651.884.020	93,31	1.322.072.422	8.01.0.00.0.00.26.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					603.655.000		564.857.650		625.408.278		692.623.372		767.261.431	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	17,02	17,2	17,48	603.655.000	17,95	564.857.650	18,41	625.408.278	18,88	692.623.372	19,35	767.261.431	8.01.0.00.0.00.26.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					408.276.200		469.517.490		539.944.773		620.936.479		714.077.450	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah yang dilaksanakan (%)	100	100	100	408.276.200	100	469.517.490	100	539.944.773	100	620.936.479	100	714.077.450	8.01.0.00.0.00.26.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.404.217.700		1.485.160.555		1.577.934.638		1.677.124.834		1.833.693.559	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.404.217.700	100	1.485.160.555	100	1.577.934.638	100	1.677.124.834	100	1.833.693.559	8.01.0.00.0.00.26.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.273.348.540.404,26		1.473.265.866.780		1.576.815.620.592,5		1.690.963.972.006,4		1.808.657.113.172,4	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan guna memastikan pelayanan publik yang berkualitas serta pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran.

Bab ini menguraikan berbagai aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fokus utama adalah bagaimana pemerintahan daerah dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, serta merancang kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Dengan perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan yang terarah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu menciptakan sistem yang lebih responsif, akuntabel, dan inovatif. Hal ini menjadi landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 secara efektif dan berdaya guna.

Tabel 4.2 Indikator Makro

No	Indikator Makro	Satuan %	Baseline Kab/Kota (Capaian 2023 dan 2024)		Target Indikator Makro Kabupaten/Kota (Setelah Penyelesaian)					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68%	4.36%	4,59%	4,83%	5,09%	5,36%	5,64%	5,94%
2	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	28.86	31.35	33,68	37,35	40,35	43,35	46,35	49,35
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	2.01%	2.05%	1,98%	1,97%	1,96%	1,95%	1,94%	1,93%
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,17	10,68	9,86 - 10,11	9.00-9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25
5	Rasio Gini	Poin	0,274	0,290	0,263	0.260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272
6	Indeks Modal Manusia	Poin	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,72	72,41	72,75	73,43	74,02	74,55	75,10	75,71
8	Pengurangan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Ekuivalen	n.a	n.a	106461.11	113035.59	120103.98	127621.67	134693.87	142073.38
9	IKLH Daerah	Poin	70,55	73,09	74,64	74.89	75.14	75.39	75.65	75,90
10	TPT	%	2.25	2.09	1,90 - 2,08	1,75 - 2,05	1,70 - 2,02	1,60 - 1,99	1,50 - 1,98	1,40 - 1,95

Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	PD penanggung-jawab
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,41	72,75	73,43	74,02	74,55	75,10	75,71	Bappeda
2	Prevalensi Stunting	20.50%	17.80	17.22	16.37	15.90	15.43	14.96	Dinas Kesehatan
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.407	0.405	0.403	0.401	0.399	0.397	0.395	Dinas PPKBPPPA
4	Indeks Perlindungan Anak	60.18 (tahun 2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92	Dinas PPKBPPPA
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.12%	1.11%	1.10%	1.09%	1.08%	1.07%	1.06%	Dinas PPKBPPPA
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	61.52	61.83	62.14	62.45	62.76	63.07	63.39	Dinas PPKBPPPA
7	Angka Kemiskinan	10,68	9,86 - 10,11	9.00-9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25	Bappeda
8	Gini Rasio	0,290	0,263	0.260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272	Bappeda
9	Indeks Ketahanan Pangan	76.18	76.56	76.94	77.33	77.72	78.10	78.49	Dinas Ketahanan Pangan
10	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	12,25%	13.48%	14.60%	15.73%	16.85%	17.97%	19.10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	PD penanggung-jawab
11	Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	5,32%	7.57%	9.67%	11.82%	13.97%	16.12%	18.27%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	PDRB per kapita (Rp Juta)	31.35	33,68	37,35	40.35	43.35	46.35	49.35	Bappeda
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35.66%	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	37.99%	Bappeda
14	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	2.05%	1,98%	1,97%	1,96%	1,95%	1,94%	1,93%	Bappeda
15	Tingkat Inflasi (%)	1,57% (angka Prov)	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	Setda
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.09	1.90 - 2.08	1.75 - 2.05	1.70 - 2.02	1.60 - 1.99	1.50 - 1.98	1.40 - 1.95	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
17	Nilai investasi (Rupiah)	187.253.670.764	104.640.000.000	25,000,000,000	26,250,000,000	27,693,750,000	29,355,375,000	31,410,251,250	Dinas PM PTSP
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (poin)	3.50	3.56	3.59	3.63	3.66	3.69	3.70	BKAD
19	Rasio Kewirausahaan	1.88	2.00	2.40	2.60	2.80	2.80	3.00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
20	Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52	Brida
21	Indeks reformasi birokrasi	70.74	72.00	72.50	73.00	73.50	74.00	75.00	Setda

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	PD penanggung-jawab
22	Indeks Pelayanan Publik	3.9	3.94	3.98	4.02	4.06	4.10	4.14	Setda
23	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	73,09	74,64	74.89	75.14	75.39	75.65	75,90	Dinas LH
24	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38	Dinas LH
25	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol
26	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	72 poin	74.15 poin	75 poin	75,15 poin	75,30 poin	75,45 poin	75,60 poin	Satpol PP
27	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.5	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25	Badan Kesbangpol
28	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46	Brida
29	Indeks Resiko Bencana	176,28	118.93	117.99-117.09	117.06-115.24	116.12-113.40	115.19-111.55	114.25-109.71	BPBD

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	76.18	76.56	76.94	77.33	77.72	78.10	78.49	Dinas Ketahanan Pangan
2	Konsumsi Listrik Perkapita (56)*	kWh/kapita	21.68	22.25	22.52	22.79	23.06	23.32	23.51	Setda
3	Prefalensi Ketidak Cukupan konsumsi Pangan (57)*	%	11,17	11.11	11.06	11.00	10.95	10.89	10.84	Dinas Ketahanan Pangan
4	Kapasitas Air Baku (58)*	%	0.225	2.45	2.45	2.85	2.85	2.85	2.85	Dinas PU PR
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (59)*	%	17.85	18.57	18.75	18.94	19.12	19.31	19.50	Dinas PU PR
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (61)*	ton CO2e	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38	Dinas LH
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (62)*	Angka	73,09	74,64	74.89	75.14	75.39	75.65	75,90	Dinas LH
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (63)*	%	0,35%	1.39%	1.91%	2.43%	2.95%	3.47%	3.99%	Dinas LH
9	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah (64)*	Kg/Orang	32.98	34.49	34.83	35.18	35.53	35.89	36.25	Dinas LH

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan sampah (65)*	%	6.26	14,46	27.2	27.2	27.2	31.568	43.70	Dinas LH
11	Indeks Resiko Bencana (60)*	Angka	176,28	118.93	117.99-117.09	117.06-115.24	116.12-113.40	115.19-111.55	114.25-109.71	BPBD
12	Laju pertumbuhan Penduduk	%	1.12%	1.11%	1.10%	1.09%	1.08%	1.07%	1.06%	Dinas PPKBPPPA
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Usia Harapan Hidup (1)*	Tahun	73,96	73,99 - 75,09	73,25 - 75,25	73,4 - 75,4	73,56 - 75,56	75,72 - 77,72	75,87 - 77,87	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (2)*	poin	6	5	5	5	5	4	4	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Stunting (3)*	%	20.5	17.80	17.22	16.37	15.90	15.43	14.96	Dinas Kesehatan
4	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (4)*	%	53.31%	55.00%	60.00%	60.00%	70.00%	60-80%	70.00%	Dinas Kesehatan
5	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (5)*	%	92,59%	93.05%	93.52%	93.99%	94.46%	94.93%	95.40%	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (6)*	%	99.45	99.50	99.55	99.60	99.65	99.70	99.75	Dinas Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk									
7	i) Literasi Membaca (7)*	%		6,67 - 13,33	8,50-15,50	10,00-20,00	20,00-30,00	30,00-40,00	31,00-41,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	ii) Numerasi (8)*	%		0,00 - 6,67	05,00-8,30	10,00-15,00	15,00-20,00	20,00-30,00	22,00-32,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk									
9	i) Literasi Membaca (9)*	%		76.96	84.85	86.37	87.88	89.40	90.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	ii) Numerasi (10)*	%		72.73	73.64	75.16	76.67	78.19	79.70	Dinas

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Pendidikan dan Kebudayaan
11	Rata - Rata Lama Sekolah (11)*	Tahun	8.56	8,97 - 8,98	8,61 - 8,98	8,71 - 8,99	8,81 - 8,99	8,51-9,00	9,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Harapan Lama Sekolah (12)*	Tahun	12.3	13,00	13,01	13,02	13,03	13,01-13,40	13.52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (13)*		8.77	9.77	10.77	11.77	12.77	13.77	14.77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (14*)		36.37%	36.51%	37.01%	37.51%	38.01%	38.51%	39.01%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
15	Tingkat Kemiskinan (15)*	%	10,68	9,86 - 10,11	9.00-9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25	Bappeda
16	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (16)*	%	6.23	6.29	6.36	6.42	6.48	6.55	6.61	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
17	Persentase Penyandang Disabilitas yang terlatih (17)*	%	4.62%	7.40%	8.40%	9.40%	10.40%	11.40%	12.40%	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (18)*	Angka		59,10 - 59,12*	59,11-59,13	59,12-59,14	59,13-59,15	59,50-62,00	59,51-62,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (19)*	Angka	90.50	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25	Badan Kesbangpol
20	Indeks Pembangunan Keluarga (20)*	Angka	61.52	61.83	62.14	62.45	62.76	63.07	63.39	Dinas PPKBPPPA
21	Indeks Perlindungan Anak (21)*	Angka	60.18 (tahun 2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92	Dinas PPKBPPPA
22	Indeks Pembangunan Pemuda (22)*	Angka	61.84	61.94-62.00	62.4	62.6	62.8	62,53-65,00	63.2	Dinas Pora Pariwisata
23	Indeks Ketimpangan Gender (23)*	Angka	0.41	0.405	0.403	0.401	0.399	0.397	0.395	Dinas PPKBPPPA
24	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (28)*	%	29%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
25	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (29)*	%	43.10%	4.21	4.23	4.25	4.27	4.29	4.31	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
26	Persentase koperasi Sehat (31)*	%	34%	36%	36%	37%	38%	39%	40%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
27	Return on Aset (ROA) BUMD (32)*	%	-2.05%	-2.00%	-1.95%	-1.90%	-1.85%	-1.80%	-1.75%	BKAD
28	Tingkat Pengangguran Terbuka (33)*	%	2.09	1.90 - 2.08	1.75 - 2.05	1.70 - 2.02	1.60 - 1.99	1.50 - 1.98	1.40 - 1.95	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (34)*	%	41.56	41.98	42.40	42.82	43.25	43.68	44.12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
30	Tingkat kriminalitas (47)*	%		0.034%	0.033%	0.032%	0.031%	0.030%	0.029%	Satpol PP
31	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (55)*	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol
32	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36%	4.59%	4.83%	5.09%	5.36%	5.64%	5.94%	Bappeda
33	PDRB Perkapita	Rp Juta	31.35	33,68	37,35	40.35	43.35	46.35	49.35	Bappeda
34	Nilai investasi (Rupiah)	Rupiah	187.253.670.764	104.640.000.000	25,000,000,000	26,250,000,000	27,693,750,000	29,355,375,000	31,410,251,250	Dinas PM PTSP
35	Indeks Gini	Angka	0,290	0,263	0.260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272	Bappeda
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0.380	0.410	0.440	0.470	0.500	0.530	0.560	Sekretariat Daerah
37	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,41	72,75	73,43	74,02	74,55	75,10	75,71	Bappeda
38	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol
39	Persentase pemajuan kebudayaan daerah	%	10,43%	12.64%	12,63%	14,83%	17,03%	19,23%	21,42%	Dinas Pendidikan dan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Kebudayaan
40	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	12,25%	13.48%	14.60%	15.73%	16.85%	17.97%	19.10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	Angka	5,32%	7.57%	9.67%	11.82%	13.97%	16.12%	18.27%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (24)*	%	5.32%	5.49%	5.99%	6.49%	6.99%	7.49%	7.99%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (25)*	%	1.37%	1.38%	1.38	1.41	1.44	1.46	1.49	Dinas Pora Pariwisata
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (26)*	ribu orang	0.169	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.35	Dinas Pora Pariwisata
4	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (27)*	%	2024 : 683 pelaku, 2024 tidak ada data	6.79	8.79	10.79	12.79	14.79	16.79	Dinas Pora Pariwisata
6	Rasio Kewirausahaan (30)*	%	1.88	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Indeks Inovasi Daerah (35)*	Angka	69.94	Sangat Inovatif (70)	Sangat Inovatif (71)	Sangat Inovatif (72)	Sangat Inovatif (73)	Sangat Inovatif (74)	Sangat Inovatif (75)	Brida
8	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer (36)*	%	46.53	47.00	47.47	47.94	48.42	48.91	49.40	Dinas LH
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (37)*	Angka	5.78 (angka provinsi tahun 2023)	5.65	5.7	5.75	5.8	5.85	5.9	Dinas Kominfo
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (38)*	Rp	35.66%	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	37.99%	Bappeda
11	Ekspor Barang dan Jasa (39)*	Rp	33.31	57.37	57.63	57.89	58.16	58.42	58.68	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
12	kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (40)*	%	2.05%	1,98%	1,97%	1,96%	1,95%	1,94%	1,93%	Bappeda
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan (41)*	%	92.96	94.69	94.96	95.22	95.49	95.75	96.02	Dinas PU PR
14	Presentase Desa Mandiri (42)*	%		0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	Dinas PMP

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (51)*	%	0.16%	0.17%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	Bapenda
16	Tingkat Inflansi (52)*	%	1,57% (angka Prov)	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	Setda
17	Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit (53)*	%	39.23%	42.00%	43.00%	44.00%	45.00%	46.00%	47.00%	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
18	Persentase fasilitasi dokumen kerja sama daerah (54)*	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda
19	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infastruktur	Angka	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46	Brida
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum (43)*	Angka	77.18	77.57	77.95	78.34	78.74	79.13	79.52	Setda
2	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (44)*	Angka	2.62	2.95	3.05	3.15	3.25	3.35	3.45	Dinas Kominfo
3	Indeks Pelayanan Publik (45)*	Angka	3.90	3.94	3.98	4.02	4.06	4.10	4.14	Setda
4	Indeks Integritas Nasional (46)*	Angka	70.23	70.58	70.93	71.29	71.65	72.00	72.36	Setda

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Capaian Aksi HAM (48)*	%	83.45%	83.87%	84.29%	84.71%	85.13%	85.56%	85.99%	Setda
6	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (49)*	%		80.00%	80.50%	81.00%	81.50%	82.00%	82.50%	Satpol PP
7	Indeks Demokrasi Indonesia (50)*	%		79,36-81,00 (sedang)	81,00-81,33	81,33-81,73	81,73-82,00	82,00-83,00	83,00-83,25	Badan Kesbangpol
8	Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	Angka	70.74	72.00	72.50	73.00	73.50	74.00	75.00	Setda
9	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52	Brida
	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	55.93	56.52	56.85	57.00	58.00	59.00	60.00	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98.5	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	%	96.74	100	100	100	100	100	35	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pendidikan menengah pertama									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12.36	14.41	15.21	20	25	30	35	Dinas Pendidikan
2	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota									
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%		0.407	0.403	0.399	0.395	0.392	0.388	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	88.04	80	82	85	88	90	90	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	98.90	87	88	89	90	91	92	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir	%	97.67	91	92	93	94	95	95	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir									
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95.8	50	55	60	65	70	70	Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95.54	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99.47	202,492	206,539	206,539	206,539	206,539	206,539	Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95.18	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95.8	15,328	15,333	15,337	15,342	15,346	15,351	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92.19	2,489	2,149	2,150	2,151	2,152	2,152	Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	98.67	519	531	531	532	532	532	Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	94.9	4,300	3,886	3,353	2,972	2,683	2,460	Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	76.64	4,306	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota									
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang	Ha	159.5	192 Ha	224,5 Ha	257 Ha	289,5 Ha	322 Ha	354,5 Ha	Dinas PU PR

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota									
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Km	64 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	Dinas PU PR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Ha	475 ha	601	727	853	979	1105	1231	Dinas PU PR
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	88.48	88.81	89.15	89.49	89.83	90.17	90.52	Dinas PU PR

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99.71	96.35	96.60	97.10	97.10	97.35	97.60	Dinas PU PR
	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU PR
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	58.80	59.10	60.40	61.80	63.30	65.00	66.70	Dinas PU PR
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU PR
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota									
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit	0	2	4	4	4	4	4	Dinas PU PR
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0.50%	0.75%	1.30%	1.55%	1.80%	2.05%	2.30%	Dinas PU PR

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit			5001	4801	4601	4401	4201	Dinas PU PR
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota									
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.04%	0.04%	0.03%	0.10%	0.38%	0.03%	0.03%	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	evakuasi korban bencana									
	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	BPBD
6	Urusan Sosial Kabupaten/Kota									
	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota									
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang mengacu ke rencana tenaga kerja									Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Jumlah angkatan kerja yng dilatih / jumlah angkatan kerja x 100 %)	%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	53.08	50	50	50	50	50	50	Dinas Tenaga Kerja
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota									
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2.5	10	5	6	7	8	10	Dinas PPKBPPPA
7	Urusan Pangan Kabupaten/Kota									
	Persentase Cadangan Pangan	%	125,28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
8	Urusan Lingkungan Hidup									

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kabupaten/Kota									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	73.09	67.23	74.89	75.14	75.39	75.65	75.91	Dinas LH
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	32.52	70	75	79	76	73	70	Dinas LH
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	50	60	63	66	70	75	80	Dinas LH
9	. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota									
	Perekaman KTP Elektronik	Jiwa	221.293	222.293	223.293	224.293	225.293	226.293	227.293	Dinas Kependudukan
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	81.51%	81.60%	81.70%	81.80%	81.90%	82.00%	82.10%	Dinas Kependudukan
	Kepemilikan akta kelahiran	Jiwa	168.909	171.909	174.909	177.909	180.909	183.909	186.909	Dinas Kependudukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										an
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	PD	-	-	1	-	1	-	1	Dinas Kependudukan
10	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota									
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	48.09%	49.62	51.15	52.67	54.20	55.73	57.25	Dinas PMP
11	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota									
	TFR (Angka Kelahiran Total)	Poin	2,47	2.46	2.46	2,65	2,44	2,43	2,42	Dinas PPKBPPPA
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	75.6	75.6	75.6	75.7	75.8	75.9	76	Dinas PPKBPPPA
	Persentase kebutuhan ber-KB	%	4.6	4.6	8.7	8.4	8.1	7.8	7.5	Dinas PPKBPPPA

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)									
12	Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota									
	Rasio konektivitas	Poin	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	Dinas Perhubungan
	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Poin	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.1	Dinas Perhubungan
13	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota									
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Nihil	40%	45%	50%	55%	60%	65%	Dinas Kominfo
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Nihil	40%	45%	50%	55%	60%	65%	Dinas Kominfo
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,	%	89%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kominfo

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota									
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	8	9	10	11	12	13	14	Dinas Koperasi
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	UMKM	2,833	2,356	2,380	2,403	2,427	2,452	2,476	Dinas Koperasi
15	Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota									
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	56.43%	5%	-76.00%	5.00%	5.50%	6.00%	7.00%	Dinas PM PTSP
16	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota									
	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0.38	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	Dinas Pora Pariwisata
17	Urusan Statistik Kabupaten/Kota									

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo
18	Urusan Persandian Kabupaten/Kota									
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	Dinas Kominfo
19	Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota									
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%		12,64%	12,63%	14,83%	17,03%	19,23%	21,42%	Dinas Pendidikan
20	Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota									
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	83,99	90,05	90,15	90,25	90,35	90,45	90,55	Dinas Perpustakaan
	Indeks Pembangunan	Poin	68,29	70,05	70,15	70,25	70,35	70,45	70,55	Dinas Perpustakaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Literasi Masyarakat									n
21	Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota									
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	Dinas Perpustakaa n
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	Dinas Perpustakaa n
22	Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
	Jumlah Total	Ton	10.768,56 Ton	10.773,59 Ton	10.945,96 Ton	11.132,04 Ton	11.332,42 Ton	11.547,74 Ton	11.778,69 Ton	Dinas

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota									Perikanan
23	Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota									
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	-33	5	5.05	10.47	15.88	21.66	27.80	Dinas Pora Pariwisata
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-24	2.0	5.1	9.3	14.7	20.5	26.5	Dinas Pora Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1.37	1.35	1.38	1.41	1.44	1.46	1.49	Dinas Pora Pariwisata
24	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota									
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,26 Ton/Ha	5,265 Ton/Ha	5,265 Ton/Ha	5,27 Ton/Ha	5,275 Ton/Ha	5,28 Ton/Ha	5,29 Ton/Ha	Dinas TPH
25	Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota									
	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin	pelaku usaha	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Koperasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)									
	Persentase kinerja realisasi pupuk (Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%)	%	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Koperasi
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	8,30	8.50	8.70	8.90	8.90	9.10	9.40	Dinas Koperasi
26	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota									
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pencapaian sasaran	%	0	0	2	2	2	2	2	Dinas Tenaga

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK									Kerja
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	25	25	25	25	25	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	25	25	25	25	25	Dinas Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	25	25	25	25	25	Dinas Tenaga Kerja
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0	0	25	25	25	25	25	Dinas Tenaga Kerja
27	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota									
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	14,76%	14.50%	14.25%	14.00%	13.75%	13.50%	13.25%	BKAD
	Rasio PAD									Badan Pendapatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Daerah
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)									Inspektorat
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)									Inspektorat
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	64,70%	64.50%	64.25%	64.00%	63.75%	63.50%	63.25%	BKAD
	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	BKAD
28	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota									
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	6.82%	6	6	6.2	6.4	6.6	6.8	Sekretariat Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	37%	30	31	32	33	34	35	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro,	%	89.96%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah									
29	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota									
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	83.47%	83.50%	84%	85%	86%	87%	88%	BKPSDM
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30.10%	30.50%	31%	32%	33%	34%	35%	BKPSDM
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12.52%	11%	10%	12%	14%	16%	18%	BKPSDM
30	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota									
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,81%	2.60%	2.50%	2.40%	2.30%	2.20%	2.10%	BKAD
	Assets Management	poin	4	4	4	4	4	4	4	BKAD
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,63%	5.50%	5.25%	5.00%	4.75%	4.50%	4.25%	BKAD
31	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota									
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	informasi	123	123	130	135	137	138	140	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BKAD

Keterangan :
 (...) * merupakan indikator yang berasal dari Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045

Dukungan Terhadap Program Nasional RPJMN 2025-2029

Tabel 4.5 Dukungan Terhadap Prioritas Nasional RPJMN

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
I	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		
1	Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol
2	Penguatan komunikasi publik dan media	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Penguatan lembaga demokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol
4	Penguatan kesetaraan masyarakat sipil	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesbangpol
5	Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
II	Memantapkan Sistem Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digid, Ekonomi Hiiu, dan Ekonomi Biru		
1	Pembangunan postur pertahanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol
2	Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Komponen cadangan dan komponen pendukung	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
4	Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesbangpol
5	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi	-	-
7	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP dan Damkar
8	Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian	-	-
9	Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi	-	-
10	Swasembada pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
11	Swasembada Energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
12	Swasembada air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PUPR
13	Penguatan ekonomi syariah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
14	Ekonomi digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Ekosistem ekonomi sirkular	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
16	Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
17	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PUPR
18	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
19	Pembangunan rendah karbon	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
20	Pekerjaan hijau/ green jobs	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnakerprin LB
21	Pengelotraan hutan lestari	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
22	Pengembangan ekonomi biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
III	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
1	Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
2	Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
3	Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
4	Pendalaman sektor keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
IV	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas		
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata	-	-
7	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptekin)	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah
9	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
10	Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
11	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
12	Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
13	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
14	Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
15	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
16	Peningkatan ketangguhan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
17	Peningkatan kualitas perlindungan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
18	Peningkatan kualitas pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
20	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
21	Peningkatan pembinaan prestasi olahraga.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
22	Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
V	Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
1	Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
2	Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
4	Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
6	Optimalisasi investasi strategis negara	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
VI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		
1	Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
2	Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
3	Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnakerprin LB
4	Pembangunan perkotaan berkelanjutan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PUPR
5	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-
6	Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PUPR

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
VII	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		
1	Reformasi politik dan tata kelola pemilu	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol
2	Reformasi hukum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
3	Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Lampung Barat
4	Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Lampung Barat
5	Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Lampung Barat
6	Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol
7	Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8	Pemerintah digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
10	Penataan desentralisasi dan otonomi daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
11	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
12	Optimalisasi pendapatan negara	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
13	Optimalisaei belanja negara	PROGRAM PENGELOLAAN	Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas	Program RPJMD Lampung Barat	Perangkat Daerah
		KEUANGAN DAERAH	
14	Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
15	Pengendalian inflasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
16	Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia,	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnakerprin LB
VIII	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antammat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
1	Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol
2	Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pembangunan berketahanan iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pengelolaan risiko bencana yang elisien dan tepat guna	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD

Dukungan Program Terhadap 83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 83 kegiatan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pilar utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi digital. Dukungan yang terpadu dan komprehensif dari seluruh lapisan pemerintahan sangat diperlukan agar program-program prioritas ini dapat berjalan efektif dan berdampak luas.

Setiap program pembangunan di tingkat daerah dan nasional diarahkan untuk mendukung terlaksananya 83 kegiatan prioritas tersebut, sehingga tercipta sinergi yang kuat antar sektor dan wilayah. Pengintegrasian program-program daerah dengan kegiatan prioritas nasional menjadi kunci agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan terfokus pada pencapaian hasil yang nyata. Hal ini menuntut perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan membangun kemitraan strategis.

Dukungan program terhadap kegiatan prioritas RPJMN juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjawab tantangan global dan nasional, seperti percepatan transformasi digital, ketahanan pangan, serta mitigasi perubahan iklim. Dengan fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas yang strategis, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan daya saing, mendorong pemerataan pembangunan, dan memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional selama periode 2025-2029.

Tabel 4.6 Dukungan 83 Kegiatan Utama Prioritas RPJMN

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Telaksananya Penyusunan dan evaluasi Rencana Pemabngunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	-		-
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Pangan Sumatera Selatan (KSPP)/Lumbung	-		-
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	-		-
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tercapainya ketersediaan pangan utama (beras)	Dinas Ketahanan Pangan
7	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan yang dilaksanakan	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah Sosialisasi dan	Dinas Perikanan

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
		PERIKANAN BUDIDAYA	Pelatihan yang dilaksanakan	
8	Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan yang dilaksanakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tercapainya ketersediaan pangan utama (beras)	Dinas Ketahanan Pangan
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	-		-
11	Peningkatan Penyediaan Energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya pemantauan kebijakan SDA	Sekretariat Daerah
12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya pemantauan kebijakan SDA	Sekretariat Daerah
13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya pemantauan kebijakan SDA	Sekretariat Daerah
14	Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Telaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
15	Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	DINAS PUPR

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
	Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	DRAINASE	Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	-		-
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	-		-
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik serta Akses	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	-		-
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya pemantauan kebijakan SDA	Sekretariat Daerah
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur- Yogyakarta-Prambanan	-		-
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	-		-

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	-		-
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	-		-
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
35	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	-		-
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
45	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
48	Etiminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
49	Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
	Daerah Sulit Akses		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	-		-
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	-		-
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	-		-
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	-		-
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	-		-
62	Pengembangan Industri Kimia	-		-
63	Pembangunan Industri Semi konduktor	-		-
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	-		-
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	-		-
66	Pengembangan Industri Dirgantara	-		-

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	-		-
68	Pengembangan KIT Batang	-		-
69	Pengembangan KI Weda Bay	-		-
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	-		-
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Alirnatif	-		-
73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	-		-
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	DINAS PUPR
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Inspektorat Lampung Barat

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Output Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pengawasan	
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	-		-

Dukungan Program Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Lampung Barat menyelaraskan visi dan misi pembangunan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2025-2029. Program ini menjadi acuan strategis dalam mendorong pemberdayaan desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 secara konsisten mengintegrasikan langkah-langkah konkret guna mendukung pencapaian target-target PHTC tersebut.

Pertama, pengoptimalan potensi ekonomi desa dan daerah melalui peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan dari desa dan dari bawah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan yang merata. Selanjutnya, pembangunan unit produksi mikro pupuk organik yang dikelola oleh BUMDes dan kelompok tani (Poktan) merupakan langkah strategis untuk menyediakan kebutuhan pupuk yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan produk lokal yang tersedia di pasar lokal merupakan upaya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk memperkuat rantai distribusi dan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, dukungan penuh terhadap PHTC menjadi landasan bagi pengembangan potensi daerah secara holistik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Tabel 4.7 Dukungan PHTC Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
1	Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes /Koperasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025- 2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2	Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 4.8. Dukungan Program Terhadap Tematik Pembangunan RPJMN

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, trantibum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,)	Program pengelolaan pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Program Penangan Bencana	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Program penataan bangunan gedung	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		Program pengembangan perumahan	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
2	Pengendalian Inflasi	Program kawasan permukiman	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Program pengembangan ekspor	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Program penyuluhan pertanian	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Program penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Program Pembinaan, pengawalan dan pemantauan harga	-
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3	Penurunan Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Program Penunjang Urusan Daerah	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Program Pengelolaan sampah	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Program Kawasan Pemukiman	-
		Program rehabilitasi sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Program pengendalian penduduk	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
4	Penurunan Angka Kemiskinan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	-
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		Program pengembangan umkm	-
		Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	-
		Program pengelolaan perikanan tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		Program pengelolaan perikanan budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Program pemasaran pariwisata	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program penanganan kerawanan pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	-
		Program pengelolaan ketenagalistrikan	-
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
		Program perencanaan dan pembangunan industri	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Program fasilitasi dan koordinasi hukum	-
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Program penyelenggaraan jalan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program penataan bangunan gedung	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		Program pengembangan perumahan	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Program pemberdayaan sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	-
		Program rehabilitasi sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Program perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Program penanganan bencana	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian provinsi	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
5	Ketahanan Pangan	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program penanganan kerawanan pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Program pengawasan keamanan pangan	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Program penyuluhan pertanian	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
6:00	Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengelolaan Hutan	-
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	-
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	-
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	-
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	-
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	-
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	-
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk potensi daerah, tantangan, serta peluang yang ada.

Keberhasilan implementasi RPJMD ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Komitmen bersama dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi faktor utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan RPJMD ini akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan Kabupaten Lampung Barat dapat terus berkembang menjadi daerah yang lebih HEBAT dan SETIA. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong inovasi dan investasi dalam berbagai sektor. Semoga dokumen perencanaan ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik di masa depan.

